



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terencana, terpadu dan berkelanjutan perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa untuk memeberikan landasan dan kepastian hukum terhadap dilakukannya perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 perlu diatur dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah lingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);
 7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomor 20);
 8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

6. Rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan kebijakan umum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah.

BAB II

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Bappelitbangda menyusun Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan Sistematisa sebagai berikut:
 - a. bab I memuat Pendahuluan;
 - b. bab II memuat Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024;
 - c. bab III memuat Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI memuat Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 20 September 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 20 September 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

NICODEMUS UBRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DEBBIE P. J. BUNGA, SH
NIP. 19781220 200804 2 001





**KABUPATEN
MALUKU
TENGGARA**



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		ix
BAB I. PENDAHULUAN		I - 1
1.1. Latar Belakang		I - 1
1.2. Dasar Hukum		I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD		I - 7
1.4. Sistematika Penulisan		I - 8
BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024		II - 1
2.1. Evaluasi Kinerja Capaian Rencana Pembangunan Daerah		II - 1
2.2. Serapan Anggaran		II - 3
2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		II - 4
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		III - 1
3.1. Kerangka Ekonomi Tahun 2024		III - 1
3.1.1. Dinamika Lingkungan Strategis Global		III - 1
3.1.2. Dinamika Lingkungan Strategis Nasional		III - 5
3.1.3. Dinamika Lingkungan Strategis Provinsi Maluku		III - 13
3.1.4. Dinamika Lingkungan Strategis Kabupaten Maluku Tenggara		III - 15
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024		III - 21
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah		III - 21
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah		III - 26
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah		III - 32
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan		IV - 1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional		IV - 1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku		IV - 3
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara		IV - 6
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024		IV - 8

4.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024		IV -	8
4.2.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024		IV -	11
4.2.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024		IV -	12
4.3. Prioritas Sesuai Peraturan Perundang-Undangan		IV -	18
4.3.1. Pemenuhan Mandatory Spending		IV -	18
4.3.2. Pemenuhan SPM		IV -	18
4.3.3. Dukungan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024		IV -	22
4.4. Prioritas Sesuai Peraturan Perundang-Undangan		IV -	23
4.5. Sinergi Perencanaan Daerah Mendukung Prioritas Nasional		IV -	24
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		V -	1
5.1. Belanja Wajib dan Mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		V -	1
5.1.1. Kebijakan Belanja Mendanai Urusan Mandatory Spending		V -	1
5.1.2. Pemenuhan SPM		V -	10
5.1.3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024		V -	19
5.2. Belanja Pemenuhan Target Pembangunan Daerah		V -	20
5.2.1. Pencapaian Target Pembangunan Jangka Menengah Daerah		V -	20
5.2.2. Pendanaan Tematik Pembangunan Daerah		V -	27
5.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah		V -	33
BAB VI. PENUTUP		VI -	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan dan IKU Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026	II -	1
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan Daerah Triwulan II Tahun 2024	II -	3
Tabel 2.3	Evaluasi Hasil Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Triwulan II Tahun 2024	II -	5
Tabel 2.4	Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Triwulan II Tahun 2024	II -	57
Tabel 3.1	Realisasi dan Target Kinerja Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024	III -	12
Tabel 3.2	Realisasi dan Target Kinerja Ekonomi Makro Provinsi Tahun 2024	III -	15
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023	III -	17
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026	III -	17
Tabel 3.5	Uraian Perubahan Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024	III -	18
Tabel 3.6	Uraian Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024	III -	22
Tabel 3.7	Uraian Perubahan Pendapatan Transfer Tahun 2024	III -	23
Tabel 3.8	Uraian Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024	III -	24
Tabel 3.9	Uraian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024	III -	25
Tabel 3.10	Uraian Belanja Daerah Tahun 2024	III -	26
Tabel 3.11	Uraian Perubahan Belanja Operasi Tahun 2024	III -	27
Tabel 3.12	Uraian Perubahan Belanja Modal Tahun 2024	III -	29
Tabel 3.13	Uraian Perubahan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024	III -	29
Tabel 3.14	Uraian Perubahan Belanja Transfer Tahun 2024	III -	30
Tabel 3.15	Uraian Perubahan Komponen dan Sub Komponen Belanja Daerah Tahun 2024	III -	32
Tabel 3.16	Uraian Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024	III -	33

Tabel 3.17	Uraian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024		III -	33
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		IV -	4
Tabel 4.2	Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 dengan tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara 2024-2026		IV -	7
Tabel 4.3	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD 2024-2026 dengan Prioritas Daerah Tahun 2024		IV -	12
Tabel 4.4	Keselarasan Prioritas Daerah dan Fokus Tahun 2024		IV -	13
Tabel 4.5	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Perubahan Tahun 2024		IV -	16
Tabel 4.6	Program Prioritas Kabupaten Maluku Tenggara dalam Hubungan dengan Prioritas Nasional dan Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2024		IV -	24
Tabel 5.1	Perhitungan Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2024		V -	2
Tabel 5.2	Pendanaan dan Program Fungsi Pendidikan Tahun 2024		V -	2
Tabel 5.3	Pendanaan dan Program Fungsi Kesehatan Tahun 2024		V -	5
Tabel 5.4	Perhitungan Anggaran Fungsi Infrastruktur Tahun 2024		V -	7
Tabel 5.5	Perhitungan Rasio Belanja Infrastruktur Tahun 2024		V -	8
Tabel 5.6	Pendanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Tahun 2024		V -	8
Tabel 5.7	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Menurut Perangkat Daerah Tahun 2024		V -	13
Tabel 5.8	Pendanaan Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Menurut Perangkat Daerah Tahun 2024		V -	14
Tabel 5.9	Penganggaran Hibah Daerah untuk Pemilukada Serentak Tahun 2024		V -	19
Tabel 5.10	Pendanaan Kegiatan untuk Pencapaian Target Pembangunan Daerah Tahun 2024		V -	20
Tabel 5.11	Pendanaan Program dan Kegiatan Penurunan Stunting Tahun 2024		V -	27
Tabel 5.12	Pendanaan Program dan Kegiatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024		V -	29
Tabel 5.13	Pendanaan Program dan Kegiatan Pengendalian Inflasi Tahun 2024		V -	32

Tabel 5.14	Pendanaan Program dan Kegiatan Menunjang Prioritas Nasional Tahun 2024	V -	35
------------	---	-----	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Flobal, Negara Maju dan Negara Berkembang	III -	2
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara dengan Ekonomi Terbesar Tahun 2023	III -	2
Gambar 3.3	Inflasi dan Suku Bunga Tahun 2021 s.d. 2024 (TW.1)	III -	3
Gambar 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020-2024	III -	5
Gambar 3.5	Pertumbuhan dan Distribusi PDB menurut Regional Tahun 2024	III -	7
Gambar 3.6	Tren Perubahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Tahun 2019-2024	III -	8
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Tahun 2020-2024	III -	9
Gambar 3.8	Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2020-2024	III -	10
Gambar 3.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2020-2023	III -	11
Gambar 3.10	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan Share Regional terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2024	III -	12
Gambar 4.1	Misi Pembangunan Nasional 2020-2024	IV -	2
Gambar 4.2	Arahan Presiden Republik Indonesia	IV -	3
Gambar 4.3	Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV -	9
Gambar 4.4	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV -	10
Gambar 4.5	Prioritas Nasional Tahun 2024	IV -	11
Gambar 5.1	Major Project Jalan Trans Pulau Kei Besar RPJMN 2020-2024	V -	33
Gambar 5.2	Proyek Prioritas RPJMN Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap di Kabupaten Maluku Tenggara RPJMN 2020-2024	V -	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, RKPD disusun juga dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan lainnya.

Dokumen RKPD menjadi dasar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD bersifat dinamis, dan fleksibel terhadap perubahan. RKPD yang dinamis dapat dilakukan perubahan dalam tahun berjalan sesuai amanat Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 264 Ayat (5).

Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 343 disebutkan, Perubahan RKPD dan renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 47 Tahun 2023. RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kesatu dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian yang memungkinkan dilakukan Perubahan terhadap RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024. Beberapa asumsi yang menjadi dasar dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

1) Aspek Pendanaan

Pada sisi pendapatan, terdapat beberapa komponen dan sub komponen pendapatan daerah perlu penyesuaian. Pengelompokkan belanja menurut sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dilakukan untuk mengakomodir kebijakan DAK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024. Termasuk penyesuaian Nomenklatur dan rincian belanja DAK sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri, Nomor: 900.1/1819.A/J tanggal 22 April 2024 tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA.2024.

Pada sisi belanja, penyesuaian dilakukan pada komponen Gaji dan Tunjangan guna mengakomodasi perubahan struktur dan jumlah ASN, kenaikan gaji serta penerimaan PPPK hasil seleksi Tahun 2023 yang ditempatkan di OPD. Penyesuaian belanja juga dalam rangka mengakomodasi pergeseran anggaran dalam Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program dalam OPD, dan/atau pergeseran anggaran antar-OPD.

Sedangkan di sisi pembiayaan, penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan besaran penerimaan pembiayaan dari sub komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Semula dianggarkan dalam APBD 2024 sebesar Rp4.719.585.949 berdasarkan hasil audit BPK Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 33.478.151.129.

2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas dan sasaran pembangunan di dalam RKPD Tahun 2024 mengalami penyesuaian sehubungan dengan terjadinya perubahan kebijakan, baik skala nasional maupun daerah. Kebijakan nasional untuk pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim masih perlu masih perlu didorong dari sisi penganggaran.

Sasaran pembangunan Ekonomi Makro Tahun 2024 perlu disesuaikan kembali. Proyeksi target pada beberapa indikator sudah mampu tercapai dan/atau terlampaui pada tahun 2023. Proyeksi ulang berdasarkan capaian hasil tahun 2023 dilakukan untuk mendorong kinerja daerah mengejar ketertinggalan dari capaian Provinsi Maluku dan Nasional.

3) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyesuaian atas anggaran program dan kegiatan dilakukan sebagai dampak dari perubahan kebijakan alokasi anggaran belanja, hal ini berdampak pada penyesuaian rincian belanja serta penyesuaian target output kegiatan. Penyesuaian juga dilakukan untuk mengakomodir pergeseran anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kewajiban belanja prioritas, penting dan mendesak yang membutuhkan dukungan pendanaan.

2. Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran lebih digunakan.

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023, yang dianggarkan sebagai SiLPA harus digunakan dalam tahun 2024. SiLPA tahun 2023 yang dianggarkan kembali Tahun 2024 digunakan untuk menutupi kewajiban-kewajiban pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Penganggaran kembali BLUD Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, sebesar Rp4.630.553.158,00
- 2) Penganggaran Belanja JKN FKTP di Puskesmas, sebesar Rp50.562.893,36;
- 3) Penganggaran untuk belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan, sebesar Rp103.360.272,61;
- 4) Penganggaran BOK Puskesmas sebesar Rp1.005.504.340,00; dan
- 5) Belanja kegiatan Luncuran yang tidak terbayarkan pada Tahun 2023, utang kegiatan dan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran untuk belanja prioritas, penting dan mendesak yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun 2024, dengan nilai anggaran sebesar Rp30.739.796.985,95.

Asumsi yang melandasi Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, sekaligus menjadi urgensi perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Selanjutnya, kebijakan yang disusun dalam rangka menjawab urgensi tersebut, menjadi substansi Perubahan RKPD Tahun 2024.

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan kaidah dan pentahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD.

Perubahan RKPD Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta sekaligus menjadi dasar perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 189);
18. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang sudah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019–2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019–2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara, 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 220);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231);

32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 254);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026;
37. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024;
38. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menyesuaikan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan, rencana program dan kegiatan sesuai dengan kondisi aktual daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024, sebagai upaya mewujudkan sinergi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor dan antartingkatan pemerintahan, guna efisiensi dan efektivitas pengalokasian sumber daya pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

- 1) Menjadi dasar perumusan KUPA dan PPAS–P untuk penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024;
- 2) Menjadi pedoman perumusan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- 3) Menjadi instrumen pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN SEMESTER PERTAMA TAHUN 2024

- Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan I dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro semester pertama tahun 2022 dan proyeksi tahun 2024, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada tahun 2024.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- Bab ini menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024

- Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II

TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Kinerja Capaian Rencana Pembangunan Daerah

2.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kesatu, pelaksanaan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026. RKPD menjadi ukuran dan sekaligus alat untuk perwujudan target kinerja RPD.

Evaluasi terhadap upaya perwujudan target kinerja RPD dilaksanakan setiap tahun melalui Evaluasi capaian IKU. Pengukuran capaian IKU dilaksanakan terhadap sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPD.

RPD mengusung visi daerah sesuai Visi Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005–2025. Upaya perwujudan Visi RPJPD melalui 5 (lima) Misi pembangunan, sebagai berikut:



RPD mengelaborasi upaya pencapaian Visi dan Misi dengan 5 (lima) Tujuan dan 17 (tujuh belas) Sasaran Pembangunan. IKU yang menjadi ukuran pencapaian sasaran ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator. IKU terdistribusi ke dalam 5 Misi, 5 Tujuan dan 17 Sasaran seperti ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.1

**Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan dan IKU Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026**

Misi	Tujuan	Sasaran Pembangunan	Indikator
I. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Bertaqwa, dan Berbudaya	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang harmonis, toleran dan berbudaya	Meningkatnya kualitas kerukunan hidup masyarakat	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan Masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran Pembangunan	Indikator
		Meningkatnya kualitas budaya daerah	Indeks Kualitas Budaya Daerah
		Terjaganya Stabilitas Politik, Keamanan dan keterlibatan umum	Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum
II. Mewujudkan Masyarakat Maluku Tenggara yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
		Meningkatnya Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga	Indeks Kualitas Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga
		Terkendalnya Inflasi Daerah	Indeks Pengeluaran
III. Mewujudkan perekonomian Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan yang tangguh dan berdaya saing	Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah	Meningkatnya Perekonomian Daerah	▪ LPE PDRB ADHB ▪ LPE PDRB ADHK ▪ PDRB Perkapita ADHB (000) ▪ PDRB Perkapita ADHK (000)
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Terkendalnya Inflasi Daerah	Inflasi
IV. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkeadilan	Menurunnya Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak	▪ Indeks Pembangunan Gender ▪ Indeks Kabupaten Layak Anak (KLA)
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan	Indeks Kuailtas Pembangunan Wilayah
		Meningkatnya Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana	Angka Korban Bencana Alam dan Kebakaran
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH
		Meningkatnya Arus Penumpang/ barang dalam daerah	Pertumbuhan Lalulintas Orang/barang

Misi	Tujuan	Sasaran Pembangunan	Indikator
			melalui terminal /dermaga/bandara
V. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Berlandaskan Hukum	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan berlandaskan hukum	▪ Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ▪ Nilai AKIP ▪ Nilai LPPD ▪ Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik ▪ Indeks Daya Saing Daerah

Evaluasi capaian IKU dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja tahunan terhadap target yang ditetapkan di dalam RPD. Evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum dapat diukur karena capaian kinerja dari setiap indikator belum tersedia.

2.2. Serapan Anggaran

Serapan Anggaran sampai dengan triwulan II (per 30 Juni 2024) masih tergolong rendah, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Realisasi pendapatan daerah baru mencapai 34,70 persen, dan realisasi belanja sebesar 31,32 persen. Rincian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Realiasi Keuangan Daerah Triwulan II Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI TW. II	%
4. PENDAPATAN DAERAH	930.953.408.147	323.032.285.104	34,70
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.669.204.858	23.022.461.641	34,02
4.1.01. Pajak Daerah	37.151.837.361	6.114.224.380	16,46
4.1.02. Retribusi Daerah	6.649.532.480	10.075.884.192	151,53
4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.446.735.017	0,00	0,00
4.1.04. Lain-lain PAD yang Sah	17.421.100.000	6.832.353.069	39,22
4.2. PENDAPATAN TRANSFER	858.880.373.937	300.009.823.463	34,93
4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah	695.537.254.000	287.681.383.846	41,36
▪ Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	6.627.605.000	2.293.793.300	34,61
▪ Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	502.608.436.000	245.265.432.000	48,80
▪ Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.146.001.000	12.117.776.002	13,29
▪ Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	95.155.212.000	28.004.382.544	29,43
▪ Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
▪ Dana Desa	143.210.299.000	0,00	0,00
4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.132.820.937	12.328.439.617	61,24
▪ Pendapatan Bagi Hasil	20.132.820.937	12.328.439.617	61,24

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI TW. II	%
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.403.829.352	0,00	0,00
4.3.01. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.403.829.352	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	930.953.408.147	323.032.285.104	34,70
5. BELANJA DAERAH	963.431.559.276	301.752.255.161	31,32
5.1. BELANJA OPERASI	641.595.397.914	249.488.497.740	38,89
5.1.01. Belanja Pegawai	308.548.091.665	127.398.429.717	41,29
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa	230.855.816.553	74.943.732.849	32,46
5.1.03. Belanja Hibah	102.151.489.696	47.106.335.174	46,11
5.1.04. Belanja Bantuan Sosial	40.000.000	40.000.000	100,00
5.2. BELANJA MODAL	116.118.514.286	33.067.799.161	28,48
5.2.01. Belanja Modal Tanah	750.000.000	0,00	0,00
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.857.555.883	2.151.162.000	18,14
5.2.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.176.613.080	13.039.101.081	31,67
5.2.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.074.345.323	17.797.536.080	28,67
5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	260.000.000	80.000.000	30,77
5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	448.887.700	14,96
5.3.01. Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	448.887.700	14,96
5.4. BELANJA TRANSFER	202.717.647.076	18.747.070.560	9,25
5.4.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.865.574.876	0,00	0,00
5.4.02. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	321.869.700	0,00	0,00
5.4.03. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	200.530.202.500	18.747.070.560	9,35
Jumlah Belanja	963.431.559.276	301.752.255.161	31,32
SURPLUS/ (DEFISIT)	-32.478.151.129	21.280.029.943	
6. PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.478.151.129	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.478.151.129	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	33.478.151.129	0	
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	0	
Pembiayaan Netto	32.478.151.129	0	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkanaan	0	21.280.029.943	

2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sampai dengan triwulan II disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Evaluasi Hasil Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Maluku Tenggara
Triwulan II Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
I WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1,1	PENDIDIKAN						
	Dinas Pendidikan						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rerata Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	%	95	95.206,30	12,36	12.389,40
01.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	87,69	0,00	0,00
01.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	94.591,01	12,30	12.244,00
01.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	95	60,00	11,04	6,97
01.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	134,07	26,14	36,89
01.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	203,61	41,31	88,53
01.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	129,92	9,51	13,01
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pengelolaan Pendidikan	%	100	86.391,25	0,87	751,83
02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		%	100	58.991,87	18,33	10.814,85
02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		%	100	19.162,61	3,36	643,19
02.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		%	100	5.453,00	0,43	23,37
02.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		%	100	2.783,73	3,15	87,65
3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembangan Kurikulum Mulok pada Dikdas, Paud dan Pendidikan Kesetaraan	%	100	117,80	0,00	0,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
03.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		%	100	117,80	0,00	0,00
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		%	100	150,00	0,00	0,00
04.01	Penerbitan Izin Paud dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		%	100	150,00	20,39	30,58
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra		%	100	0,00	0,00	0,00
05.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		%	100	0,00	0,00	0,00
1,2	KESEHATAN						
	Dinas Kesehatan						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rerata Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	%	95	70.928,94	36,32	27.120,82
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	151,16	67,72	107,76
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	69.501,60	36,13	26.434,63
01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		%	95	201,32	37,24	78,92
01.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	95	116,42	25,18	30,86
01.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	549,83	49,26	285,09
01.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	200,00	44,94	94,61
01.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	208,61	40,51	88,95
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pemenuhan Layanan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	%	90	52.101,09	5,29	3.064,26
02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		%	90	31.341,43	34,60	12.050,43

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	90	16.278,79	33,80	6.113,63
02.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		%	90	454,83	29,11	147,11
02.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	90	4.026,02	57,82	2.586,58
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Tingkat Pelayanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional	%	100	1.508,14	50,27	758,1
03.01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		%	100	441,14	0,00	0,00
03.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100	1.067,00	86,00	917,6
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	Tingkat Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makan minum sesuai standar kesehatan	%	100	108,72	0,00	0,00
04.01	Pemberiaan Izin Apotek, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		%	100	59,00	0,00	0,00
04.02	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		%	100	49,60	0,00	0,00
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		%	100	108,72	0,00	0,00
05.01	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100	38,02	0,00	0,00
05.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat		%	100	1.950,85	10,85	211,65
1,3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	4.699,59	39,50	1.954,28
01.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	81,32	77,48	66,32
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	3.916,81	40,05	1.651,12
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	364,36	35,57	136,42
01.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	25,00	0,00	0,00
01.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	216,61	35,66	81,31
01.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	95,47	19,01	19,10
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	%	80	210,00	69,96	183,64
02.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		%	80	210,00	69,96	183,64
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	70	60.630,70	18,23	15.793,85
03.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		%	70	60.630,70	18,23	15.793,85
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Titik Genangan Air diwilayah Perkotaan Teratasi	%	80	91,00	0,00	0,00
04.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	80	91,00	0,00	0,00
5	Program Pengelolaan Sumberdaya Air	1) Panjang bibir pantai aman dari abrasi pantai	m	500	1.374,42	45,20	124,25
		2) Luasan lahan pertanian teririgasi	ha	5		0,45	
05.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		m	500	172,90	260,73	90,16

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
05.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diBawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		ha	5	1.201,52	0,12	28,08
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah tertata dengan baik	%	20	2.239,05	0,45	50,68
06.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		%	20	2.239,05	0,45	50,68
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase SR-SPAM	%	10	1.217,47	0,00	0,00
07.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		%	10	1.217,47	0,00	0,00
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga terbangun MCK	%	10	474,70	0,72	34,09
08.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	10	474,70	0,72	34,09
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		%	25	2.724,49	9,88	1.076,29
08.01	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota		%	25	2.724,49	9,88	1.076,29
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		%	100	40,00	0,00	0,00
10.01	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		%	100	40,00	0,00	0,00
1,4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.582,51	34,36	933,92

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	78,82	26,12	21,67
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.986,76	28,70	600,21
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	251,34	58,60	155,03
01.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	64,37	95,00	64,37
01.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	105,88	49,03	54,64
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni	%	100	500,00	27,72	138,60
02.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		%	100	44,10	52,38	23,10
02.02	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		%	100	205,90	0,00	0,00
02.03	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		%	100	250,00	46,20	115,50
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan tertata	%	2,5	900,00	0,00	0,00
03.01	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ha		%	2,5	900,00	0,00	0,00
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan Perumahan sehat	%	80	457,48	51,15	292,48
04.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		%	80	457,48	51,15	292,48
1,5	TRANTIBUM LINMAS						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.746,85	26,10	754,73
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	2.223,65	24,02	562,20

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	287,50	30,75	93,06
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	155,20	36,02	58,85
01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	80,50	47,91	40,60
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	%	100	56.181,99	44,16	24812,07
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		%	100	56.181,99	44,16	24812,07
3	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik	Persentase cakupan warga negara berwawasan Kewaspadaan Nasional	%	100	680,00	61,04	415,05
		Persentase Pencegahan/ Tangkal Dini Konflik					
03.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik		%	100	680,00	61,04	415,05
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa		%	100	2.000,00	25,09	501,76
04.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		%	100	2.000,00	25,09	501,76
	Satuan Polisi Pamong Praja						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	5.672,66	32,59	1.946,30
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	3.723,63	30,34	1.189,18
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	272,32	62,40	178,88

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	1.537,40	32,68	528,85
01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	139,30	33,67	49,37
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakkan PERDA tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	124,5	15,47	19,26
02.01	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		%	100	124,5	15,47	19,26
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		%	100	175,4	27,37	48
03.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		%	100	175,4	27,37	48
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.798,97	36,62	1.078,97
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	2.278,22	35,52	851,90
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	250,59	47,73	125,90
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	73,30	34,35	26,50
01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	196,85	36,03	74,65
2	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks	60	473,74	25,36	200,22
04.01	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Indeks	60	50,00	58,80	49
04.02	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana		Indeks	60	204,20	23,20	78,97
04.03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Indeks	60	219,54	14,88	54,45
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	772,57	43,60	354,59
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	45,00	16,15	7,65
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	330,01	27,26	94,68
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	161,60	93,82	159,60
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	82,44	35,12	30,48
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	153,51	38,48	62,18
2	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		%	100	318,86	27,99	89,26
02.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	100	145,22	12,11	17,58
02.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		%	95	124,07	46,54	60,78
02.03	Investigasi Kejadian Kebakaran		%	95	21,09	21,62	4,80
02.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		%	95	28,47	20,32	6,09
3	Program pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Respons time rate	Nilai	60	0,00	0,00	0
1,6	SOSIAL						
	Dinas Sosial Daerah						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	3.294,18	40,32	1.398,14
01.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	5,00	0,00	0,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	2.719,48	43,14	1.234,84
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	231,29	26,12	63,60
01.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	37,50	38,00	15,00
01.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	117,75	22,48	27,86
01.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	133,15	33,32	46,70
01.07	Penataan Organisasi		%	95	50,00	19,23	10,12
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang pulih dan hidup secara normal	%	80	446,49	10,36	57,81
02.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		%	80	443,79	9,93	55,11
02.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		%	80	2,70	80,00	2,7
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penduduk miskin mendapat fasilitas perlinsos	%	80	168,20	49,22	103,49
03.01	Pemeliharaan n Anak-Anak Terlantar		%	80	20,00	68,16	17,04
03.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		%	80	148,20	46,67	86,45
4	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana	%	100	30,00	0,00	0,00
04.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		%	100	30,00	0,00	0,00
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	%	100	95,00	5,79	5,50
05.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		%	100	95,00	5,79	5,50

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
6	Program Pemberdayaan Sosial		%	100	100,00	28,37	28,37
06.01	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota		%	100	100,00	28,37	28,37
II WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2,1	TENAGA KERJA						
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.546,11	27,55	738,29
01.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	5,00	0,00	0,00
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	2.541,11	27,60	738,29
2	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja bersertifikat	%	80	259,50	16,57	53,76
02.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		%	80	259,50	16,57	53,76
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	%	20	45,00	0,00	0,00
03.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		%	20	20,00	0,00	0,00
03.02	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		%	20	25,00	0,00	0,00
2,2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	1.990,64	18,37	384,96
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.990,64	18,37	384,96
2	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	75	152,15	7,20	14,61

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
02.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		%	75	17,15	59,13	13,52
02.02	Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		%	75	50,00	21,92	14,61
02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		%	75	85,00	0,00	0,00
3	Program Perlindungan Perempuan	Tingkat Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	%	75	842,00	26,42	296,57
03.01	Penyediaan Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota		%	75	842,00	26,42	296,57
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak Terpenuhi	%	60	30,00	26,04	13,02
04.01	Pengembangan PHA pada Lembaga pemerintah, Non pemerintah dan dunia usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		%	60	30,00	26,04	13,02
2,3	PANGAN						
	Dinas Ketahanan Pangan						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	397,40	52,61	220,09
01.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	2,40	95,00	2,40
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	9,60	31,67	3,20
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	194,56	71,34	146,10
01.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	57,50	0,00	0,00
01.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	74,40	30,95	24,24

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	58,94	71,13	44,13
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pertumbuhan Produksi Pangan Lokal	%	70	232,72	34,98	116,31
02.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		%	70	100,00	26,42	37,74
02.02	Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan Pangan Kabupaten/Kota		%	70	50,43	34,01	24,50
02.03	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		%	70	82,29	45,99	54,06
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan daerah	%	80	33,16	22,27	9,23
03.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		%	80	33,16	22,27	9,23
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Aman Konsumsi	%	100	82,00	16,59	13,60
04.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		%	100	82,00	16,59	13,60
2,4	PERTANAHAN						
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		%	100	35,00	100,00	35
01.01	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota		%	100	35,00	100,00	35
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		%	100	800,00	2,53	20,22
02.01	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota		%	100	800,00	2,53	20,22

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
3	Program Penetapan Tanah Ulayat		%	100	50,00	0,00	0
03.01	Penetapan tanah ulayat yang lokasi dalam daerah kabupaten/kota		%	100	50,00	0,00	0
2,5	LINGKUNGAN HIDUP						
	Dinas Lingkungan Hidup						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.602,63	35,66	976,90
01.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	18,91	24,87	4,95
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	2.014,95	36,92	783,01
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	228,22	44,09	105,93
01.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	103,00	0,00	0,00
01.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	130,99	35,81	49,38
01.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	106,54	29,98	33,62
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Tingkat Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	223,74	7,34	16,42
02.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		%	100	223,74	7,34	16,42
3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	%	80	0,00	0,00	0,00
03.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		%	0	0,00	0,00	0,00
4	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah 3 R	%	80	5592,22	24,36	1.702,98

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
04.01	Pengelolaan Sampah		%	80	5592,22	24,36	1.702,98
2,6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.737,10	42,99	1.238,70
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.920,37	39,20	792,32
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	316,14	79,19	263,54
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	11,50	0,00	0,00
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	151,20	41,64	66,27
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	337,88	32,77	116,56
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Ber-KTP	%	100	665,92	55,58	370,10
02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		%	100	665,92	55,58	370,10
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	178,72	80,02	143,02
03.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		%	100	178,72	80,02	143,02
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Adminduk berbasis SIAK	%	100	30,00	0,00	0,00
04.01	Pengumpulan Data Penduduk dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		%	100	30,00	0,00	0,00
2,7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	483,73	24,48	124,67
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	12,50	50,84	6,69
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	299,49	24,01	75,68
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	19,20	30,08	6,08
01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	81,53	25,91	22,24
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Ohoi yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Aktif	%	75	94,43	4,57	5,76
02.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	75	94,43	4,57	5,76
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang dapat menata administrasi pemerintahan desa secara baik	%	60	201.276,57	3,22	10.796,18
03.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		%	60	201.276,57	3,22	10.796,18
4	Program Penataan Desa		%	100	7,60	0,00	0,00
04.01	Penyelenggaraan Penataan Desa		%	100	7,60	0,00	0,00
5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		%	100	320,00	6,54	20,92
05.01	Penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		%	100	320,00	6,54	20,92
2,8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.228,73	41,57	975,29
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.726,23	41,94	762,05
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	217,24	70,47	161,15
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	151,34	17,02	27,11
01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	133,90	17,72	24,97
2	Program pengendalian penduduk	Persentase Ibu PUS peserta KB yang tertunda kehamilannya	%	90	60,00	0,00	0,00
02.01	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		%	90	60,00	0,00	0,00
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Sejahtera	%	80	3.553,60	13,80	613,20
03.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		%	80	1.077,50	8,19	110,25
03.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		%	80	694,80	11,51	100,00
03.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		%	80	628,05	12,74	100,00
03.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		%	80	1.153,25	21,02	302,95
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		%	100	1.615,90	39,41	636,90

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
04.01	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		%	100	1.615,90	39,41	636,90
5	Program Penelitian dan Pengembangan		%	100	75,00	0,00	0,00
05.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		%	100	75,00	0,00	0,00
2,9	PERHUBUNGAN						
	Dinas Perrhubungan						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.616,85	32,55	896,66
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	2.159,53	32,73	743,94
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	209,27	49,06	108,08
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	71,50	23,57	17,74
01.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	32,75	0,00	0,00
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	143,79	17,77	26,89
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat keselamatan transportasi laut	%	100	2.648,85	3,20	84,80
02.01	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		0	0	-	0,00	0,00
02.02	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		%	100	2.648,85	3,20	84,80
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Tingkat Keselamatan transportasi darat	%	100	6.601,45	0,11	7,50
03.01	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		%	100	6.601,45	0,11	7,50

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	Dinas Komunikasi dan Informatika						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.404,79	60,22	1.524,39
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.967,57	34,59	716,33
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	321,19	35,36	119,55
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	32,21	27,37	9,28
01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	83,80	39,93	35,22
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terpublikasi	%	100	809,52	31,82	257,56
02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		%	100	809,52	31,82	257,56
3	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD Melakukan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik	%	10	133,05	4,54	60,43
03.01	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		%	10	133,05	4,54	60,43
2.11	KOPERASI UKM						
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.153,01	33,15	751,19
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	44,78	94,98	44,77
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.648,03	24,19	419,72
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	293,07	63,63	196,28

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	82,09	49,87	43,09
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	85,02	52,86	47,31
2	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan UMKM yang meningkat Akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM	%	2,5	2.698,85	0,01	13,94
02.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		%	2,5	2.698,85	0,01	13,94
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	Unit	7	25,00	6,57	23,46
03.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Unit	7	25,00	6,57	23,46
4	Program Penilaian Kesehatan KSU/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang memiliki Omzet Tahunan	Unit	5	30,47	0,00	0,00
04.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Unit	5	30,47	0,00	0,00
5	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang memiliki SDM bersertifikasi kompetensi	Unit	10	294,40	2,33	68,50
05.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Unit	10	294,40	2,33	68,50
2,12	PENANAMAN MODAL						
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	3.443,55	35,68	1.293,50

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	2.772,62	39,19	1.143,82
01.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	95	60,87	0,00	0,00
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	207,81	29,84	65,27
01.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	200,96	0,00	0,00
01.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	111,30	36,30	42,53
01.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	53,34	47,86	26,87
01.07	Penataan Organisasi		%	95	36,63	38,90	15,00
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Investor	1	30,00	0,00	0,00
02.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Investor	1	30,00	0,00	0,00
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai Izin yang diberikan	%	100	607,77	42,07	255,70
03.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		%	100	607,77	42,07	255,70
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Nilai	80	90,00	10,67	12,00
04.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai	80	90,00	10,67	12,00
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		%	100	30,00	0,00	0,00
05.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		%	100	30,00	0,00	0,00
2,13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
	Dinas Pemuda dan Olahraga						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.093,88	36,27	799,46
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	8,50	39,12	3,50
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.536,48	40,21	650,41
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	240,12	33,22	83,97
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	122,92	0,00	0,00
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	102,00	32,78	35,19
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	83,85	29,89	26,38
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri	%	80	468,10	14,38	84,14
02.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		%	80	166,40	7,44	15,48
02.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	80	301,70	18,21	68,69
3	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah perolehan medali pada iven olahraga provinsi dan nasional	Jumlah	5	1.685,79	0,41	136,80
03.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah	5	25,00	4,40	22,00
03.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah	5	265,79	0,28	14,80

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
03.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah	5	1.395,00	0,36	100,00
4	Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan	Persentase pelaksanaan kegiatan kepramukaan	%	100	90,00	17,00	16,04
04.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kepramukaan		%	100	90,00	17,00	16,04
2,14	STATISTIK						
	Dinas Komunikasi dan Informatika						
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Sesuai Kebutuhan	%	85	19,78	0,00	0,00
01.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		%	85	19,78	0,00	0,00
2,15	PERSANDIAN						
	Dinas Komunikasi dan Informatika						
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah PD yang menggunakan Sandi untuk pengamanan data dan informasi	%	5	27,02	0,00	0,00
01.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		%	5	27,02	0,00	0,00
2,16	KEBUDAYAAN						
	Dinas Kebudayaan						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.243,81	41,98	991,55
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.694,17	1,54	661.08.00
01.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	95	82,26	94,35	81,70
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	254,39	35,59	95,30
01.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	99,75	95,00	99,75

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	80,40	40,16	33,99
01.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	32,83	57,03	19,71
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Perkembangan Kebudayaan	%	75	850,00	22,88	259,30
02.01	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	75	850,00	22,88	259,30
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Tingkat Pengembangan Kesenian Tradisional	%	75	175,20	64,92	151,66
03.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	75	175,20	64,92	151,66
4	Program Pelestraian dan pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya Lestari	%	75	1.350,00	26,67	480,00
04.01	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		%	75	1.350,00	26,67	480,00
5	Program Pembinaan Sejarah		%	100	434,09	10,33	44,85
05.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		%	100	434,09	10,33	44,85
2,17	PERPUSTAKAAN						
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah						
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Pemustaka	%	80	857,07	49,01	525,09
01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	80	792,07	52,13	516,16
01.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	80	65,00	10,98	8,92
2,18	KEARSIPAN						
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	1.923,27	38,31	775,61
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	9,17	95,00	9,17

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.482,52	29,49	460,28
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	209,67	66,27	146,26
01.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah		%	95	18,00	95,00	18,00
01.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	91,56	69,67	67,15
01.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	112,33	63,20	74,73
2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Daerah yang dikelola secara elektronik	%	65	29,15	65,00	29,15
02.01	Pengawasan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		%	65	29,15	65,00	29,15
III URUSAN PILIHAN							
3,5	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	Dinas Perikanan						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	4.221,04	35,13	1.561,09
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	3.388,55	38,83	1.385,17
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	501,56	21,89	115,58
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah		%	95	104,50	0,00	0,00
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	100,96	47,48	50,46
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	125,46	7,49	9,89
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap yang dihasilkan nelayan sasaran pemberdayaan	%	1,5	6.249,97	0,01	59,62

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
02.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		%	1,5	6.129,97	0,00	19,84
02.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	1,5	70,00	0,46	21,32
02.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		%	1,5	50,00	1,79	59,62
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya yang dihasilkan pembudidaya sasaran pemberdayaan	%	1,5	4.627,03	0,01	39,01
03.01	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		%	1,5	125,00	0,44	36,91
03.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		%	1,5	0,00	0,00	0,00
03.03	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		%	1,5	4.502,03	0,00	2,10
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan yan dihasilkan pelaku usaha pengolahan perikanan skala mikro	%	80	649,97	2,26	18,37
04.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		%	80	50,00	29,39	18,37
04.02	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		%	80	599,97	0,00	0,00
3,1	PARIWISATA						
	Dinas Pariwisata						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.364,97	32,86	817,91
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	5,00	0,00	0,00
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.962,80	28,94	597,88

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	218,00	72,47	166,29
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	138,29	34,23	49,83
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	40,87	9,07	3,90
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Rata-rata Lama Tinggal	Hari	5	4.998,77	0,18	175,24
02.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Hari	5	75,45	5,00	75,40
02.02	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Hari	5	4.923,32	0,10	99,84
3	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersertifikasi kompetensi Tingkat Dasar	%	2,5	1.151,02	0,07	32,06
03.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		%	2,5	1.043,52	0,04	15,86
03.02	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi Kreatif		%	2,5	589.06.00	0,00	0,00
3,2	PERTANIAN						
	Dinas Pertanian						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	6.372,50	40,47	2.714,70
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	0	0,00	0,00	0,00
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	5.666,28	39,44	2.352,22
01.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	95	103,65	40,01	43,65
01.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	343,08	61,07	220,55
01.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah		%	95	39,50	95,00	39,50
01.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	106,01	25,61	28,58

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	113,97	25,16	30,18
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	%	1,2	450,90	0,40	149,91
02.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		%	1,2	209,92	0,99	172,76
02.02	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota lain		%	1,2	240,98	0,78	155,67
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luasan Lahan Pertanian Produktif	Ha	2,5	6.520,32	1,14	2.976,25
03.01	Pembangunan Prasarana Pertanian		Ha	2,5	6.520,32	1,14	2.976,25
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luasan Lahan pertanian terserang bencana hamateratasi	%	100	455,15	92,97	423,15
04.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		%	100	455,15	92,97	423,15
5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan yang meningkat produksi pertaniannya	%	10	140,00	1,44	20,17
05.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		%	10	140,00	1,44	20,17
3,3	PERDAGANGAN						
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	558,56	51,32	301,75
01.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	320,11	57,12	192,48
01.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah		%	95	11,00	0,00	0,00
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	111,80	28,20	33,19

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	115,65	62,49	76,07
2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		%	100	130,00	20,21	26,27
02.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		%	100	130,00	20,21	26,27
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Angka Kasus Laporan Konsumen	<	10	65,00	4,79	31,13
03.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		<	10	65,00	4,79	31,13
4	Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Tingkat Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	80	386,10	55,04	265,62
04.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	80	48,20	4,07	2,45
04.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		%	80	337,90	62,31	263,17
3,4	PERINDUSTRIAN						
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan						
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Unit Usaha Industri	Unit	110	2.790,29	7,88	200,00
01.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota		Unit	110	2.790,29	7,88	200,00
2	Program perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Rekomendasi Penerbitan Izin dan TDP	%	100	16,79	0,00	0,00
02.01	Penerbitan Surat keterangan asal (bagi daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)		%	100	16,79	0,00	0,00
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	Persentase Data terinput pada SIINAS	%	100	20,00	100,00	20,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
03.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		%	100	20,00	100,00	20,00
4	Program Hubungan Industrial		%	100	68,10	3,30	2,25
04.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		%	100	25,60	0,00	0,00
04.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		%	100	42,50	5,29	2,25
IV URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
4,1	PERENCANAAN						
	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	4.343,71	59,06	2.700,44
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	34,79	94,34	34,55
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	3.108,65	40,26	1.317,53
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	565,00	38,66	229,94
01.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah		%	95	292,25	0,00	0,00
01.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	220,80	33,41	77,66
01.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	122,21	27,39	35,24
2	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	100	2.025,00	30,98	627,33

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		%	100	1.680,86	30,55	513,43
02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		%	100	33,09	9,52	3,15
02.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		%	100	311,05	35,60	110,74
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran PD	%	80	999,99	22,99	287,33
		Tingkat Capaian Kinerja Program Prioritas PD	%	80			
03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		%	80	375,00	18,58	87,10
03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		%	80	350,00	28,29	123,79
03.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		%	80	274,99	22,23	76,43
4,2	KEUANGAN						
	Badan Keuangan dan Aset Daerah						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	4.354,62	44,10	2.021,50
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	2.808,81	39,21	1.159,43
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	812,87	68,66	587,45
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	160,00	0,00	0,00
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	502,93	47,75	252,80
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	69,99	29,59	21,80

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Penyampaian LKPD ke BPK Tepat Waktu	%	100	8.529,40	15,20	1.296,82
		Tingkat Penyampaian KUAPPAS dan RAPBD ke DPRD Tepat Waktu	%	100			
02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		%	100	2.248,35	12,37	278,20
02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		%	100	230,00	16,77	38,56
02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		%	100	863,60	61,51	531,16
02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		%	100	5.184,44	8,66	448,88
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD terkeloa sesuai standar Pengelolaan BMD	%	70	940,00	4,76	63,86
03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		%	70	940,00	4,76	63,86
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		%	100	322,55	0,00	0,00
04.01	Penelitian dan Pengembanagn Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		%	100	322,55	0,00	0,00
	Badan Pendapatan Daerah						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	3.963,36	40,34	1.682,99
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	3.072,74	38,02	1.229,61
01.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	95	78,83	91,61	76,02
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	433,01	41,30	188,25
01.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	93,75	0,71	0,70
01.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	196,80	37,92	78,55

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	88,72	17,97	16,78
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	3	1.676,90	1,13	632,43
02.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		%	3	1.676,90	1,13	632,43
4,3	KEPEGAWAIAN						
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	15.945,87	25,94	4.354,57
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	15.018,65	26,27	4.152,63
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	365,93	33,30	128,25
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	216,50	0,00	0,00
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	113,75	28,62	34,27
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	74,71	16,86	13,26
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%	90	1.892,10	26,74	562,22
02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		%	90	454,12	23,08	116,46
02.02	Mutasi dan Promosi ASN		%	90	561,93	23,62	147,49
02.03	Pengembangan Kompetensi ASN		%	90	482,94	38,27	205,35
02.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		%	90	393,10	21,27	92,91
4,4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah PD Sangat Inovatif dan Inovatif	Perangkat Daerah	5	1.075,00	0,42	90,81
01.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Perangkat Daerah	5	33,83	0,02	0,14
01.02	Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Perangkat Daerah	5	20,38	0,00	0
01.03	Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Perangkat Daerah	5	825,00	0,37	60,76
01.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Perangkat Daerah	5	195,77	0,76	29,9
V							
URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA							
5,1	PENGAWASAN						
	Inspektorat						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	5.069,66	32,03	1.709,04
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	95	27,90	0,00	0,00
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	2.779,47	34,35	1.004,91
01.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	95	711,24	34,06	255,00
01.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	1.076,52	35,99	407,84
01.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah		%	95	156,23	0,00	0,00
01.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	135,81	11,61	16,60
01.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	182,47	12,85	24,68

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	%	80	1.393,99	23,04	401,40
02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		%	80	1.101,84	29,14	401,40
02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		%	80	292,15	0,00	0,00
3	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan daerah yang direviu APIP	%	100	422,24	0,00	0,00
03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		%	100	83,69	0,00	0,00
03.02	Pendampingan dan Asistensi		%	100	338,55	0,00	0,00
5,2	SEKRETARIAT DPRD						
	Sekretariat DPRD						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	24.217,31	33,16	8.453,12
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	3.041,69	39,01	1.249,17
01.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	95	348,77	0,00	0,00
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	650,50	3,82	26,19
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	829,00	28,76	250,97
01.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	148,50	0,00	0,00
01.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	331,08	9,93	34,61
01.07	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		%	95	15.715,62	36,58	6.051,11
01.08	Layanan Administrasi DPRD		%	95	3.152,13	25,35	841,04

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRDterfasilitasi	%	80	11.513,40	47,31	6809,17
02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		%	80	852,86	47,47	506,07
02.02	Peningkatan Kapasitas DPRD		%	80	5.602,85	23,53	1648,14
02.03	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		%	80	5.057,67	73,63	4654,95
5,3	SEKRETARIAT DAERAH						
	Sekreariat Daerah						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	16.337,25	49,83	8.569,52
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	8.374,91	46,34	4.085,21
01.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	95	34,75	95,00	34,75
01.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	3.903,36	51,67	2.123,09
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	2.866,64	54,04	1.630,67
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	297,35	53,88	168,63
01.06	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		%	95	412,28	58,11	252,18
01.07	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		%	95	447,93	37,11	174,97
	Bagian Umum		%				
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	3.265,53	52,43	1.802,13
01.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	314,65	34,79	115,22
01.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	95	1.019,15	77,55	831,97

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	393,50	55,53	230,00
01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	260,29	32,68	89,53
01.05	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		%	95	1.278,93	39,77	535,40
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		%				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang keprotokoleran dan hubmas	%	100	832,42	67,11	558,60
01.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	42,58	47,67	20,30
01.02	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		%	100	789,83	68,15	538,30
	Bagian Organisasi		%				
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan	%	100	500,00	27,92	139,60
01.01	Penataan Organisasi		%	100	500,00	27,92	139,60
	Bagian Hukum		%				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kepala daerah bidang hukum	%	100	1.000,00	44,93	449,28
01.01	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		%	100	1.000,00	44,93	449,28
	Bagian Kesejahteraan Rakyat		%				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakanb idang kesejahteraan rakyat	%	100	16.412,13	29,78	4.887,35
01.01	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		%	100	16.412,13	29,78	4.887,35
	Bagian Pemerintahan		%				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan	%	100	695,00	69,35	481,95

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.01	Administrasi Tata Pemerintahan		%	100	695,00	69,35	481,95
	Bagian Perekonomian dan SDA		%				
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA	%	100	600,00	40,35	242,10
01.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		%	100	450,00	29,08	130,84
	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam		%	100	150,00	74,17	111,26
	Bagian Administrasi Pembangunan		%				
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pembangunan	%	100	499,99	70,64	353,21
01.01	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		%	100	499,99	70,64	353,21
	Bagiaan Pengadaan Barang dan jasa		%				
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penyediaan barang dan jasa tepat waktu	%	100	750,00	33,11	248,34
01.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		%	100	750,00	33,11	248,34
5,4	KECAMATAN						
	Kecamatan Kei Kecil						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.074,68	20,36	444,72
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.669,05	22,42	393,86
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	162,69	8,99	15,40
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	62,50	0,00	0,00
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	101,42	21,87	23,35
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	79,01	14,55	12,10

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Kei Kecil	Nilai	80	64,99	54,78	44,50
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai	80	64,99	54,78	44,50
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	244,14	3,09	10,78
03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	70	44,14	17,10	10,78
03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		%	70	200,00	0,00	0,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	20,00	16,50	3,30
04.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		%	100	20,00	16,50	3,30
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	%	100	55,22	5,98	3,30
05.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		%	100	55,22	5,98	3,30
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	75,00	31,60	23,70
06.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		%	100	75,00	31,60	23,70
	Kecamatan Kei Kecil Timur						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	1.257,13	28,30	374,49
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	981,60	35,20	363,67

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	145,25	7,08	10,82
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	77,25	0,00	0,00
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	34,27	0,00	0,00
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	18,74	0,00	0,00
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	80	53,93	52,07	35,10
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai	80	53,93	52,07	35,10
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	45,85	18,03	11,81
03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	70	45,85	18,03	11,81
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	39,73	33,48	13,30
04.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		%	100	39,73	33,48	13,30
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	34,69	0,00	0,00
05.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		%	100	34,69	0,00	0,00
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	50,25	17,85	8,97
06.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		%	100	50,25	17,85	8,97

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	853,09	29,98	269,21
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	558,85	22,00	129,39
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	147,33	23,41	36,30
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	71,50	95,00	71,50
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	63,02	36,78	24,40
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	12,38	58,40	7,61
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	80	69,79	57,48	50,14
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai	80	69,79	57,48	50,14
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	34,43	0,00	0,00
03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	70	34,43	0,00	0,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	25,70	63,62	16,35
04.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		%	100	25,70	63,62	16,35
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	38,00	86,58	32,90

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
05.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		%	100	38,00	86,58	32,90
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	37,83	99,47	37,63
06.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		%	100	37,83	99,47	37,63
Kecamatan Kei Kecil Barat							
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	223,02	60,52	142,08
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	961,20	34,24	329,15
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	88,60	72,55	64,28
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	79,95	93,00	74,35
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	38,98	0,00	0,00
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	15,48	22,29	3,45
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	80	65,99	73,71	60,80
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai	80	65,99	73,71	60,80
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	43,00	44,44	27,30
03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	70	43,00	44,44	27,30
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	15,00	77,00	11,55
04.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		%	100	15,00	77,00	11,55

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	61,00	77,70	47,40
05.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		%	100	61,00	77,70	47,40
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	30,00	89,00	26,70
06.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		%	100	30,00	89,00	26,70
	Kecamatan Hoat Sorbay						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	1.066,81	37,22	417,95
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	909,26	34,45	329,76
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	107,03	56,53	63,69
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	10,00	95,00	10,00
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	40,51	34,00	14,50
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	80	70,45	79,45	58,92
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai	80	60,64	80,87	51,62
02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Nilai	80	9,81	70,69	7,30
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	50,00	0,00	0,00
03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	70	50,00	0,00	0,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	50,00	0,00	0,00
04.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		%	100	50,00	0,00	0,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	62,00	31,72	20,70
05.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		%	100	62,00	31,72	20,70
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	70,00	12,83	9,45
06.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		%	100	70,00	12,83	9,45
	Kecamatan Manyeuw						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	1.153,24	27,03	328,10
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	929,77	30,30	281,71
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	101,99	22,49	22,94
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	43,12	0,00	0,00
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	36,00	20,56	7,40
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	42,35	37,85	16,03
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	80	80,00	22,90	22,90

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai	80	80,00	22,90	22,90
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	55,00	12,74	10,01
03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	70	55,00	12,74	10,01
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	20,00	5,25	1,05
04.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		%	100	20,00	5,25	1,05
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	46,52	11,82	5,50
05.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		%	100	46,52	11,82	5,50
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	35,00	21,00	7,35
06.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		%	100	35,00	21,00	7,35
	Kecamatan Kei Besar						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	1.305,81	2,60	35,79
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.021,51	0,51	5,26
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	136,50	14,73	20,11
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	52,48	5,72	3,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	95,30	7,79	7,42
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	80	275,27	16,91	58,20
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai	80	116,44	2,89	4,20
02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Nilai	80	158,83	27,20	54,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	90,45	0,00	0,00
03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	70	90,45	0,00	0,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	0,00	0,00	0,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu	%	100	0,00	0,00	0,00
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	125,00	0,00	0,00
06.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		%	100	125,00	0,00	0,00
7	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan Sampah kota Elat	%	100	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kei Besar Selatan							
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	1.433,41	28,94	436,71
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.064,91	22,11	247,81
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	220,06	38,23	88,55

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	82,50	95,00	82,50
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	11,50	56,59	6,85
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	54,43	19,20	11,00
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	80	71,00	76,14	67,57
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai	80	71,00	76,14	67,57
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	60,00	24,06	20,62
03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	70	60,00	24,06	20,62
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	25,00	56,68	14,17
04.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		%	100	25,00	56,68	14,17
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	105,00	55,73	58,52
05.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		%	100	105,00	55,73	58,52
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	89,00	60,34	53,70
06.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		%	100	89,00	60,34	53,70

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	868,03	16,63	151,92
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	647,03	16,38	111,57
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	154,90	18,31	29,85
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	58,31	17,11	10,50
01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	7,79	0,00	0,00
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	80	197,23	0,00	0,00
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai	80	95,25	0,00	0,00
02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Nilai	80	101,98	0,00	0,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	110,00	0,00	0,00
03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	70	110,00	0,00	0,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	34,36	0,00	0,00
04.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		%	100	34,36	0,00	0,00
5	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	125,00	56,84	71,05
05.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		%	100	125,00	56,84	71,05

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
	Kecamatan Kei Besar Utara Timur						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	1.236,82	18,71	243,62
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	956,82	15,63	157,47
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	210,36	36,19	80,14
01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	16,79	0,00	0,00
01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	52,84	10,79	6,00
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	80	110,00	80,00	110,00
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai	80	110,00	80,00	110,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	70	70,00	0,00	0,00
03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	70	70,00	0,00	0,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	40,00	11,25	4,50
04.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		%	100	40,00	11,25	4,50
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	100,00	15,90	15,90
05.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		%	100	100,00	15,90	15,90
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	150,00	35,63	53,45

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
06.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		%	100	150,00	35,63	53,45
	Kecamatan Kei Besar Utara Barat						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	1.185,42	18,64	232,54
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	956,60	11,16	112,37
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	129,20	39,64	53,91
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	12,50	95,00	12,50
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	6,00	39,58	2,50
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	81,11	60,03	51,25
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai survey pelayanan publik di kecamatan	Nilai	75	157,64	43,02	90,43
02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Nilai	80	87,78	47,32	51,92
02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Nilai	80	69,86	44,09	38,50
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Berkembang	%	50	110,00	25,15	55,32
03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	50	110,00	25,15	55,32
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik	%	100	0	0,00	0,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu	%	100	118,88	33,65	40,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
05.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		%	100	118,88	33,65	40,00
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan	%	100	160,35	24,42	39,15
06.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		%	100	160,35	24,42	39,15
5,5	WILAYAH PERBATASAN						
	Badan Perbatasan Daerah						
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran	%	95	2.106,56	39,70	880,39
01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	95	1.713,06	38,62	696,47
01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	95	264,61	54,59	152,04
01.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	6,87	95,00	6,87
01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	80,00	17,81	15,00
01.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	95	42,00	22,62	10,00
2	Program pengelolaan perbatasan	Pertumbuhan Pembangunan wilayah perbatasan	%	85	285,21	24,57	82,45
02.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama		%	85	70,00	45,06	37,11
02.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan		%	85	160,30	24,04	45,34
02.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan		%		54,91	0,00	0,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan berdasarkan anggaran kas					
Faktor penghambat pencapaian kinerja		1. Keterlambatan lelang, sebagian besar Belanja Modal baru memulai proses pelelangan pada periode Bulan April dan Mei tahun 2024, sehingga realisasi fisik mengalami keterlambatan dan sekaligus mempengaruhi realisasi anggaran;					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	2	3	4	5		6	
		2. Masih rendahnya pemahaman sumber daya manusia di Pemda dalam penerapan regulasi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah; 3. Penjadwalan kegiatan atau sub kegiatan pada Perangkat Daerah (PD) kurang tepat, mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran kas Pemda dan Surat Penyediaan Dana (SPD); 4. Dokumen perencanaan kegiatan fisik belum lengkap, sehingga proses fisik masih harus menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau <i>Detail Engineering Design</i> (DED). Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan kontraktual belum dapat dilaksanakan termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).					
	Tindak lanjut yang diperlukan	1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan pada rencana anggaran kas; 2. Pelaksanaan pembangunan melalui pelelangan perlu dikoordinasikan secara optimal sehingga pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan meminimalisir hambatan dalam proses sampai dengan penyelesaian pekerjaan.					

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara
Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Realisasi Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (Rp. Juta)
1	Dinas Pendidikan	2,65	2184,13
2	Dinas Kesehatan	18,38	6188,64
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16,76	1921,71
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	30,82	202,89
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39,10	6620,90
6	Satuan Polisi Pamong Praja	25,14	671,19
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30,99	639,60
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	23,87	147,95
9	Dinas Sosial Daerah	22,34	265,55
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	26,06	149,01
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak	12,98	1295,19
12	Dinas Ketahanan Pangan	31,61	89,91
13	Dinas Lingkungan Hidup	13,47	539,26
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44,65	437,96
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	18,96	445,08
16	Dinas Perhubungan	11,96	329,65
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	22,85	321,89
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8,41	171,42
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17,68	312,24

No	Perangkat Daerah	Realisasi Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (Rp. Juta)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	17,01	259,11
21	Dinas Kebudayaan	33,36	385,47
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	38,08	332,46
23	Dinas Perikanan	9,36	419,52
24	Dinas Pariwisata	11,03	341,74
25	Dinas Pertanian	27,28	1256,84
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	28,36	926,48
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	16,02	340,17
28	Badan Pendapatan Daerah	20,74	1157,71
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26,34	2458,40
30	Inspektorat	7,68	133,80
31 32	Sekretariat DPRD	40,24	7631,15
33	Sekretariat Daerah	47,14	1634,58
34	Kecamatan Kei Kecil	22,05	88,38
35	Kecamatan Kei Kecil Timur	24,95	73,95
36	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	56,19	67,71
37	Kecamatan Kei Kecil Barat	70,40	52,64
38	Kecamatan Hoat Sorbay	26,87	84,50
39	Kecamatan Manyeuw	16,79	62,49
40	Kecamatan Kei Besar	3,25	15,67
41	Kecamatan Kei Besar Selatan	50,31	108,55
42	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat	14,69	44,59

No	Perangkat Daerah	Realisasi Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (Rp. Juta)
43	Kecamatan Kei Besar Utara Tlmur	26,92	71,25
44	Kecamatan Kei Besar Utara Barat	24,14	76,24
45	Badan Perbatasan Daerah	32,14	481,42

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Tahun 2024

Tren perkembangan ekonomi global, nasional dan termasuk di daerah menunjukkan pergerakan yang positif dalam semester pertama tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2024 mampu tumbuh sebesar 5,11 persen, Inflasi terkendali di bawah 3,5 persen, dan tingkat pengangguran yang mampu ditekan menjadi 4,82 persen.

Meskipun demikian, kondisi lingkungan global yang masih cukup tertekan akibat dari ketegangan dan tensi geopolitik, memicu pertumbuhan global yang sangat lemah, lambat, serta dengan tingkat risiko ketidakpastian yang cenderung semakin meningkat.

Di lingkup Nasional, pergerakan positif perekonomian berdampak positif bagi ekonomi di daerah. Meskipun beberapa tantangan perekonomian masih perlu diantisipasi, yaitu: pertumbuhan yang cenderung melambat, deindustrialisasi, serta tantangan di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana (infrastruktur) serta birokrasi dan regulasi.

Di samping itu, pengaruh perubahan iklim juga memberikan dampak bagi produksi dan produktivitas yang cenderung menurun, serta kejadian bencana yang masih terjadi antara lain kekeringan, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan. Upaya strategis yang perlu didorong guna mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi salah satunya adalah otomatisasi, transaksi digital serta peningkatan SDM guna memberi dampak kepada *labor market*.

3.1.1. Dinamika Lingkungan Strategis Global

3.1.1.1. Kondisi Perekonomian Global

Situasi ekonomi global masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat. Risiko resesi global berangsur mereda, sedangkan tingkat inflasi yang sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022, saat ini telah berangsur turun. Di sisi lain, peningkatan ketegangan geopolitik menjadi salah satu sumber risiko utama bagi ekonomi dunia.

Fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme dapat menekan laju perdagangan dan investasi global, serta berpotensi menghambat progres pengendalian inflasi global. Sementara itu, tantangan juga muncul dari perubahan iklim, perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI/digitalisasi), serta penuaan populasi di negara-negara maju (*ageing population*).

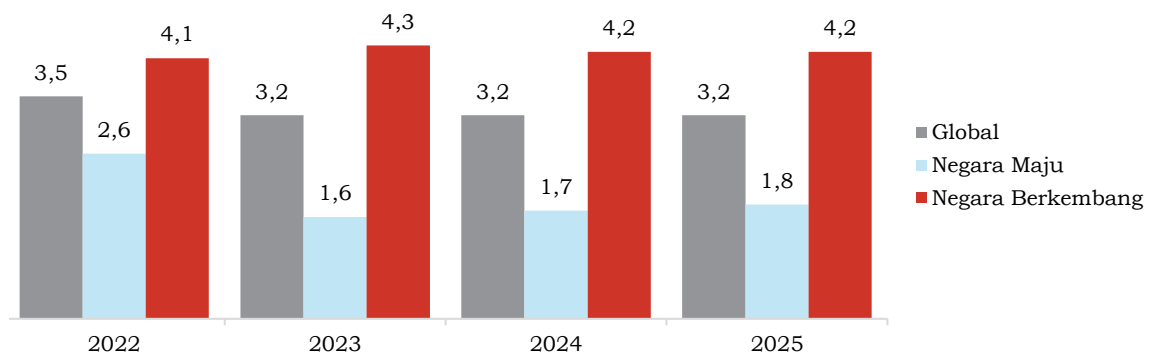
Negara-negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup beragam sepanjang tahun 2023. Negara-negara berkembang di wilayah Asia seperti India, Filipina, Tiongkok, Vietnam dan Indonesia menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global dengan tingkat pertumbuhan di atas 5 persen.

Sementara itu, negara-negara di Zona Eropa tumbuh sangat lemah (di bawah 1 persen), sedangkan beberapa negara maju di Asia seperti Jepang dan Singapura tumbuh terbatas (di bawah 2 persen).

Di tengah pengetatan moneter yang agresif, perekonomian AS menunjukkan resiliensi dengan tumbuh cukup tinggi (2,5 persen), ditopang oleh konsumsi dan juga investasi.

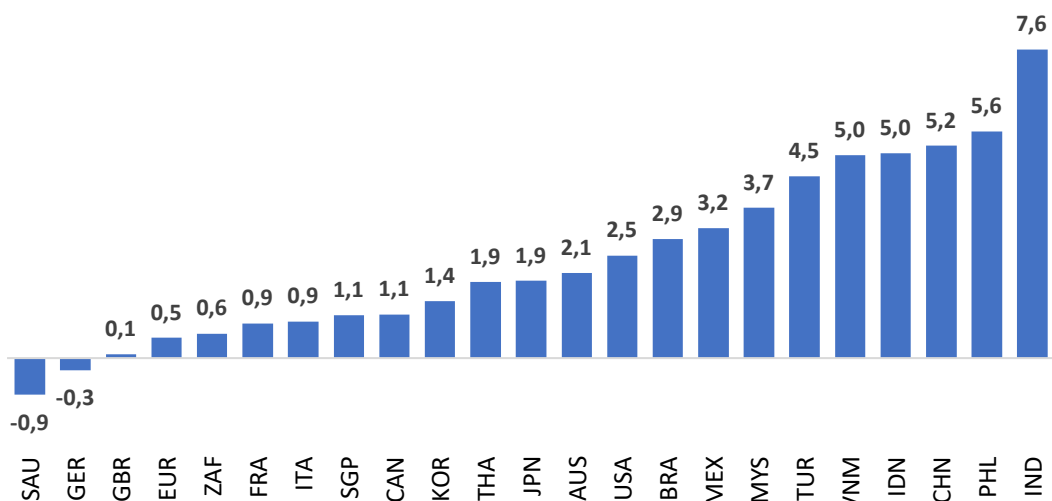
Hal yang berpengaruh adalah faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Global, Negara Maju dan Negara Berkembang



Dalam konteks ekonomi global, gambaran perekonomian diukur dari tingkat perekonomian negara-negara dengan ekonomi terbesar. Gambaran pertumbuhan ekonomi negara-negara dengan ekonomi terbesar tahun 2023 sebagai berikut.

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Negara–Negara dengan Ekonomi Terbesar Tahun 2023

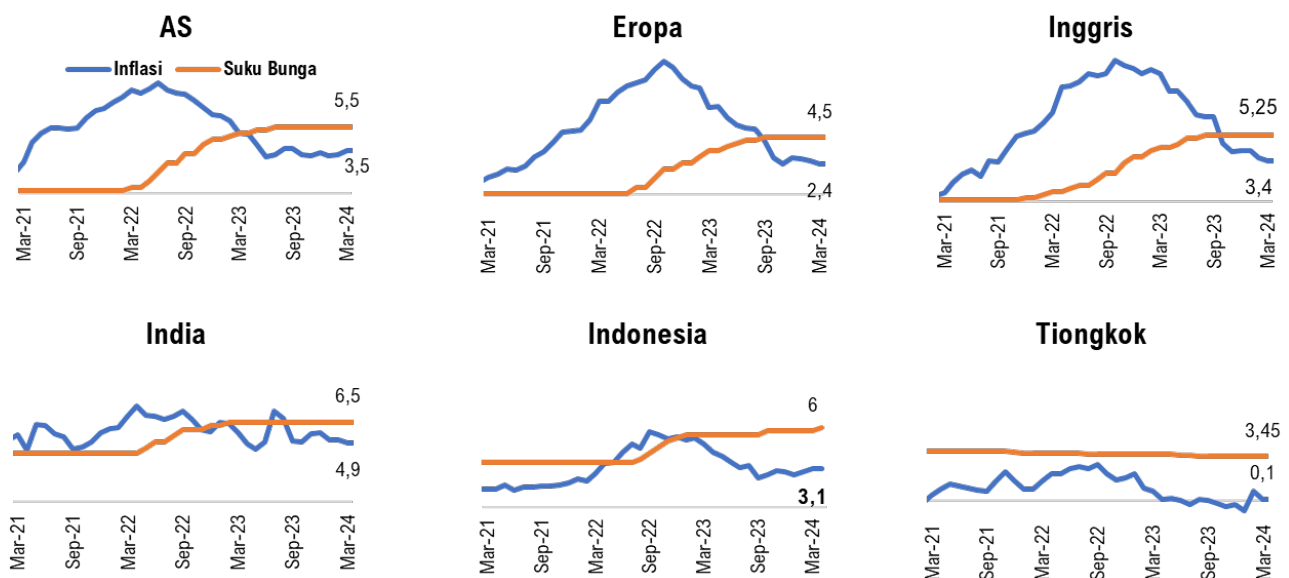


Sepanjang tahun 2023, harga komoditas energi seperti minyak mentah, batu bara dan gas alam mengalami penurunan. Sementara itu, sampai dengan akhir April 2024 harga minyak masih meningkat, dipicu oleh pengumuman perpanjangan pengurangan produksi oleh negara OPEC+

hingga Juni 2024 serta kerentanan rantai pasok akibat tensi geopolitik. Tidak berbeda dari komoditas energi, harga beberapa komoditas pangan seperti kedelai dan gandum mengalami penurunan sepanjang tahun 2023.

Sementara itu, harga beras global sempat melonjak sejak Oktober 2023, dipicu oleh fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang. Hal tersebut memicu penurunan hasil panen, sehingga mendorong negara pengekspor utama beras, seperti India, melakukan pelarangan ekspor yang selanjutnya memicu lonjakan harga beras global.

Gambar 3.3
Inflasi dan Suku Bunga Tahun 2021 s.d 2024 (TW.1)



3.1.1.2. Prospek Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. *World Bank* memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami *rebound* ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025.

Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta *scaring effect* pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2024, IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 (lima) tahun mendatang hanya sebesar 3,1 persen, yang merupakan titik terendah dalam beberapa dekade.

Meski relatif membaik dibanding setahun yang lalu, perekonomian global masih dibayangi berbagai ketidakpastian. Dalam *WEO Updates* Januari 2024, IMF menyebutkan beberapa faktor yang menjadi risiko utama bagi perkembangan ekonomi global, meliputi peningkatan tensi geopolitik, suku bunga global yang bertahan tinggi (*high for longer*), pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, serta volatilitas pasar keuangan dan risiko *debt distress*. Selain itu, volatilitas harga

komoditas akibat faktor perubahan iklim dan geopolitik, serta fragmentasi yang semakin meluas juga berisiko menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global.

Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global juga dipicu oleh faktor demografi yang kurang menguntungkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan atau *dependency ratio* secara umum di berbagai negara akan terus meningkat akibat dari fenomena populasi yang menua (*ageing population*).

Beberapa negara maju, seperti negara-negara Eropa dan Jepang saat ini memiliki *dependency ratio* lebih dari 50 persen. Dalam kondisi dimana angka kelahiran menunjukkan tren yang terus menurun, fenomena tersebut dapat memicu prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah karena turunnya permintaan global.

Penurunan angka kelahiran dan *ageing population* dapat memicu pengurangan angkatan kerja yang dapat menurunkan produktivitas suatu negara. *Ageing population* juga meningkatkan kebutuhan belanja untuk menjamin ketersediaan dana pensiun, fasilitas kesehatan yang memadai, serta jaring pengaman sosial.

3.1.1.3. Risiko Global

Dalam 20 tahun terakhir, perekonomian global diwarnai berbagai gejolak. Pada tahun 2009, perekonomian global mengalami ancaman dari krisis keuangan global 2009 yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa, dan dampaknya menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 2020, dunia kembali dilanda guncangan yang berasal dari pandemi Covid-19, yang memicu syok tidak hanya pada aspek kesehatan, melainkan juga aspek sosial ekonomi masyarakat. Pasca pandemi 2022, gejolak perekonomian global bersumber dari lonjakan inflasi akibat gangguan rantai pasok dan perang di Ukraina. Berbagai situasi berbeda ini menggarisbawahi pentingnya identifikasi risiko perekonomian global, yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam mitigasi risiko.

Peningkatan tensi geopolitik masih menjadi sumber risiko utama bagi ekonomi global. Perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang saat ini masih berlangsung telah meningkatkan ketegangan hubungan internasional dan kerentanan rantai pasok global, serta mengganggu sentimen bisnis dan kepercayaan konsumen.

Eskalasi konflik di Timur Tengah dan Ukraina dapat menyebabkan disrupsi rantai pasok yang memicu kenaikan biaya pengiriman global yang selanjutnya dapat memicu lonjakan harga komoditas dan menghambat progres pengendalian inflasi global.

Disrupsi rantai pasok menimbulkan dampak ke berbagai negara secara disproportional, di mana negara-negara berpenghasilan rendah merasakan dampak yang lebih parah karena sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Peningkatan ketegangan geopolitik juga memicu fragmentasi geoekonomi, yang menghambat prospek perdagangan dan investasi global.

Peningkatan ketegangan geopolitik dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong negara-negara merekonfigurasi rantai pasoknya serta memicu tren *on-shoring* (merelokasi industri ke wilayah domestik) dan *friend-shoring* (merelokasi industri ke wilayah negara sekutu). Dalam beberapa tahun terakhir, juga terjadi peningkatan tren kebijakan proteksionisme di berbagai negara.

Data dari *Global Trade Alert* menunjukkan bahwa pembatasan perdagangan antar negara sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat. Selain itu, fenomena tekno-nasionalisme, yaitu keterkaitan antara isu teknologi, ekonomi, dan keamanan nasional, juga semakin meningkat dan turut membentuk lanskap ekonomi global. Persaingan teknologi antara negara-negara besar, terutama AS dan Tiongkok, misalnya, termanifestasi pada kebijakan pengendalian ekspor dan pembatasan transfer teknologi, yang berisiko menghambat inovasi dan mengancam prospek pertumbuhan ekonomi global dalam jangka panjang.

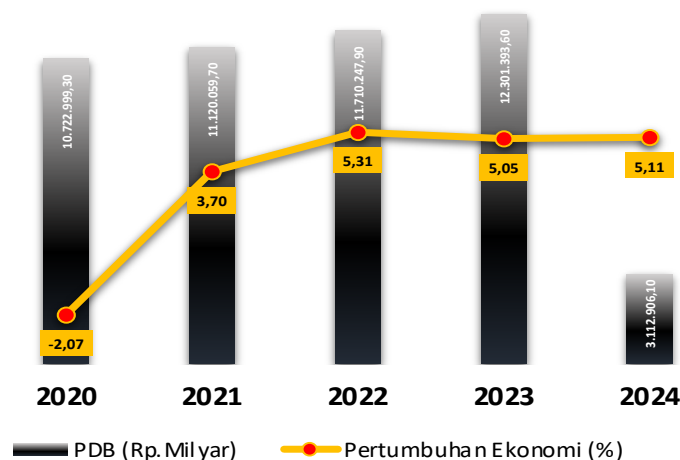
Beberapa faktor lain yang memberi dampak pada naiknya risiko ekonomi global antara lain: 1) terhambatnya progres pengendalian inflasi global; 2) berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok juga berisiko membawa dampak rambatan ke negara mitra dagang utama, 3) perubahan iklim juga menjadi risiko signifikan yang memengaruhi perkembangan ekonomi global. *Global Risk Report* tahun 2024 yang dirilis oleh *World Economic Forum* telah mengidentifikasi fenomena cuaca ekstrem, sebagai risiko lingkungan yang paling kritis dan mendesak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3.1.2. Dinamika Lingkungan Strategis Ekonomi Nasional

Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia konsisten tumbuh. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian.

Gambar 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020-2024



Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan

berlanjut hingga tahun 2024, di mana sampai dengan triwulan I, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,11 persen.

3.1.2.1. Sektor Riil

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat, seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh kuat pascapandemi. Setelah mengalami kontraksi sebesar 2,6 persen pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga konsisten tumbuh dengan tren meningkat dan mencapai 4,8 persen pada tahun 2023.

Pertumbuhan positif ini tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui pengendalian inflasi untuk meredam gejolak harga. Untuk menjaga daya beli kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan bantuan sosial. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih kuat pada tahun 2024, seiring dengan inflasi yang terkendali.

Dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh positif. Sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan merupakan kontributor terbesar PDB.

Kinerja semua sektor telah kembali ke level prapandemi, termasuk sektor yang pada waktu pandemi paling terpuak, seperti sektor transportasi, akomodasi dan makan minum. Bahkan, Sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, serta akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023.

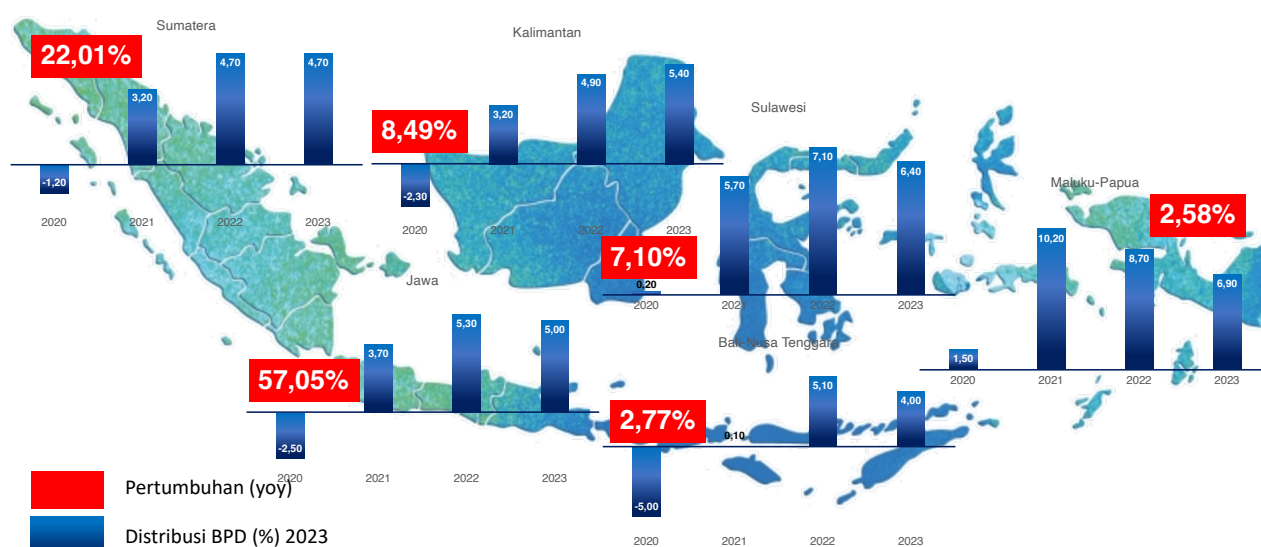
Hal ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, penyelenggaraan *event* internasional, peningkatan jumlah wisatawan, dan persiapan pesta demokrasi yang diselenggarakan pada tahun 2024. Peningkatan daya saing produk hilirisasi SDA juga turut menopang pemulihan perekonomian dari sisi sektoral.

3.1.2.2. Ekonomi Kewilayahan

Secara kewilayahan ekonomi tumbuh positif dengan pemerataan antardaerah yang membaik. Meskipun wilayah Jawa dan Sumatera masih mendominasi PDB Nasional dengan kontribusi sebesar 57 persen dan 22 persen, namun Kawasan Indonesia Timur (KIT) berhasil mencapai pertumbuhan lebih tinggi, menandai membaiknya proses konvergensi antardaerah (Grafik 7). Pada tahun 2023, wilayah KIT tumbuh rata-rata sebesar 5,6 hingga 6,1 persen. Hal tersebut didukung oleh kebijakan hilirisasi SDA yang mampu mendorong beberapa wilayah KIT tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan peningkatan kontribusi KIT, ketimpangan ekonomi regional diekspektasikan membaik. Secara

keseluruhan, prospek ekonomi nasional diperkirakan masih kuat di tengah stagnasi perekonomian global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan mencapai 5,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2024, terutama terkait dengan kinerja ekspor yang diperkirakan masih relatif lemah sejalan dengan moderasi harga komoditas serta masih tertahannya permintaan global. Prospek pertumbuhan tahun 2024 ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan legislatif pada triwulan I tahun 2024 serta Pilkada serentak pada triwulan IV tahun 2024. Investasi juga diperkirakan menguat sejalan dengan penyelesaian target PSN pembangunan infrastruktur. Selain itu, daya beli masyarakat juga diperkirakan terus terjaga didukung oleh inflasi yang stabil.

Gambar 3.5
Pertumbuhan dan Distribusi PDB menurut Regional Tahun 2024



3.1.2.3. Inflasi

Laju inflasi domestik relatif terkendali. Setelah meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 (5,5 persen), inflasi pada tahun 2023 kembali turun dalam rentang sasaran inflasi, yakni di level 2,6 persen.

Tingginya inflasi pada tahun 2022 dipengaruhi oleh tekanan harga minyak mentah dunia sehingga Pemerintah perlu menempuh kebijakan penyesuaian harga energi. Namun, seiring dengan upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh, inflasi masih dapat terjaga dan dampak rambatan kebijakan terbatas sehingga inflasi tahun 2023 dapat kembali mencapai rentang sasaran. Di tahun 2023, inflasi komponen Inti dan Harga Diatur Pemerintah (*administered price/AP*) relatif terkendali, sementara inflasi pangan (*volatile food*) mengalami tekanan akibat fenomena El Nino yang menyebabkan penurunan produksi pangan, baik secara domestik maupun global.

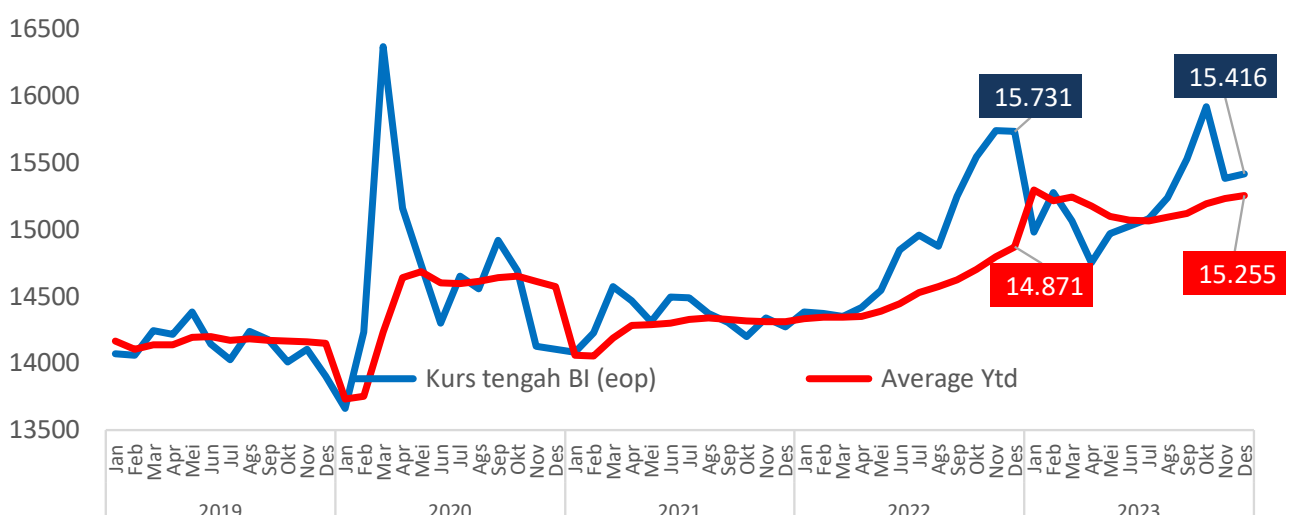
Laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada pada rentang sasaran yang ditetapkan. Meskipun inflasi diperkirakan tetap terjaga, namun terdapat beberapa risiko yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi, seperti eskalasi tensi geopolitik, disrupsi rantai pasok global, dan dampak perubahan iklim pada produksi pangan dan distribusi.

Oleh karena itu diperlukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tahun 2024 pada rentang sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen. Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilakukan guna menciptakan bauran kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Koordinasi terus diperkuat dalam memitigasi risiko gangguan pasokan dan menjaga kelancaran distribusi. Seluruh upaya tersebut didukung oleh strategi komunikasi publik yang terarah dan terencana agar dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat.

3.1.2.4. Nilai Tukar Rupiah

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga seiring dengan mulai menurunnya tekanan pada pasar keuangan global. Pada 2023, mulai menurunnya tingkat inflasi dan perbaikan indikator ekonomi di banyak negara semakin mendorong sentimen positif pasar global. Kondisi tersebut mendorong perbaikan pada pasar keuangan yang ditandai dengan capital inflow ke sebagian negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah, mengalami apresiasi. Sepanjang 2023, tingkat apresiasi nilai tukar Rupiah termasuk yang relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. Beberapa tantangan eksternal masih menjadi faktor risiko yang perlu diwaspadai pengaruhnya terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2024. Memasuki akhir triwulan I 2024, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan didukung kebijakan moneter yang berhati-hati, rata-rata nilai tukar tahun 2024 diperkirakan terjaga pada kisaran Rp15.700 hingga Rp16.100 per USD.

Gambar 3.6
Tren Perubahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika
Tahun 2019–2024

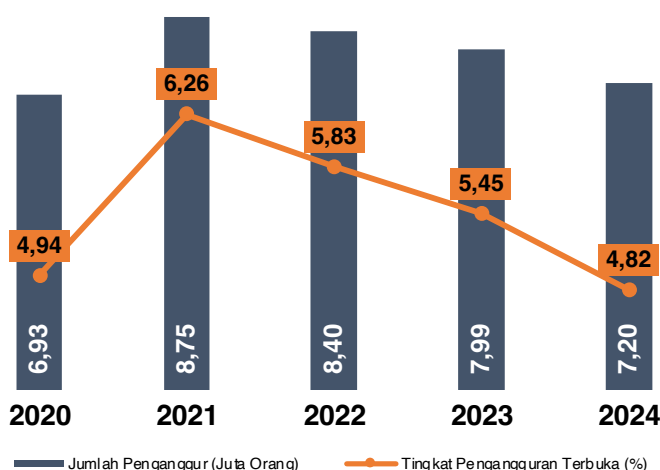


3.1.2.5. Capaian Pembangunan

1) Pertumbuhan Ekonomi dan Serapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut mendorong perbaikan kondisi lapangan kerja nasional. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk yang masuk kategori usia kerja nasional tercatat sebanyak 212,6 juta orang dan 147,7 juta orang termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah orang yang bekerja pada tahun 2023 meningkat 4,6 juta orang dari tahun 2022 yang sebanyak 135 juta orang. Capaian pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja baru dan pengangguran. Kemampuan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja terus membaik yang ditunjukkan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 sebesar 69,48 persen dan pada Februari 2024 menjadi 69,80 persen. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Jumlah orang yang tidak bekerja (pengangguran) pada tahun 2023 tercatat sebanyak 7,9 juta sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,32 persen. Kondisi ini semakin membaik di Februari 2024 dengan menurunnya TPT hingga mencapai level di bawah prapandemi, yaitu menjadi sebesar 4,82 persen.

Gambar 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Tahun 2020-2024



Beberapa aspek ketenagakerjaan yang mempengaruhi tingkat serapan angkatan kerja sebagai berikut: 1) Proporsi tenaga kerja formal berdasarkan data periode Agustus meningkat secara bertahap. Namun, berdasarkan data periode Februari mengalami tren menurun meski kembali mengalami peningkatan pada Februari 2024. Pada Februari 2024, proporsi tenaga kerja formal tercatat sebesar 40,83 persen, meningkat dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 39,88 persen; 2) Kondisi ketenagakerjaan nasional masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Berdasarkan data Agustus 2023, sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja berada di Pulau Jawa dan Sumatera.

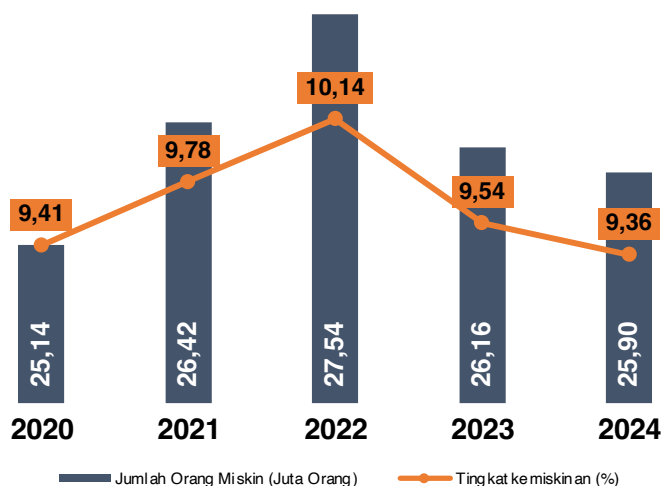
2) Tingkat Kemiskinan

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan menunjukkan tren yang terus menurun sejak tahun 2021, setelah mencapai dua digit pada saat pandemi Covid-19.

Secara spasial, angka kemiskinan juga mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun perdesaan per Maret 2023. Akan tetapi, pada tahun 2023, masih terdapat disparitas kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, angka kemiskinan relatif mendekati target nasional yang sebesar 7,50 persen, tetapi di perdesaan masih berada pada angka 12,20 persen.

Secara nasional, penurunan tingkat kemiskinan juga tercermin pada kemiskinan ekstrem yang turun sebesar 0,92 persen poin, yaitu dari sebesar 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023. Penurunan angka kemiskinan pada bulan Maret 2023 sejalan dengan terus menguatnya aktivitas perekonomian, menurunnya tingkat pengangguran, dan terkendalinya inflasi.

Gambar 3.8
Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2020-2024



3) Ketimpangan

Ketimpangan di Indonesia terus mengalami penurunan, meskipun penurunannya tidak sebesar angka kemiskinan. Dalam periode 2015 hingga 2023, Indonesia berhasil menurunkan Rasio Gini dari 0,402 menjadi 0,388. Namun nilai tersebut meningkat 0,007 poin dibandingkan pada September 2022 dengan Rasio Gini sebesar 0,381.

Ketimpangan umumnya cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Di perkotaan, Rasio Gini mencapai 0,409 pada Maret 2023, meningkat 0,007 poin dibandingkan September 2022. Di sisi lain, ketimpangan di perdesaan per Maret 2023 masih berada pada angka 0,313, tidak berubah dari kondisi pada September 2022.

Menurunnya Rasio Gini nasional menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga juga membantu mengurangi tingkat ketimpangan di Indonesia. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat kebijakan fiskal baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan serta memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Upaya untuk mengurangi

kesenjangan berfokus pada kelompok sosial yang menyumbang 40 persen pengeluaran terbawah, melalui stabilisasi harga, pemberian bantuan sosial, dan penciptaan lapangan kerja. Rasio Gini pada tahun 2024 ditargetkan berada pada rentang 0,374 – 0,377.

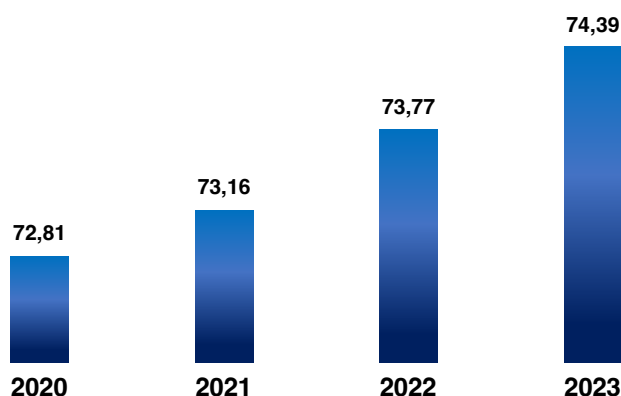
4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. Hal ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas manusia Indonesia meskipun dalam kondisi krisis.

Pada tahun 2023, realisasi IPM meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 27). Dengan pencapaian tersebut, status IPM Indonesia berada pada kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Peningkatan IPM pada tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Peningkatan IPM ini seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian Indonesia, serta didukung berbagai program Pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Peningkatan capaian IPM juga terjadi secara merata di seluruh provinsi dengan nilai IPM tertinggi ($\text{IPM} \geq 80$) diraih oleh DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Sejak tahun 2018, tidak terdapat lagi provinsi dengan status capaian yang rendah dalam pembangunan manusia. Pada tahun 2024, IPM Indonesia ditargetkan berada pada kisaran 73,99 – 74,02.

Gambar 3.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
Tahun 2020 – 2023



3.1.2.6. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

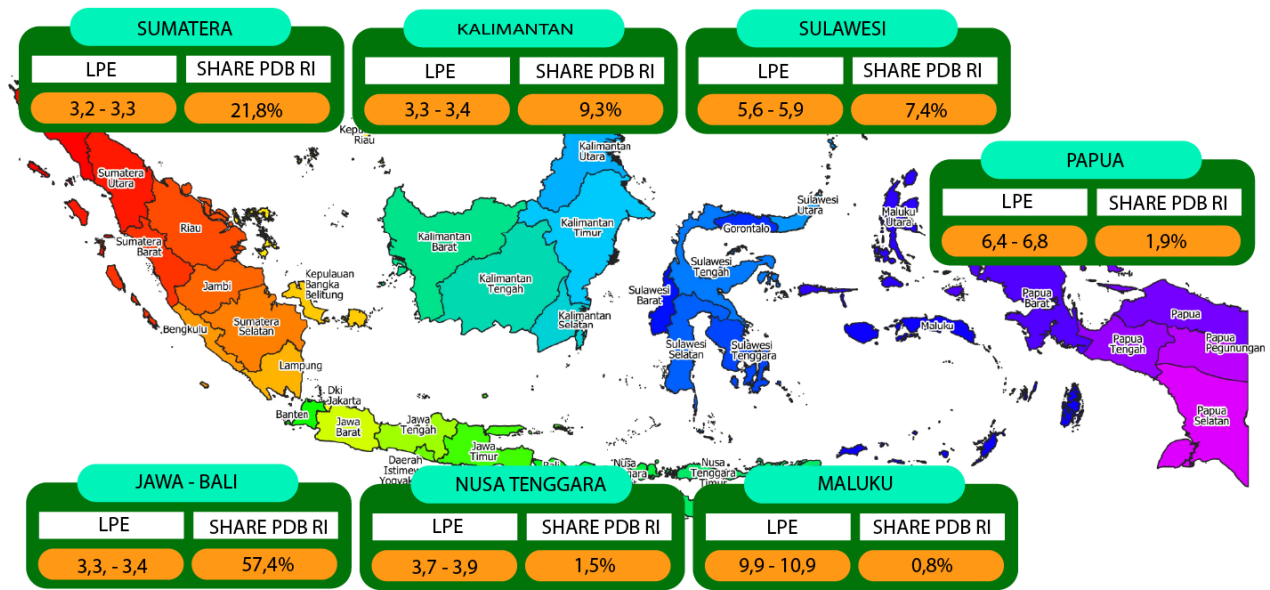
Terhadap dinamika dan analisis perkembangan pembangunan sampai dengan semester I tahun 2024 yang menunjukkan berbagai tren pergerakan, maka ditetapkan penyesuaian target sasaran makro pembangunan nasional tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Realisasi dan Target Kinerja Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

No.	Indikator	Capaian				2024		
		2020	2021	2022	2023	RPJMN	RKP	Outlook
Sasaran Pembangunan								
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,07	3,70	5,31	5,05	6,50	5,20	5,20
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	6,49	5,86	5,32	4,30	5,70	5,0-5,7
3	Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,374	0,377	0,381-0,384
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,71	9,57	9,36	7,00	7,50	8,5-9,0
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,81	73,16	73,77	74,39	75,54	74,02	75,09
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	24,46	27,07	27,82	27,02	27,30	27,27	27,27
Indikator Pembangunan								
1	Nilai Tukar Petani	101,65	104,64	107,33	112,46	105,00	108,00	105-108
2	Nilai Tukar Nelayan	100,22	104,69	106,45	105,40	107,00	110,00	107-110
3	Laju Inflasi (yoy)	1,68	1,87	5,51	2,61	2,70	2,80	2,70
4	Nilai Tukar Rupiah	14.543	14.296	14.847	15.235	15.000	15.000	15.200

Sasaran ekonomi wilayah Tahun 2024 dibagi ke dalam 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Kalimantan, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku dan Wilayah Papua. Target sasaran menurut wilayah sebagai berikut:

Gambar 3.10
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan Share Regional Terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2024



3.1.3. Dinamika Lingkungan Strategis Provinsi Maluku

3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Daerah Provinsi Maluku

Kinerja ekonomi Maluku pada kuartal III tahun 2023 mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 5,69 persen di mana pertumbuhan ini terjadi hampir pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peran dominan pada perekonomian Maluku juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,96 persen.

Ekonomi provinsi maluku sejatinya mengalami pertumbuhan tiap tahunnya, namun kontribusi sektor utama belum cukup signifikan untuk meningkatkan perekonomian daerah hal ini dikarenakan masih tingginya ketergantungan daerah pada sektor pertanian dan perikanan mengakibatkan rendahnya nilai tambah yang diperoleh daerah. Kondisi lain yakni sebagian besar penduduk masih bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya lapangan pekerjaan di sektor lain, minimnya kualifikasi pendidikan, dan minimnya akses terhadap kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, sektor primer masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Kebijakan transformasi struktur perekonomian merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan modernisasi kegiatan ekonomi dan merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan perekonomian.

Transformasi struktur perekonomian adalah proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa yang pada masing-masing sektor mengalami perubahan yang berbeda. Pada umumnya, transformasi yang terjadi pada negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri, atau terjadinya transformasi dari sektor primer kepada sektor non primer (sekunder dan tersier).

Struktur perekonomian adalah besar share lapangan usaha terhadap total PDRB baik atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan. Dengan mengetahui struktur perekonomian maka dapat diketahui konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu daerah. Seiring berjalannya waktu akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian yang ditandai dengan pergeseran struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonomi dalam hal ini Transformasi ekonomi adalah titik kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur perekonomian dari lower productivity ke higher productivity atau dengan meningkatkan produktivitas di dalam sektor tersebut.

Seiring dengan kebijakan transformasi yang digalakan Beberapa sektor unggulan di Provinsi Maluku adalah perikanan, pertanian, pariwisata dan ESDM di mana permasalahan pada urusan pemerintahan tersebut harus menjadi perhatian bagi stakeholder bersangkutan. Pada sektor perikanan di mana Maluku kaya akan sumber daya laut, namun masih memiliki kendala yakni dalam pengolahan dan pemasaran hasil ikan serta ketersediaan sarana prasarana memadai bagi nelayan. Hal ini tentu saja menjadikan kesejahteraan nelayan tidak maksimal pencapaiannya. Adapun hal yang sama juga dialami oleh sektor pertanian dengan permasalahan pada pengolahan produk yang memiliki nilai tambah beserta pemasarannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya hilirisasi sehingga terwujud integrasi antara sektor industri dengan pertanian maupun perikanan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, kebijakan yang harus didorong oleh pemerintah daerah adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor primer. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan teknologi dan infrastruktur yang mendukung sektor primer, meningkatkan akses terhadap pasar serta memberikan dukungan yang lebih besar pada sektor primer.

3.1.3.2. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Maluku

Kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi sebagai berikut:

Tujuan Pembangunan Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Indikator kinerja yang hendak dicapai adalah: laju pertumbuhan ekonomi, indeks infrastruktur, presentase penurunan emisi gas rumah kaca, tingkat inflasi, indeks Williamson dan Indeks Risiko Bencana.

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Produk, dengan indikator sasaran strategis yaitu laju pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Arah kebijakan yang diusung adalah: (1)Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian,kehutanan dan perikanan; serta (2) Produk unggulan daerah untuk pengembangan industri strategis;
- 2) Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi, dengan indikator sasaran strategis yaitu laju pertumbuhan ekonomi Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan serta Nilai Investasi PMA dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Arah kebijakan yang diusung adalah: (1) Peningkatan dan Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran, serta Jaringan Usahanya dan (2) Memberikan kemudahan berinvestasi melalui penyederhanaan layanan perizinan;
- 3) meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan indikator Rasio Konektivitas, Indeks Desa Membangun serta Indeks Infrastruktur (Bidang Ke-PU-an). Arah kebijakan yang diusung adalah: (1) Akselerasi pengembangan peningkatan desa yang mandiri dan (2) Penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah;
- 4) Meningkatnya Pembangunan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dengan indikator Persentase PDRB Sektor Pariwisata. Arah kebijakan yang diusung adalah: Pengembangan potensi wisata unggulan daerah;
- 5) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana, dengan indikator Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Arah kebijakan yang diusung adalah: Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan daerah, dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Arah kebijakan yang diusung adalah: Peningkatan kapasitas produksi, keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman.

3.1.3.3. Target dan Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024

Berdasarkan uraian kondisi dan rencana kebijakan di atas, maka ditetapkan target kinerja sasaran ekonomi makro Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Realisasi dan Target Kinerja Ekonomi Makro Provinsi Maluku
Tahun 2024

INDIKATOR SASARAN EKONOMI MAKRO	CAPAIAN				TARGET
	2020	2021	2022	2023	2024
□ Indeks Pembangunan Manusia	69,49	69,71	72,04	72,75	73,80
□ Pertumbuhan Ekonomi	-0,92	5,05	5,73	5,69	5,24
□ Tingkat Kemiskinan	17,99	16,70	16,23	16,42	15,88
□ Tingkat Pengangguran Terbuka	7,57	6,93	6,44	6,08	6,28
□ Laju Inflasi	0,09	4,01	6,28	2,81	2,09-2,99
□ Gini Rasio	0,31	0,31	0,306	0,288	0,286

3.1.4. Dinamika Lingkungan Strategis Kabupaten Maluku Tenggara

Dinamika lingkungan Strategis digambarkan melalui perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan Ekonomi suatu daerah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Gambaran perkembangan ekonomi daerah dieleborasi dalam Indikator kinerja ekonomi makro.

Indikator Kinerja Ekonomi Makro memberikan gambaran dampak pembangunan yang dilaksanakan. Ekonomi Makro yang tumbuh positif mengindikasikan pembangunan mampu memberi manfaat bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara beserta capaian kinerja ekonomi makro dan target kinerja tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

3.1.4.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara

Kinerja ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara dalam 3 (tiga) tahun terakhir mampu mencapai pertumbuhan positif. Setelah mengalami kontraksi pada Tahun 2020, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara berangsur tumbuh positif. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,42 persen, Tahun 2022 sebesar 5,65 persen dan Tahun 2023 sebesar 4,84 persen.

Kierja positif pertumbuhan ekonomi didorong oleh kebijakan strategis bidang perekonomian di antaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, koperasi, UMKM, dan Perindustrian. Termasuk kebijakan pengembangan pariwisata yang semakin bergeliat dengan jumlah kunjungan wisata yang berangsur membaik.

Kinerja positif juga ditunjukkan pada kinerja pengendalian harga-harga barang pokok dan penting. Laju inflasi secara konsisten mampu dikendalikan. Tahun 2020 Laju Inflasi sebesar 2,06 persen; Tahun 2021 sebesar 3,35 persen, Tahun 2022 sebesar 4,52 persen dan Tahun 2023 sebesar 3,32 persen. Kinerja pengendalian inflasi didorong kebijakan strategis 1) menjaga ketersediaan pasokan; 2) menjaga keterjangkauan harga; 3) menjamin kelancaran distribusi dan 4) menjalankan komunikasi efektif kerjasama lintas sektor.

Kualitas sumber daya manusia terus didorong untuk meningkat dari waktu ke waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tenggara menunjukkan tren meningkat secara konsisten. IPM Tahun 2020 sebesar 66,20 meningkat menjadi 67,57 pada tahun 2023. Kenaikan juga terjadi pada indeks komposit IPM, yang meliputi Usia Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan.

Catatan perbaikan yang masih harus menjadi perbaikan ke depan adalah masih tingginya angka kemiskinan serta tingkat pengangguran yang menunjukkan tren meningkat. Angka kemiskinan meskipun secara tren menunjukkan adanya penurunan, namun persentase penduduk miskin sebesar 21,79 persen tahun 2023 masih sangat tinggi.

Di samping itu, kemiskinan ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara masih perlu untuk terus ditekan. Data P3KE Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan sampai Tahun 2023, jumlah keluarga miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara masih sebanyak 4.571 KK dengan jumlah individu yang tingkat pengeluaran perkapita lebih rendah dari Rp351.957 masih sebanyak 28.803 jiwa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 sebesar 5,73 persen. TPT menunjukkan tren kenaikan pada periode tahun 2020 – 2023. Dampak Pandemi Covid-19 masih mempengaruhi tingkat serapan tenaga kerja yang rendah karena kurangnya investasi dan ekspansi usaha.

Selain itu, hal yang juga sangat mempengaruhi TPT di Maluku Tenggara adalah rendahnya kualitas, kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja. Upaya strategis dalam bentuk perbaikan iklim investasi, peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha serta upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja melalui pelatihan, magang, dan diklat, menjadi sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk bersaing di pasar tenaga kerja.

3.1.4.2. Kinerja Perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 dan Perkembangan Sampai Dengan Semester Pertama Tahun 2024

Sampai dengan Tahun 2023, dari 6 (enam) Indikator Makro yang diukur, terdapat 2 (dua) indikator yang mampu melebihi target dengan capaian kinerja lebih dari 100 persen. Sisanya 4 (empat) indikator yang lain terealisasi dengan kinerja di bawah 100 persen.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berkinerja paling rendah hanya mencapai 38 persen. Upaya mendorong perluasan lapangan kerja melalui investasi dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan dan magang perlu untuk ditingkatkan.

Capaian kinerja pertumbuhan ekonomi baru mencapai 79 persen, upaya mendorong kinerja perekonomian perlu untuk didorong. Analisis pertumbuhan terhadap lapangan usaha PDRB menunjukkan bahwa sektor dominan PDRB mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat.

Upaya mendorong pemberdayaan ekonomi pada sektor primer perikanan dan pertanian, yang merupakan sub sektor dominan PDRB perlu untuk ditingkatkan secara efektif dan efisien. Termasuk dalam hal ini, diperlukan pula peningkatan pada aspek pendampingan dan penyuluhan.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023

NO.	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	2023		
			TARGET	REALISASI	KINERJA
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,48	69,91	102%
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,13	4,84	79%
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	19,75	21,79	90%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,54	5,73	38%
5	Laju Inflasi	Persen	2,95	3,32	87%
6	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,244	130%

3.1.4.3. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026, kebijakan pengembangan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2024–2026 sebagai berikut:

Tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara adalah Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah, dengan indikator kinerja tujuan Indeks Gini, mengukur tingkat sebaran pendapatan masyarakat. Dari tujuan tersebut, diuraikan ke dalam sasaran pembangunan ekonomi daerah. Sasaran pembangunan ekonomi terdiri dari: 1) Meningkatnya Perekonomian daerah; 2) Meningkatnya Kesempatan Kerja dan 3) Terkendalinya inflasi daerah. Indikator kinerja utama pembangunan ekonomi daerah adalah: 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2) PDRB Perkapita; 3) Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Inflasi.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026

TUJUAN: MENINGKATKAN KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH		
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
☐ Meningkatnya Perekonomian daerah	Menciptakan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
☐ Meningkatnya Kesempatan Kerja	Kemitraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan magang serta fasilitasi penciptaan lapangan kerja	Peningkatan kesempatan kerja
☐ Terstabilnya inflasi daerah	Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok	Peningkatan ketersediaan bahan kebutuhan pokok

Sumber: Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023

3.1.4.4. Sasaran Kinerja Ekonomi Makro Tahun 2024

Atas dasar uraian analisis di atas, maka ditetapkan perubahan target capaian kinerja indikator makro pembangunan di dalam Perubahan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 3.5
Uraian Perubahan Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024

INDIKATOR MAKRO	REALISASI					ESTIMASI 2024		
	2019	2020	2021	2022	2023	RPD	RKPD	P-RKPD
□ Indeks Pembangunan Manusia	65,65	68,57	68,69	69,23	69,91	67,49	67,49	70,25
□ Pertumbuhan Ekonomi	5,85	-0,22	3,42	5,65	4,84	5,65	6,01	5,65
□ Tingkat Kemiskinan	22,75	22,57	22,73	21,19	21,79	19,65	20,45	20,45
□ Tingkat Pengangguran Terbuka	2,58	4,95	5,06	5,74	5,73	4,50	4,50	4,50
□ Laju Inflasi	2,34	2,06	3,35	4,52	3,32	3,45	3,45	3,00
□ Indeks Gini	0,373	0,376	0,239	0,265	0,244	0,360	0,360	0,230
□ PDRB Perkapita	32,37	26,83	27,78	30,47	32,89	31,25	32,01	36,80

Penyesuaian terjadi pada 5 (lima) indikator. Uraian dan penjelasan terhadap perubahan target sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada RKPD Tahun 2024 ditargetkan sama dengan target RPD sebesar 67,49. Rilis BPS terhadap capaian IPM Tahun 2023 menunjukkan nilai IPM sebesar 69,91. Target RPD dan RKPD 2024 lebih rendah dibanding capaian IPM Tahun 2023. Sehingga untuk Perubahan RKPD Tahun 2024 IPM ditargetkan menjadi 70,25. Penargetan ini menggunakan dasar perhitungan proyeksi regresi linier.
2. Pertumbuhan Ekonomi, pada RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar 6,01 persen, lebih tinggi dari target RPD sebesar 5,65 persen. Rilis BPS terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 diperoleh angka pertumbuhan sebesar 4,84 persen, sedikit melambat dibanding tahun 2022. Dengan mempertimbangkan capaian tahun 2023, maka penyesuaian target Pertumbuhan Ekonomi dalam Perubahan RKPD 2024 dikembalikan sesuai target RPD sebesar 5,65%.
3. Laju Inflasi, pada RKPD 2024 ditargetkan sebesar 3,45 persen. Capaian Tahun 2023 sesuai rilis BPS sebesar 3,32 persen. Target RKPD lebih tinggi dibanding capaian tahun 2023, sehingga dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RKPD 2024 menjadi 3,00 persen. Penargetan ini menggunakan dasar perhitungan proyeksi regresi linier.
4. Indeks Gini, pada RKPD 2024 ditargetkan sebesar 0,360 sesuai target RPD. Rilis BPS Tahun 2023 Indeks Gini Maluku Tenggara sebesar 0,244. Target RPD dan RKPD 2024 jauh lebih tinggi dibanding capaian Indeks Gini sesuai Rilis BPS. Penyesuaian Target Indeks Gini Tahun 2024 menjadi 0,230. Penargetan ini menggunakan dasar perhitungan proyeksi regresi linier.
5. PDRB Perkapita, pada RKPD 2024 ditargetkan sebesar Rp32.010.000 lebih tinggi dibanding target RPD Rp31.250.000. Hasil perhitungan PDRB Perkapita sesuai rilis BPS terhadap Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023 menunjukkan nilai PDRD Perkapita Tahun 2023 sebesar Rp32.890.000 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan. Penyesuaian terhadap

target PDRB Perkapita Tahun 2024 menjadi Rp36.800.000, penargetan ini sesuai proyeksi dengan menggunakan Regresi Linier.

3.1.4.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sejalan dengan prospek perekonomian nasional Tahun 2023 yang mampu tumbuh di tengah gejolak perekonomian global, perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2023 mampu tumbuh mencapai 4,84 persen. Meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun 2022, namun kondisi perekonomian dinilai masih cukup tangguh yang tergambar dari indikator makro ekonomi yang secara umum bertumbuh positif.

Kondisi perekonomian Tahun 2024 diperkirakan akan semakin membaik, sejalan dengan perekonomian nasional yang semakin tangguh dan tumbuh. Indikator perekonomian yang perlu mendapatkan perhatian, guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan akselerasi pertumbuhan di tahun 2024 adalah upaya mendorong pemerataan pembangunan, menekan tingkat pengangguran, serta pengendalian inflasi. Aspek–aspek ini yang menjadi tantangan pembangunan sektor perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerataan Pembangunan

Pemerataan Pembangunan yang diukur dengan Indeks Williamson dan Indeks Gini menunjukkan kondisi pemerataan pembangunan Maluku Tenggara berada di kategori sedang. Nilai Indeks Williamson Tahun 2023 sebesar 0,29 dan Nilai Indeks Gini 0,244 menunjukkan bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan pembangunan lebih didominasi kesenjangan antara wilayah Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil di samping kesenjangan pendapatan antarwarga.

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, Wilayah Pulau Kei Besar didorong untuk tumbuh lebih cepat, di samping tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Pulau Kei Kecil. Pertumbuhan Wilayah Kei Besar didorong melalui peningkatan alokasi belanja infrastruktur wilayah, pelayanan pendidikan dan kesehatan, sarana transportasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

2. Tingkat Pengangguran

Aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren negatif dalam 3 (tiga) Tahun terakhir. Pandemi Covid–19 mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dalam periode 2020 s.d 2023.

Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kab.Maluku Tenggara antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan keterampilan dan kapasitas untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Tingkat pendidikan secara umum masih rendah rendah, tingkat urbanisasi yang cukup tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak/tenaga harian lepas, dan faktor pemutusan hubungan kerja terjadi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020–2021.

Kebijakan untuk Tahun 2024 perlu mendorong peningkatan aspek ketenagakerjaan, antara lain meliputi: a) peningkatan kualitas tenaga kerja, antara lain, bimbingan dan pelatihan, magang,

serta pendampingan dan fasilitasi; b) perluasan lapangan kerja, berupa pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta ekspansi usaha, perbaikan iklim investasi, mendorong pengembangan sektor potensial daerah, termasuk mendorong perluasan akses pemodal bagi wirasusaha pemuda dan pemula.

3. Pengendalian Inflasi

Inflasi adalah momok bagi perekonomian di masa pasca pandemi Covid-19. Di Kabupaten Maluku Tenggara tingkat inflasi tahun 2023 mencapai 3,32 persen. Tingkat inflasi dianggap masih terkendali, namun kondisi ketidakpastian global, gejolak dan tensi geopolitik yang meningkat memberi risiko yang harus terus diantisipasi.

Di Kabupaten Maluku Tenggara, komponen yang paling berpengaruh terhadap perubahan harga-harga barang adalah Bahan Pangan. Terbatasnya pasokan bahan pangan pada waktu-waktu tertentu tidak mampu memenuhi permintaan pasar, sehingga mendorong kenaikan harga. Penawaran terhadap komponen bahan pangan di Kab.Maluku Tenggara sangat dipengaruhi oleh faktor produksi yang sangat bergantung dengan kondisi alam di samping aspek pasokan yang terjadi karena sebagian besar bahan pangan dipasok dari luar daerah.

Selain bahan pangan, komponen transportasi juga menjadi pemicu inflasi. Harga tiket pesawat yang melonjak adalah salah satu yang paling berdampak pada kenaikan harga.

Prospek pembangunan daerah yang dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah di tahun 2024 antara lain:

1. Kinerja perekonomian yang semakin pulih dan membaik di tahun 2022–2023 menjadi landasan bagi akselerasi kinerja perekonomian di tahun 2024;
2. Kinerja sektor produktif perikanan dan pertanian yang semakin membaik di tahun 2023 didorong untuk tumbuh semakin cepat melalui penguatan aspek penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan kepada para pelaku usaha perikanan dan pertanian;
3. Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan stunting yang dilaksanakan di seluruh daerah sampai ke desa, memberikan ruang yang sangat besar untuk perbaikan dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial. Hal ini dapat memberikan dampak bagi perekonomian karena dengan sumber pendanaan yang lebih bervariasi akan memberikan keleluasan intervensi yang langsung dirasakan masyarakat;
4. Geliat sektor pariwisata yang semakin meningkat di tahun 2022–2023, memberikan ruang untuk berkembangnya usaha pariwisata di tahun 2024. Jumlah kunjungan wisata tahun 2023 sebanyak 136.075 kunjungan mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebanyak 60.502 kunjungan. Kenaikan ini sekaligus menunjukkan adanya peningkatan dari sisi aktivitas kepariwisataan, sehingga peluang ini perlu didorong dari sisi kebijakan.

Hasil pelaksanaan pembangunan di tahun 2022 dan 2023 yang meliputi penanganan jalan dan jembatan, jalan strategis desa, cakupan pelayanan listrik yang lebih baik, perluasan cakupan jaringan telekomunikasi dan informasi, penyediaan sarana transportasi perdesaan, bus air ro-ro, rumah sakit pratama di Elat serta bantuan sosial akan membuka peluang usaha dan perekonomian yang semakin terbuka lebar.

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu pengelolaan Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara sejak tahun 2020 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lebih lanjut Permendagri tersebut mengalami pemutakhiran yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya kebijakan perencanaan dan penganggaran dilaksanakan dengan mengacu pada pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Seluruh tahapan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kebijakan keuangan daerah dirinci dalam 3 (tiga) komponen besar, yaitu: pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ketiga komponen pengelolaan keuangan tersebut terdokumentasi di dalam APBD.

Proyeksi dari masing-masing komponen keuangan daerah tersebut di tahun 2024, diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp930.953.408.147. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, pendapatan daerah diproyeksikan tidak berubah.

Pendapatan Daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD terdiri dari 4 (empat) sub komponen yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sub komponen PAD diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah lain yang sah diantaranya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro, pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi; dan potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 dalam APBD dianggarkan sebesar Rp930.953.408.147. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, PAD diproyeksikan tidak mengalami perubahan. Proyeksi penerimaan PAD Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Uraian Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	67.669.204.858	67.669.204.858	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	37.151.837.361	37.151.837.361	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.649.532.480	6.649.532.480	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.446.735.017	6.446.735.017	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.421.100.000	17.421.100.000	0,00

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Sub Komponen pendapatan transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan transfer pemerintah pusat, meliputi dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH), dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU), dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan dana desa.
- 2) Pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya, meliputi pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah komponen penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Di dalamnya terdapat sub komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan dana desa.

Sejak tahun 2022 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka sub komponen DAU terbagi atas 2 (dua) item besar yaitu: DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Pada sub komponen DAU yang ditentukan penggunaannya, terdapat item penganggaran yang sudah diatur besaran alokasinya yaitu: 1) Penggajian PPPK; 2) Pendanaan kelurahan; 3) Penganggaran bidang pendidikan; 4) Penganggaran bidang kesehatan; serta 5) Penganggaran bidang pekerjaan umum.

Dalam APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp858.880.373.937. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, pendapatan transfer diproyeksikan tidak mengalami perubahan. Proyeksi pendapatan transfer tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 3.7
Uraian Perubahan Pendapatan Transfer Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.2	Pendapatan Transfer	858.880.373.937	858.880.373.937	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	838.747.553.000	838.747.553.000	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	695.537.254.000	695.537.254.000	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	6.627.605.000	6.627.605.000	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	502.608.436.000	502.608.436.000	0,00
	□ DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	367.325.682.000	367.325.682.000	0,00
	□ DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	200.000.000	200.000.000	0,00
	□ Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	32.109.012.000	32.109.012.000	0,00
	□ DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	46.554.533.000	46.554.533.000	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	☐ DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	32.619.768.000	32.619.768.000	0,00
	☐ DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	23.799.441.000	23.799.441.000	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.146.001.000	91.146.001.000	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	95.155.212.000	95.155.212.000	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	143.210.299.000	143.210.299.000	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.132.820.937	20.132.820.937	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	20.132.820.937	20.132.820.937	0,00

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD Tahun 2024 menganggarkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp4.403.829.352. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan. Proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.8
Uraian Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.403.829.352	4.403.829.352	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.403.829.352	4.403.829.352	0,00

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

Pendapatan daerah sangat berkaitan dengan ruang kapasitas fiskal daerah. Meningkatnya pendapatan akan berdampak pada meningkatnya kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal yang besar akan memberikan keleluasaan bagi daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja guna penanganan permasalahan pembangunan yang ada.

Upaya untuk mendorong peningkatan sisi pendapatan terus dilakukan. Selain untuk memperbesar kapasitas fiskal, peningkatan pendapatan juga didorong untuk meningkatkan kemandirian daerah dari sisi kemampuan keuangan guna mendanai kebijakan pembangunan daerah. Beberapa kebijakan peningkatan pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- 1) Perbaikan dan pemutakhiran database pajak dan retribusi;

- 2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi serta pendampingan kepada obyek pajak;
- 3) Intensifikasi, ekstensifikasi dan deversifikasi jenis dan obyek pajak daerah;
- 4) Mendorong realisasi pembayaran piutang dan tunggakan pajak serta retribusi;
- 5) Mendorong peningkatan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui pemutakhiran data dan pelaporan kinerja serta penyiapan data dukung yang andal guna menunjang pengusulan paket kegiatan DAK fisik.

Alokasi anggaran pendapatan dalam APBD Tahun 2024 dan proyeksi perubahan anggaran tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.9
Uraian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	67.669.204.858	67.669.204.858	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	37.151.837.361	37.151.837.361	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.649.532.480	6.649.532.480	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.446.735.017	6.446.735.017	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.421.100.000	17.421.100.000	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	858.880.373.937	858.880.373.937	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	838.747.553.000	838.747.553.000	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	695.537.254.000	695.537.254.000	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	6.627.605.000	6.627.605.000	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	502.608.436.000	502.608.436.000	0,00
	☐ DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	367.325.682.000	367.325.682.000	0,00
	☐ DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	200.000.000	200.000.000	0,00
	☐ Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	32.109.012.000	32.109.012.000	0,00
	☐ DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	46.554.533.000	46.554.533.000	0,00
	☐ DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	32.619.768.000	32.619.768.000	0,00
	☐ DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	23.799.441.000	23.799.441.000	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.146.001.000	91.146.001.000	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	95.155.212.000	95.155.212.000	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	143.210.299.000	143.210.299.000	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.132.820.937	20.132.820.937	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	20.132.820.937	20.132.820.937	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.403.829.352	4.403.829.352	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.403.829.352	4.403.829.352	0,00
Jumlah Pendapatan		930.953.408.147	930.953.408.147	0,00

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Total belanja daerah dianggarkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp934.672.994.096. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp963.431.559.276, atau bertambah sebesar Rp28.758.565.180.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

Tabel 3.10
Uraian Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	BELANJA DAERAH	934.672.994.096	963.431.559.276	28.758.565.180
5.1	Belanja Operasi	628.328.430.687	641.595.397.914	13.266.967.227
5.2	Belanja Modal	100.026.916.333	116.118.514.286	16.091.597.953
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00
5.4	Belanja Transfer	203.317.647.076	202.717.647.076	-600.000.000
Jumlah Belanja		934.672.994.096	963.431.559.276	28.758.565.180

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

Uraian komponen belanja sebagai berikut:

3.2.2.1. Belanja Operasi

yaitu pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari komponen-komponen belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan pegawai ASN;
- 2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
- 3) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
- 4) Belanja Hibah, diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Total belanja operasi dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp628.328.430.687. Mengalami kenaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp641.595.397.914. Terjadi penambahan sebesar Rp13.266.967.227 atau meningkat sebesar 2,11 persen. Uraian komponen belanja operasi sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai, dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp307.709.629.801. Mengalami kenaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp308.548.091.665. Terjadi penambahan sebesar Rp838.461.864, atau meningkat sebesar 0,27 persen. Kenaikan pada komponen ini disebabkan adanya penyesuaian hitungan gaji dan tunjangan ASN sesuai kondisi riil kepegawaian dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp229.978.586.929. Mengalami kenaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp230.855.816.553. Terjadi penambahan sebesar Rp877.229.624, atau meningkat sebesar 0,38 persen.
- 3) Belanja Hibah, dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp90.430.713.957. Mengalami kenaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp102.151.489.696. Terjadi penambahan sebesar Rp11.720.775.739, atau meningkat sebesar 12,96 persen.
- 4) Belanja Bantuan Sosial, dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp209.500.000. Mengalami pengurangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp40.000.000. Berkurang Sebesar Rp169.500.000 atau 80,91 persen.

Uraian perubahan anggaran belanja operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Uraian Perubahan Belanja Operasi Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.1	Belanja Operasi	628.328.430.687	641.595.397.914	13.266.967.227
5.1.01	Belanja Pegawai	307.709.629.801	308.548.091.665	838.461.864
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.978.586.929	230.855.816.553	877.229.624
5.1.05	Belanja Hibah	90.430.713.957	102.151.489.696	11.720.775.739
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	209.500.000	40.000.000	-169.500.000

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari komponen-komponen belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Total belanja Modal dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp100.026.916.333. Mengalami kenaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp116.118.514.286. Terjadi penambahan sebesar Rp16.091.597.953 atau meningkat sebesar 16,09 persen. Uraian komponen belanja modal sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tanah, dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp750.000.000. Tidak mengalami perubahan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp10.894.181.383. Mengalami kenaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp11.857.555.883. Terjadi penambahan sebesar Rp963.374.500, atau meningkat sebesar 8,84 persen;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp26.302.787.727. Mengalami kenaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp41.176.613.080. Terjadi penambahan sebesar Rp14.873.825.353, atau meningkat sebesar 56,55 persen;
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp61.806.524.223. Mengalami kenaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp62.074.345.323. Terjadi penambahan sebesar Rp267.821.100, atau meningkat sebesar 0,43 persen;

- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp273.423.000. Mengalami pengurangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp260.000.000. Berkurang sebesar Rp13.423.000 atau 4,91 persen.

Uraian perubahan anggaran belanja modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Uraian Perubahan Belanja Modal Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.2	Belanja Modal	100.026.916.333	116.118.514.286	16.091.597.953
5.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000	750.000.000	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.894.181.383	11.857.555.883	963.374.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.302.787.727	41.176.613.080	14.873.825.353
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.806.524.223	62.074.345.323	267.821.100
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	273.423.000	260.000.000	-13.423.000

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

3.1.1.1. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000, diproyeksikan tidak mengalami perubahan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tabel 3.13
Uraian Perubahan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

3.1.1.2. Belanja Transfer

Belanja Transfer, adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari komponen-komponen belanja sebagai berikut.

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam lingkup Kabupaten Maluku Tenggara, Belanja Bagi

Hasil merupakan bagi hasil dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada pemerintah ohoi, atas penerimaan pajak dan retribusi daerah.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan diuraikan sebagai penganggaran terhadap alokasi dana desa yang bersumber dari DAU dan dana desa yang bersumber dari APBN.

Total Belanja Transfer dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp203.317.647.076. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksikan turun menjadi Rp202.717.647.076. Pengurangan sebesar Rp600.000.000 atau 0,30 persen. Uraian komponen belanja transfer sebagai berikut.

Tabel 3.14
Uraian Perubahan Belanja Transfer Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
05.04	Belanja Transfer	203.317.647.076	202.717.647.076	-600.000.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.187.444.576	2.187.444.576	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	201.130.202.500	200.530.202.500	-600.000.000

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

Kebijakan belanja Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 diarahkan untuk secara efektif dan efisien mampu menjawab kebutuhan dan penanganan permasalahan pembangunan. Kebijakan belanja dilaksanakan dengan memperhatikan:

- 1) Efisiensi terhadap penganggaran belanja pegawai, terutama belanja pegawai di dalam komponen belanja barang dan jasa yang dapat berpengaruh pada rendahnya daya ungkit dari pelaksanaan program dan kegiatan. Penganggaran belanja pegawai di dalam komponen belanja barang dan jasa didorong untuk mencapai persentase maksimal 30 persen dari pagu kegiatan, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 2) Belanja diarahkan untuk sebesar-besarnya mendorong penanganan permasalahan riil masyarakat yaitu belanja publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang mampu mendorong pencapaian target pembangunan. Intervensi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Alokasi anggaran disusun menyesuaikan dengan tema pembangunan “Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan, Berbasis Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Keandalan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan 7 (tujuh) prioritas: 1) penurunan angka kemiskinan; 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) peningkatan ekonomi dan daya saing daerah; 4) peningkatan kapasitas infrastruktur dan konektivitas; 5) peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik; 6) peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan 7) peningkatan stabilitas politik dan keamanan.

Terhadap uraian tema dan isu strategis di atas, maka untuk tahun 2024, arah kebijakan belanja daerah difokuskan pada:

1. Penganggaran untuk memenuhi *mandatory spending*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
 - 2) Besar anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - 3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN);
 - 4) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Penganggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) termasuk pengentasan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting, serta penanganan rumah tidak layak huni dan pengentasan kawasan kumuh;
3. Penganggaran untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah sesuai Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026;
4. Penganggaran untuk menunjang penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024, di antaranya hibah kepada KPUD Kabupaten Maluku Tenggara, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara serta kepada aparat keamanan TNI-Polri. Di samping pula penganggaran dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi regulasi, pembinaan parpol, pembinaan FKUB, serta penyelenggaraan pemerintahan umum, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
5. Penganggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antara lain yang berkaitan dengan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah, Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Kota Langgur, *Masterplan* Pengembangan Ibukota, serta *Masterplan* Pengembangan Wilayah Perbatasan;
6. Penganggaran untuk peningkatan perekonomian dan daya saing daerah, antara lain meliputi pengendalian inflasi, kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi KAWASAN, pelayanan ketenagakerjaan, perluasan lapangan kerja dan investasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan destinasi wisata;

7. Penganggaran untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, pengawasan, serta penyediaan tambahan penghasilan pegawai guna meningkatkan kesejahteraan.

Dari uraian kebijakan belanja tersebut di atas, maka dapat diuraikan proyeksi besaran alokasi untuk komponen belanja daerah tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 3.15
Uraian Perubahan Komponen dan Sub Komponen Belanja Daerah
Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	BELANJA DAERAH	934.672.994.096	963.431.559.276	28.758.565.180
5.1	Belanja Operasi	628.328.430.687	641.595.397.914	13.266.967.227
5.1.01	Belanja Pegawai	307.709.629.801	308.548.091.665	838.461.864
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.978.586.929	230.855.816.553	877.229.624
5.1.05	Belanja Hibah	90.430.713.957	102.151.489.696	11.720.775.739
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	209.500.000	40.000.000	-169.500.000
5.2	Belanja Modal	100.026.916.333	116.118.514.286	16.091.597.953
5.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000	750.000.000	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.894.181.383	11.857.555.883	963.374.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.302.787.727	41.176.613.080	14.873.825.353
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.806.524.223	62.074.345.323	267.821.100
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	273.423.000	260.000.000	-13.423.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00
05.04	Belanja Transfer	203.317.647.076	202.717.647.076	-600.000.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.187.444.576	2.187.444.576	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	201.130.202.500	200.530.202.500	-600.000.000
Jumlah Belanja		934.672.994.096	963.431.559.276	28.758.565.180

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam APBD Tahun 2024, Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya (Tahun 2023). Dalam APBD Tahun 2024 SiLPA dianggarkan sebesar Rp4.719.585.949, diproyeksikan meningkat pada Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp33.478.151.129. Kenaikan ini dipengaruhi hasil perhitungan SiLPA definitif berdasarkan Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dianggarkan penyertaan modal daerah sebesar Rp1.000.000.000 kepada BPD Maluku-Malut, diproyeksikan tidak mengalami perubahan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tabel 3.16
Uraian Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.719.585.949	33.478.151.129	28.758.565.180
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	4.719.585.949	33.478.151.129	28.758.565.180
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00
	Pembiayaan Netto	3.719.585.949	32.478.151.129	28.758.565.180

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

Rincian perubahan komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Uraian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	67.669.204.858	67.669.204.858	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	37.151.837.361	37.151.837.361	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.649.532.480	6.649.532.480	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.446.735.017	6.446.735.017	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.421.100.000	17.421.100.000	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	858.880.373.937	858.880.373.937	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	838.747.553.000	838.747.553.000	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	695.537.254.000	695.537.254.000	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	6.627.605.000	6.627.605.000	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	502.608.436.000	502.608.436.000	0,00
	□ DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	367.325.682.000	367.325.682.000	0,00
	□ DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	200.000.000	200.000.000	0,00
	□ Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	32.109.012.000	32.109.012.000	0,00
	□ DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	46.554.533.000	46.554.533.000	0,00
	□ DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	32.619.768.000	32.619.768.000	0,00
	□ DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	23.799.441.000	23.799.441.000	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.146.001.000	91.146.001.000	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	95.155.212.000	95.155.212.000	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.2.01.05	Dana Desa	143.210.299.000	143.210.299.000	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.132.820.937	20.132.820.937	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	20.132.820.937	20.132.820.937	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.403.829.352	4.403.829.352	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.403.829.352	4.403.829.352	0,00
Jumlah Pendapatan		930.953.408.147	930.953.408.147	0,00
5	BELANJA DAERAH	934.672.994.096	963.431.559.276	28.758.565.180
5.1	Belanja Operasi	628.328.430.687	641.595.397.914	13.266.967.227
5.1.01	Belanja Pegawai	307.709.629.801	308.548.091.665	838.461.864
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.978.586.929	230.855.816.553	877.229.624
5.1.05	Belanja Hibah	90.430.713.957	102.151.489.696	11.720.775.739
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	209.500.000	40.000.000	-169.500.000
5.2	Belanja Modal	100.026.916.333	116.118.514.286	16.091.597.953
5.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000	750.000.000	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.894.181.383	11.857.555.883	963.374.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.302.787.727	41.176.613.080	14.873.825.353
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.806.524.223	62.074.345.323	267.821.100
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	273.423.000	260.000.000	-13.423.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00
05.04	Belanja Transfer	203.317.647.076	202.717.647.076	-600.000.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.187.444.576	2.187.444.576	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	201.130.202.500	200.530.202.500	-600.000.000
Jumlah Belanja		934.672.994.096	963.431.559.276	28.758.565.180
Surplus/(Defisit)		-3.719.585.949	-32.478.151.129	-28.758.565.180
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.719.585.949	33.478.151.129	28.758.565.180
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		4.719.585.949	33.478.151.129	28.758.565.180
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		1.000.000.000	1.000.000.000	0,00
Pembiayaan Netto		3.719.585.949	32.478.151.129	28.758.565.180
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tenggara 2024 – 2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara dirumuskan berdasarkan hasil pencapaian kinerja pembangunan triwulan II tahun 2024, peluang dan tantangan pembangunan daerah yang merujuk pada prioritas pembangunan nasional seperti termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku sehingga terjadi keselarasan perencanaan pembangunan dari level pusat hingga level daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 mengacu pada visi dan misi yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005–2025 serta rumusan tujuan dan sasaran strategis mengacu pada RPD Kabupaten Maluku Tenggara dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024, yang disusun dengan mengacu pada visi dan misi serta arahan presiden diuraikan sebagai berikut.

1. Visi dan Misi RPJMN 2020-2024

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, visi yang ditetapkan sebagai arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam periode pembangunan tahun 2020-2024 yaitu:

VISI PRESIDEN

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Dalam mencapai visi RPJMN 2020-2024 ditetapkan misi RPJMN yang dituangkan ke dalam 9 (sembilan) poin nawacita, 5 (lima) arahan presiden dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut.

Gambar 4.1

Misi Pembangunan Nasional 2020-2024

MISI PRESIDEN	ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PRESIDEN
1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia		 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing	1 Pembangunan SDM	 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan	2 Pembangunan infrastruktur	 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4 Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	3 Penyederhanaan regulasi	 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa		 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6 Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	4 Penyederhanaan birokrasi	 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	5 Transformasi ekonomi	 Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
8 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya		
9 Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan		

2. Arahan Presiden

Arahan presiden dalam melaksanakan misi Nawacita dan upaya pencapaian visi Indonesia 2045 mencakup pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Gambar 4.2
Arahan Presiden Republik Indonesia



Sebagai wujud operasional pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yang disusun berlandaskan RPJPN tahun 2005-2025, visi Indonesia 2045 dan visi presiden melalui pencapaian 9 (sembilan) misi nawacita yang disasar dengan memperhatikan 5 (lima) arahan presiden serta 7 (tujuh) agenda pembangunan, maka menghasilkan sasaran pembangunan nasional dalam periode pembangunan tahun 2020-2024 yakni "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing".

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku

RKPD Kabupaten Maluku Tenggara disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku. Sebagai suatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka antar tingkatan pemerintahan harus ada

keselarasan baik dalam hal strategis dan arah kebijakan maupun dalam penetapan target sasaran.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019-2024 disusun berdasarkan visi pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019-2024 yakni Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih, dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan, yang dijabarkan dalam 6 (enam) misi yaitu 1) mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani; 2) meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau; 3) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 4) peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; 5) meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata; dan 6) mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi. Visi dan misi tersebut, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih, dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan		
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Optimalisasi reformasi birokrasi menuju good governance	Peningkatan kapasitas dan manajemen pemerintah daerah
2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT
3) Meningkatnya tata kelola keuangan daerah		Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola keuangan daerah
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau		
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing		
1) Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan menengah yang terjangkau
		Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan non

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		formal
2) Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata		Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (tenaga kesehatan) Maluku yang unggul
		Peningkatan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan		
Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		
1) Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan	Penguatan industri daerah berbasis komoditas unggulan
2) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat		
1) Meningkatnya pendapatan masyarakat	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan daya beli masyarakat
		Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
2) Meningkatnya ketahanan pangan		Ketersediaan pangan daerah
3) Terkendalinya harga kebutuhan pokok		Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
4) Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas		Meningkatnya keterampilan, kompetensi SDM dan penciptaan lapangan kerja
Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan		
1) Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan
		Penguatan mitigasi risiko bencana daerah
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau		
Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah		

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
kepulauan		
1) Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas	Alselarasi pengembangan peningkatan desa yang mandiri
2) Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur		Penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata		
Meningkatkan pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata		
1) Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata	Penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa
2) Meningkatnya investasi pembangunan daerah		Optimalisasi kemudahan dan peluang berinvestasi
3) Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah		Peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, kreatif, mandiri dan berprestasi		
Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif		
1) Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	Pengembangan usaha ekonomi kreatif	Meningkatkan kompetensi dan kemandirian wirausaha muda
2) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga
3) Meningkatnya pembangunan SDM yang berkeadilan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 disusun berdasarkan visi, misi, sasaran arah pembangunan dan skala prioritas RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 serta isu strategis aktual yang dirumuskan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026 sesuai

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023 melalui tujuan dan sasaran strategis beserta indikatornya yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.2
Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2005–2025 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Maluku Tenggara 2024-2026

No	Misi RPJPD 2005-2025	Tujuan	Sasaran	Indikator
Visi: Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural				
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertakwa, dan berbudaya	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran dan berbudaya	1) Meningkatnya kualitas kerukunan hidup masyarakat	Indeks kerukunan hidup masyarakat
			2) Meningkatnya kualitas budaya daerah	Indeks kualitas budaya daerah
			3) Terjaganya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum	Angka partisipasi pemilu
				Jumlah konflik sosial
2	Mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang berkualitas	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	1) Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah
				Harapan lama sekolah
			2) Meningkatnya kualitas kesehatan	Usia harapan hidup
			3) Meningkatnya pendapatan riil masyarakat	Indeks PPP (000)
3	Mewujudkan perekonomian Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan yang Tangguh dan berdaya saing	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	1) Meningkatnya perekonomian daerah	LPE PDRB ADHB
				LPE PDRB ADHK
				PDRB Perkapita ADHB (000)
				PDRB Perkapita ADHK (000)
			2) Meningkatnya kesempatan kerja	TPT
4	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berwawasan	Meningkatkan kualitas pemerataan pembangunan	1) Menurunnya penduduk miskin	Tingkat kemiskinan
			2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Indeks pembangunan gender

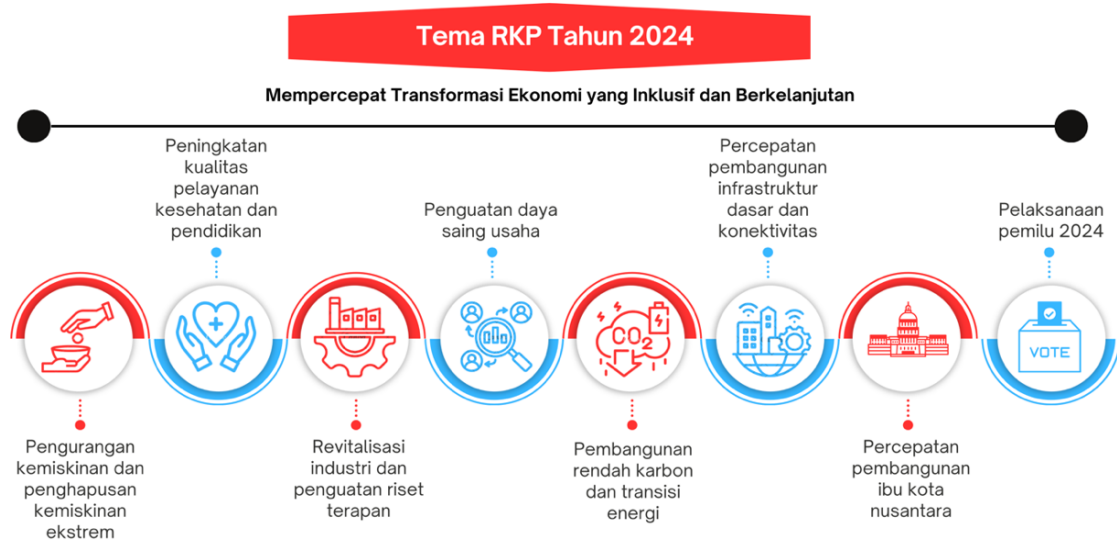
No	Misi RPJPD 2005-2025	Tujuan	Sasaran	Indikator
	lingkungan dan berkeadilan	yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan	dan gender	Indeks Kabupaten Layak Anak (KLA)
			3) Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan	Indeks kualitas pembangunan wilayah
			4) Meningkatnya pembangunan berbasis mitigasi bencana	Angka korban bencana alam dan kebakaran
			5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH
			6) Meningkatnya arus penumpang/barang dalam daerah, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum	Jumlah orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara (000)
5	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan berlandaskan hukum	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum	Indeks pengelolaan keuangan daerah
				Nilai AKIP
				Nilai LPPD
				Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik
				Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas pembangunan nasional tahun 2024 disesuaikan dengan tema RKP tahun 2024 yakni Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan diarahkan melalui 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan. Uraian tema RKP dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Gambar 4.3
Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024



Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, disusun strategi pembangunan tahun 2024 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan pembangunan sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.4

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024



Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas nasional RKP tahun 2024. Tujuan prioritas nasional tersebut merupakan agenda pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran tahun terakhir pada RPJMN tahun 2020-2024.

Gambar 4.5
Prioritas Nasional Tahun 2024



4.2.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024

Tema pembangunan Provinsi Maluku tahun 2024 sesuai RKPD Provinsi Maluku tahun 2024 adalah **"Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas"** yang diuraikan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Maluku tahun 2024 sebagai berikut.

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan;
3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata;
4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau;
5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul;
6. Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkualitas;
7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju *good governance*.

4.2.3. Tema dan Prioritas Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024

Tema pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 yakni **”Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan berbasis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keandalan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** dengan prioritas Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

1. Penurunan angka kemiskinan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan ekonomi dan daya saing
4. Peningkatan kapasitas infrastruktur dan konektivitas
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan stabilitas politik dan keamanan

Perencanaan yang selaras antara pusat dan daerah memerlukan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan prioritas dan target kinerja Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Maluku tahun 2024. Prioritas Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 yang selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.3
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD 2024-2026
dengan Prioritas Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran dan berbudaya	Meningkatnya kualitas kerukunan hidup masyarakat	Peningkatan stabilitas politik dan keamanan
		Meningkatnya kualitas budaya daerah	
		Terjaganya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum	
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Penurunan angka kemiskinan Peningkatan kualitas sumber daya manusia
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	
		Meningkatnya pendapatan riil masyarakat	
3		Meningkatnya perekonomian daerah	

No	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	Meningkatnya kesempatan kerja Terstabilnya inflasi daerah	Peningkatan ekonomi dan daya saing
4	Meningkatkan kualitas pemertaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan	Menurunnya penduduk miskin Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan Meningkatnya pembangunan berbasis mitigasi bencana Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya arus penumpang/barang dalam daerah	Peningkatan kapasitas infrastruktur dan konektivitas Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan berlandaskan hukum	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan berlandaskan hukum	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mendukung percepatan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara menurut skala prioritas tahun 2024, maka ditetapkan fokus pembangunan sebagai pedoman bagi OPD dalam menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD seperti yang disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Daerah dan Fokus Tahun 2024

No	Prioritas	Fokus	OPD
1	Penurunan angka kemiskinan	Pelaksanaan bedah rumah tidak layak huni	DPKPP
		Pemberian bantuan PMKS berbasis DTKS dan tanggap darurat kebencanaan	Dinas Sosial
		Penyediaan air bersih, sanitasi dan listrik	Dinas PUTR
		Penguatan pengelolaan badan usaha milik ohoi dan pemberdayaan perempuan	DPMDPPA
		Penanganan stunting	Lintas OPD teknis terkait
		Penanganan kemiskinan ekstrem	Lintas OPD teknis terkait

No	Prioritas	Fokus	OPD
		Pendataan penduduk dan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan berbasis mobile service	Disdukcapil
		Peningkatan kualitas keluarga	DPPKBD
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan
		Peningkatan kapasitas sarana prasarana pendidikan dasar	Dinas Pendidikan
		Peningkatan minat baca masyarakat	Dinas Perpustakaan
		Penguatan sumber daya (SDM, Alkes dan obat)	Dinas Kesehatan/RSUD
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu	Dinas Kesehatan
		Pemasyarakatan olahraga dalam mendukung perilaku hidup sehat dan energik	Dispora
3	Peningkatan ekonomi dan daya saing	Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Dinas Perikanan
		Peningkatan produktivitas pertanian	Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan
		Pelatihan pelaku usaha mikro dan manajemen koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
		Pelatihan vokasi dan operasi pasar serta pengawasan barang beredar	Dinas Perindagnaker
		Pengembangan ekonomi kreatif dan peran serta masyarakat di bidang pariwisata	Dinas Pariwisata
4	Peningkatan kapasitas infrastruktur dan konektivitas	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan di pulau Kei Besar	Dinas PUTR
		Penataan permukiman kawasan perkotaan	DPKPP
		Penataan Kota Langgur	Dinas PUTR
		Pencegahan banjir ROB dan mitigasi bencana	BPBD
		Pengawasan angkutan dan layanan terminal, darat serta bandara	Dinas Perhubungan
		Peningkatan jangkauan jaringan telepon seluler	Diskominfo
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah	Sekretariat Daerah
		Pelayanan publik yang prima	DPMPTSP
		Tata kelola keuangan daerah	BKAD
		Penegakan Perda	Sat Pol-PP

No	Prioritas	Fokus	OPD
		Penyediaan data dan informasi statistik daerah	Diskominfo
		Penguatan kelembagaan adat dan peningkatan budaya lokal mendukung sektor pariwisata	Dinas Kebudayaan Daerah
		Penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Bappelitbangda
		Penatausahaan keuangan daerah	BKAD
		Peningkatan pendapatan asli daerah	Bapenda
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BKPSDM
		Peningkatan kualitas pengawasan	Inspektorat
		Persiapan pemilu serentak 2024	Badan Kesbangpol
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan persampahan, pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
7	Peningkatan stabilitas politik dan keamanan	Pengamanan dan pengawalan	Badan Kesbangpol Satpol-PP
		Penegakan peraturan daerah	
		Perlindungan masyarakat	

Tabel 4.5
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Perubahan Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target RPD 2024	Target RKPD Tahun 2024	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Penurunan angka kemiskinan	1.1 Menurunnya penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	21,79	19,65	20,46	20,46
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	n.a	0,6893	0,6893	0,6893
		2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	n.a	0,6547	0,655	0,7092
		2.3 Meningkatnya pendapatan riil masyarakat	Indeks pengeluaran	n.a	0,283	0,283	0,283
		2.4 Meningkatnya kelembagaan pemuda dan olahraga	Indeks kualitas kelembagaan pemuda dan olahraga	n.a	60	60	60
		2.5 Meningkatnya kualitas budaya daerah	Indeks kualitas budaya daerah	n.a	65	65	65
		2.6 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak	Indeks pembangunan gender	0	75,54	75,54	75,54
			Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	550	615	615	615
3	Peningkatan ekonomi dan daya saing	3.1 Meningkatnya perekonomian daerah	LPE PDRB ADHB	8,60	10,30-10,45	10,3-10,4	10,3-10,4
			LPE PDRB ADHK	4,84	5,67-5,75	6,01	6,01
			PDRB Perkapita ADHB (000)	18,03	31,25	32,01	32,01
			PDRB Perkapita ADHK (000)	32,89	23,8	23,8	23,8
		3.2 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,73	4,50	4,5	4,5
		3.3 Terstabilnya inflasi daerah	Inflasi	3,32	3,0-3,45	3,0-3,45	3,0-3,45

No	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target RPD 2024	Target RKPD Tahun 2024	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
4	Peningkatan kapasitas infrastruktur dan konektivitas	4.1 Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan	Indeks kualitas pembangunan wilayah (indeks pembangunan kecamatan/jumlah kecamatan)	n.a	0,679	0,679	0,679
		4.2 Meningkatnya pembangunan berbasis mitigasi bencana	Angka korban bencana alam dan kebakaran (korban bencana alam+korban bencana kebakaran)	n.a	≤3	≤3	≤3
		4.3 Meningkatnya arus penumpang/barang dalam daerah	Pertumbuhan lalu lintas orang/ barang melalui darmaga/ terminal/ bandara	n.a	5,24	5,24	5,24
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	5.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan berlandaskan hukum	Indeks pengelolaan keuangan daerah	n.a	72,015	72,015	72,015
			Nilai AKIP	62,75/B	63,89/B	63,89/B	63,89/B
			Nilai LPPD	2,65/T	2,91/T	2,91/T	2,91/T
			Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik	n.a	75,50/ZK	75,50/ZK	75,50/ZK
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,98	2,5-3,0	2,5-3,0	2,5-3,0
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	6.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	76,27	78,05	78,05	78,05
7	Peningkatan stabilitas politik dan keamanan	7.1 Meningkatnya kualitas kerukunan hidup masyarakat	Indeks kerukunan hidup masyarakat	n.a	100	100	100
		7.2 Terjaganya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum	Indeks stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum	n.a	85	85	85

4.3. Prioritas Sesuai Peraturan Perundang-undangan

4.3.1. Pemenuhan *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- 3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 persen (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- 4) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

4.3.2. Pemenuhan SPM

Pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta diatur lebih lanjut secara teknis melalui peraturan kementerian dan lembaga teknis.

Kode	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
DINAS PENDIDIKAN			
1.01.02.2. 01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	350 Orang
1.01.02.2. 01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	388 Orang

Kode	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.01.02.2. 01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital
1.01.02.2. 01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	284 Orang
1.01.02.2. 01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	142 Dokumen
1.01.02.2. 01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang
1.01.02.2. 02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang
1.01.02.2. 02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	15 Satuan Pendidikan
1.01.02.2. 02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang
1.01.02.2. 02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	15 Konten Digital
1.01.02.2. 02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang
1.01.02.2. 02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen
1.01.02.2. 03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit
1.01.02.2. 03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	219 Satuan Pendidikan
1.01.02.2. 03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen
1.01.02.2. 03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6 Dokumen

Kode	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.01.02.2. 03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang
1.01.02.2. 04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen
DINAS KESEHATAN			
1.02.02.2. 02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang
1.02.02.2. 02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang
1.02.02.2. 02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang
1.02.02.2. 02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang
1.02.02.2. 02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang
1.02.02.2. 02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang
1.02.02.2. 02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang
DINAS PUTR			
1.03.03.2. 01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen
1.03.03.2. 01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2 Liter/Detik
1.03.03.2. 01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit

Kode	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.03.05.2. 01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5 M ³ /Hari
1.03.05.2. 01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	12 Rumah Tangga
1.03.05.2. 01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen
DINAS PERUMAHAN			
1.04.02.2. 01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen
1.04.02.2. 01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen
1.04.02.2. 03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah
DINAS PEMADAM KEBAKARAN			
1.05.04.2. 01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen
1.05.04.2. 01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan
1.05.04.2. 01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen
1.05.04.2. 01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
1.05.04.2. 04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi	100 Orang

Kode	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
	Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1.05.03.2. 02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan
1.05.03.2. 03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	150 Orang
1.05.03.2. 03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang
DINAS SOSIAL			
1.06.04.2. 01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
1.06.04.2. 01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
1.06.04.2. 01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang
1.06.04.2. 01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang Orang
1.06.06.2. 01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
			TOTAL

4.3.3. Dukungan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Dukungan Pemerintah Daerah untuk kelancaran dan kesuksesan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah masing-masing, dilaksanakan salah satunya melalui Hibah Daerah.

Kabupaten Maluku Tenggara dalam penganggaran Tahun 2024 mengalokasikan anggaran hibah kepada KPUD Kabupaten Maluku Tenggara, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Kodim 1503 Maluku Tenggara, Polres Maluku Tenggara, Pangkalan TNI AU Dominikus Dumatubun Langgur, dan Pangkalan TNI AL Tual.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Alokasi Hibah Daerah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	
Perangkat Daerah	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bidang Urusan	: 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	: 8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4.4. Prioritas Tematik Aktual

4.4.1. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan salah satu target pembangunan nasional sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersinergi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem. Intervensi daerah untuk penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Strategi nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: 1) meningkatkan pendapatan; 2) mengurangi beban pengeluaran dan 3) menghapus kantong-kantong kemiskinan.

4.4.2. Penurunan Stunting

Intervensi kegiatan untuk penurunan stunting dilaksanakan melalui koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Maluku Tenggara. TPPS dibentuk dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 364 Tahun 2024.

Intervensi dilaksanakan terbagi atas dua jenis, yaitu: Intervensi Spesifik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, serta Intervensi Gizi Sensitif oleh perangkat daerah lainnya

4.4.3. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi menjadi salah satu isu strategis secara nasional. Setelah pandemi Covid-19, perekonomian global bergerak menuju pemulihan dengan salah satu variable kunci pertumbuhan adalah pengendalian harga-harga. Aspek pasokan dan distribusi barang

dipastikan terkendali dan lancar guna menjawab permintaan pasar yang semakin bertumbuh sejalan dengan perbaikan ekonomi global.

Pengendalian inflasi di Indonesia dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Strategi utama pengendalian inflasi mencakup 4 (empat) hal, yaitu: 1) Ketersediaan Stok; 2) Keterjangkauan harga; 3) kelancaran distribusi dan 4) komunikasi efektif.

4.5. Sinergi Perencanaan Daerah Mendukung Prioritas Nasional

Perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai suatu bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 260 Ayat (1) menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sebagai suatu kesatuan maka pembangunan daerah harus mendukung dan/atau ikut berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, maka dilakukan penyelarasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mendukung prioritas nasional.

Tabel 4.6
Program Prioritas Kabupaten Maluku Tenggara dalam
Hubungan dengan Prioritas Nasional dan
Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus pada: 1) Pecepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan dan pariwisata	Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
	2) Penguatan reformasi fiskal dan sistem keuangan 3) Perbaikan sistem logistik 4) Penguatan digitalisasi 5) Ekonomi hijau	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	
		Program penyuluhan pertanian	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM
		Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
		Program penilaian kesehatan KSU/USP koperasi	
		Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	
		Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Dinas Perindagnaker
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	
		Program stabilitas harga barang pokok dan barang penting	
		Program standarisasi dan perlindungan konsumen	
		Program perencanaan dan pembangunan industri	
		Program pengendalian izin usaha industri	
		Program promosi penanaman modal	DPMPTSP
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
		Program pelayanan penanaman modal	
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program pemasaran pariwisata	
		Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
		Program penanganan kerawanan pangan	
		Program pengawasan keamanan pangan	
		Program pengelolaan keuangan daerah	BKAD
		Program pengelolaan barang milik daerah	
		Program pengelolaan pendapatan daerah	
		Program informasi dan komunikasi publik	
		Program aplikasi informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas PUTR
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan fokus pada:	Program pengembangan perumahan	DPKPP
		Program kawasan permukiman	
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	
		Program penatagunaan tanah	
		Program pengelolaan perbatasan	BPPD
	1) Percepatan transformasi sosial dan ekonomi		
	2) Penguatan rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah		
	3) Penguatan integrasi perekonomian domestik		
	4) Peningkatan kualitas pelayanan dasar		
	5) Peningkatan sinergi pemanfaatan ruang wilayah		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, dengan fokus pada: 1) Keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional 2) Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting 3) Percepatan pemulihan pembelajaran 4) Reformasi pendidikan keterampilan 5) Reformasi sistem perlindungan sosial	Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	
		Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program pengembangan kurikulum	
		Program pembinaan perpustakaan	
		Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
		Program perlindungan jaminan sosial	
		Program penanganan bencana	
		Program pengelolaan taman makam pahlawan	
		Program pengendalian penduduk	DPPKBD
		Program pembinaan keluarga berencana	
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Perindagnaker
		Program penempatan tenaga kerja	
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	DPMDPPA
		Program perlindungan perempuan	
		Program pemenuhan hak anak	
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan fokus pada: 1) Internalisasi nilai-nilai esensial yakni integritas, etos kerja dan gotong royong	Program pengembangan kebudayaan	Dinas Kebudayaan
		Program pengembangan kesenian tradisional	
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	DPMDPPA
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan fokus pada: 1) Pecepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUTR
		Program penyelenggaraan jalan	
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	
		Program pengelolaan sumber daya air	
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program pengelolaan pelayaran	
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan fokus pada: 1) Pelestarian lingkungan hidup 2) Pencegahan kerusakan sumber daya alam 3) Pengurangan risiko dan tangguh bencana	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	
		Program perencanaan lingkungan	
		Program pengelolaan persampahan	
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	
		Program penanggulangan bencana	BPBD
		Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan fokus pada: 1) Perbaikan sistem hukum 2) Optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan Kesbangpol
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana
	termasuk kerja sama pembangunan internasional	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Satpol PP

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan mengelaborasi aspek kebijakan berdasar uraian permasalahan di Bab II, kerangka ekonomi dan keuangan di Bab III serta tujuan dan sasaran pembangunan di Bab IV. Rencana kerja dan pendanaan menguraikan secara konkret berupa program dan kegiatan disertai anggaran dan lokasi kegiatan.

Sesuai analisis kerangka ekonomi makro, gambaran keuangan daerah, serta prioritas belanja pada Bab III maka, rencana kerja dan pendanaan daerah untuk tahun 2024 dapat diuraikan dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu: 1) belanja wajib dan mengikat, serta penting dan mendesak sesuai Peraturan Perundang-undangan; 2) belanja untuk pencapaian target pembangunan daerah; dan 3) alternatif pembiayaan lainnya.

5.1. Belanja Wajib dan Mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Belanja Wajib dan Mengikat diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Aspek belanja wajib dan mengikat yang diuraikan meliputi: pemenuhan mandatory spending; pemenuhan standar pelayanan minimal dan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.

5.1.1. Kebijakan Belanja Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*)

Pemerintah Daerah diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mengalokasikan sejumlah anggaran dalam rangka mendanai belanja wajib dan prioritas. Pengalokasian anggaran dimaksud yaitu untuk mendanai: 1) sektor pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (4), dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); 2) sektor kesehatan sebesar 10 (sepuluh) persen dari total belanja, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; dan 3) belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Anggaran Pengawasan sebesar 0,75 persen sesuai Undang-Undang APBN Tahun 2024.

1) Pendidikan

(1) Perhitungan Anggaran Fungsi Pendidikan

Pemetaan atas perhitungan alokasi fungsi pendidikan terdiri atas belanja pada sub-kegiatan pada urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kepemudaan dan olahraga serta belanja di luar urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan.

Tabel 5.1
Perhitungan Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2024

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD 2024	P-RKPD 2024	
1	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN	188.715.527.842,00	182.006.262.534,00	-6.709.265.308,00
	1.1. Belanja Operasi	181.546.385.405,00	173.716.097.054,00	-7.830.288.351,00
	1.2. Belanja Modal	7.169.142.437,00	8.290.165.480,00	1.121.023.043,00
2	URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.343.593.024,00	5.053.109.179,00	-290.483.845,00
	2.1. Belanja Operasi	5.243.843.024,00	4.953.359.179,00	-290.483.845,00
	2.2. Belanja Modal	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00
3	URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.896.437.816,00	2.780.344.147,00	-116.093.669,00
	3.1. Belanja Operasi	2.344.465.816,00	2.228.372.147,00	-116.093.669,00
	3.2. Belanja Modal	551.972.000,00	551.972.000,00	0,00
4	URUSAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.508.723.596,00	4.337.780.430,00	-170.943.166,00
	4.1. Belanja Operasi	4.389.023.596,00	4.218.080.430,00	-170.943.166,00
	4.2. Belanja Modal	119.700.000,00	119.700.000,00	0,00
5	BELANJA DI LUAR URUSAN	0,00	0,00	0,00
6	ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN (1+2+3+4+5)	201.289.082.278,00	194.002.296.290,00	-7.286.785.988,00
7	TOTAL BELANJA DAERAH	934.672.994.096,00	963.431.559.276,00	28.758.565.180,00
8	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (6/7x100)	21,55%	20,15%	

(2) Pendanaan Program dan Kegiatan untuk mendanai Sektor Pendidikan

Pendanaan Program dan Kegiatan untuk mendanai Sektor Pendidikan Tahun 2024 dijabarkan menurut Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.2
Pendanaan Program dan Kegiatan Fungsi Pendidikan
Tahun 2024

Kode	Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1.01.0.00.01	Dinas Pendidikan	188.715.527.842,00	182.006.262.534,00	-6.709.265.308
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82.540.964.848,00	86.659.058.957,00	4.118.094.109
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	56.164.976.238,00	58.991.874.939,00	2.826.898.701
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.922.688.020,00	19.162.610.438,00	1.239.922.418
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.401.766.840,00	5.453.039.830,00	51.272.990
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.783.733.750,00	2.783.733.750,00	0,00
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	117.800.000,00	117.800.000,00	0,00
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	141.225.000,00	141.225.000,00	0,00

Kode	Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.225.000,00	141.225.000,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.033.337.994,00	95.205.978.577,00	-10.827.359.417
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.690.250,00	87.690.250,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105.418.372.494,00	94.591.013.077,00	-10.827.359.417
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.070.250,00	134.070.250,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.612.500,00	203.612.500,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.592.500,00	129.592.500,00	0,00
2.22.0.00.16	Dinas Kebudayaan Daerah	5.168.393.024,00	4.877.909.179,00	-290.483.845
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	434.090.000,00	434.090.000,00	0,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	434.090.000,00	434.090.000,00	0,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.534.303.024,00	2.243.819.179,00	-290.483.845
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.984.654.149,00	1.694.170.304,00	-290.483.845
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.268.750,00	82.268.750,00	0,00
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.391.000,00	254.391.000,00	0,00
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.403.125,00	80.403.125,00	0,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.836.000,00	32.836.000,00	0,00
2.24.2.23.02	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	2.896.437.816,00	2.780.344.147,00	-116.093.669
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			0,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	857.072.000,00	857.072.000,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	792.072.000,00	792.072.000,00	0,00

Kode	Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.039.365.816,00	1.923.272.147,00	-116.093.669
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.178.500,00	9.178.500,00	0,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.598.615.816,00	1.482.522.147,00	-116.093.669
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.673.000,00	209.673.000,00	0,00
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.562.500,00	91.562.500,00	0,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.336.000,00	112.336.000,00	0,00
2.19.0.00.13	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah	4.508.723.596,00	4.337.780.430,00	-170.943.166
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			0,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	468.100.000,00	468.100.000,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	166.400.000,00	166.400.000,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	301.700.000,00	301.700.000,00	0,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.685.799.750,00	1.685.799.750,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	265.799.750,00	265.799.750,00	0,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00	0,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.264.823.846,00	2.093.880.680,00	-170.943.166
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.707.424.396,00	1.536.481.230,00	-170.943.166
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.121.750,00	240.121.750,00	0,00
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.925.000,00	122.925.000,00	0,00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.852.700,00	83.852.700,00	0,00

Kode	Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	JUMLAH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN	201.289.082.278,00	194.002.296.290,00	-7.286.785.988
	TOTAL BELANJA DAERAH	934.672.994.096,00	963.431.559.276,00	28.758.565.180
	RASIO BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN	21,55%	20,15%	

2) Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.3
Pendanaan Program dan Kegiatan Fungsi Kesehatan
Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	APBD 2024	P-RKPD 2024	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan	42.894.897.832	57.142.136.592	14.247.238.760
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	37.853.855.532	52.101.094.292	14.247.238.760
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.431.029.050	31.341.437.550	15.910.408.500
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.178.333.150	16.278.796.090	100.462.940
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	379.832.000	454.832.000	75.000.000
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.864.661.332	4.026.028.652	-1.838.632.680
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.508.143.750	1.508.143.750	0,00
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	441.143.750	441.143.750	0,00
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.067.000.000	1.067.000.000	0,00
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	108.723.500	108.723.500	0,00
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	59.098.500	59.098.500	0,00
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	49.625.000	49.625.000	0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.988.882.300	1.988.882.300	0,00
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.026.250	38.026.250	0,00

URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	APBD 2024	P-RKPD 2024	
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.950.856.050	1.950.856.050	0,00
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.435.292.750	1.435.292.750	0,00
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.163.000	151.163.000	0,00
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.950.000	7.950.000	0,00
1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	201.325.000	201.325.000	0,00
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.415.000	116.415.000	0,00
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.829.750	549.829.750	0,00
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000	200.000.000	0,00
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.610.000	208.610.000	0,00
1.02.0.00.0.00.02 UPTD Puskesmas			0,00
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	26.583.394.477	26.583.394.477	0,00
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.583.394.477	26.583.394.477	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0219 RSUD Karel Sadsuitubun Langgur	30.956.671.323	30.956.671.323	0,00
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	16.488.711.323	16.488.711.323	0,00
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.140.820.323	1.140.820.323	0,00
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	879.931.000	879.931.000	0,00
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.467.960.000	14.467.960.000	0,00
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.000.000	72.000.000	0,00
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.395.960.000	1.395.960.000	0,00
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	13.000.000.000	13.000.000.000	0,00
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			0,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.441.089.200	7.533.241.146	92.151.946
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	100.000.000	100.000.000	0,00
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000	100.000.000	0,00
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.136.586.328	2.228.738.274	92.151.946
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.634.086.328	1.726.238.274	92.151.946
2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.245.000	217.245.000	0,00
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.347.500	151.347.500	0,00
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.907.500	133.907.500	0,00
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	60.000.000	60.000.000	0,00

URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	APBD 2024	P-RKPD 2024	
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	60.000.000	0,00
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.553.602.872	3.553.602.872	0,00
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.077.500.000	1.077.500.000	0,00
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	694.800.000	694.800.000	0,00
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	628.052.872	628.052.872	0,00
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.153.250.000	1.153.250.000	0,00
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.515.900.000	1.515.900.000	0,00
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.515.900.000	1.515.900.000	0,00
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	75.000.000	75.000.000	0,00
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	75.000.000	75.000.000	0,00
JUMLAH BELANJA FUNGSI KESEHATAN	109.391.952.832	123.731.343.538	14.339.390.706
TOTAL BELANJA DAERAH	934.672.994.096	963.431.559.276	28.758.565.180
RASIO BELANJA FUNGSI KESEHATAN	11,70%	12,84%	

3) Infrastruktur

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 25 persen dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

Perhitungan Anggaran Infrastruktur digambarkan dalam bentuk rasio belanja. Rasio diukur dengan membandingkan besaran anggaran infrastruktur yang dielaborasi dalam komponen Belanja Modal, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan dan Belanja Pemeliharaan terhadap total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Komponen perhitungan belanja infrastruktur di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.4
Perhitungan Anggaran Infrastruktur Tahun 2024

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	
		APBD 2024	P-RKPD 2024
1	a. BELANJA MODAL		
	☐ Belanja Modal Tanah	750.000.000	750.000.000

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	
		APBD 2024	P-RKPD 2024
	☐ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.894.181.383	11.857.555.883
	☐ Belanja Modal Bangunan dan Gedung	26.302.787.727	41.176.613.080
	☐ Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.806.524.223	62.074.345.323
	☐ Aset Tetap lainnya	273.423.000	260.000.000
	☐ Aset Lainnya	0	0
	b. BELANJA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN	0	0
	c. BELANJA PEMELIHARAAN	0	0
2	a. BELANJA HIBAH	90.430.713.957	102.151.489.696
	b. BELANJA BANTUAN SOSIAL	209.500.000	40.000.000
3	JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR (1+2)	190.667.130.290	218.310.003.982

Perhitungan Rasio Belanja Infrastruktur Tahun 2024 mendapatkan nilai Rasio sebesar 26,07 persen di APBD Induk dan meningkat menjadi 28,70 persen dalam Perubahan RKPD Tahun 2024. Uraian perhitungan Rasio Belanja Infrastruktur Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.5
Perhitungan Rasio Belanja Infrastruktur Tahun 2024

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	
		APBD 2024	P-RKPD 2024
1	Total Belanja Daerah	934.672.994.096,00	963.431.559.276,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	203.317.647.076,00	202.717.647.076,00
	– Belanja Bagi Hasil	2.187.444.576,00	2.187.444.576,00
	– Belanja Bantuan Keuangan	201.130.202.500,00	200.530.202.500,00
3	Selisih	731.355.347.020,00	760.713.912.200,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	292.542.138.808,00	304.285.564.880,00
5	Jumlah Belanja Infrastruktur	190.667.130.290,00	218.310.003.982,00
6	Rasio Belanja Infrastruktur	26,07%	28,70%

4) Anggaran Pengawasan

Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Daerah menganggarkan belanja daerah untuk fungsi pengawasan.

Tabel 5.6
Pendanaan Program dan Kegiatan Pengawasan
Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD 2024	P-RKPD 2024	
6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.921.929.356,00	6.885.911.593,00	-36.017.763,00
6.01.02	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.393.998.250,00	1.393.998.250,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			

KODE	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD 2024	P-RKPD 2024	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	215.506.250,00	215.506.250,00	0,00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	74.181.250,00	74.181.250,00	0,00
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	140.553.000,00	140.553.000,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			0,00
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	74.382.750,00	74.382.750,00	0,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	217.775.000,00	217.775.000,00	0,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	422.249.000,00	422.249.000,00	0,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	83.693.750,00	83.693.750,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	95.936.250,00	95.936.250,00	0,00
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	190.419.000,00	190.419.000,00	0,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.105.682.106,00	5.069.664.343,00	-36.017.763,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.902.500,00	27.902.500,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.815.488.856,00	2.779.471.093,00	-36.017.763,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	466.377.250,00	466.377.250,00	0,00
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	244.862.750,00	244.862.750,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	179.690.250,00	179.690.250,00	0,00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.292.500,00	69.292.500,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD 2024	P-RKPD 2024	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	811.043.000,00	811.043.000,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.232.500,00	156.232.500,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.418.750,00	61.418.750,00	0,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.670.000,00	155.670.000,00	0,00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.293.750,00	19.293.750,00	0,00
JUMLAH BELANJA PENGAWASAN		6.921.929.356,00	6.885.911.593,00	
JUMLAH BELANJA DAERAH		934.672.994.096	963.431.559.276,00	
RASIO BELANJA PENGAWASAN		0,74%	0,71%	

5.1.2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

RKPD 2024 diarahkan juga pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dilaksanakan pada penyelenggaraan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan demikian, pelaksanaan SPM merupakan keharusan di daerah dan sekaligus menjadi prioritas yang disinergikan dengan prioritas daerah. SPM sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Bidang Pendidikan

Jenis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan untuk Kabupaten/Kota adalah (1) pendidikan anak usia dini (2) pendidikan dasar dan (3) pendidikan kesetaraan.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sesuai aturan ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- (2) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, yaitu warga negara dengan ketentuan:

- (1) Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
- (2) Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;
- (3) Usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar anak usia dini;
- (4) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
- (5) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

2) Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- (1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- (2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- (3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- (4) Pelayanan kesehatan balita;
- (5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- (6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- (7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- (8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- (9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- (10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- (11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
- (12) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia, Human Immunodeficiency Virus (HIV), yang bersifat peningkatan/promotive dan pencegahan /preventif.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagai mana dimaksud, ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa ;
- (2) Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan;
- (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, yaitu warga negara dengan ketentuan:

- (1) Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
- (2) Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;
- (3) Ibu hamil untuk pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
- (4) Ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- (5) Bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- (6) Balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
- (7) Usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita usia pendidikan dasar;
- (8) Usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan usia produktif;
- (9) Usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan usia lanjut;
- (10) Penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- (11) Penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- (12) Orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat;
- (13) Orang tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita orang terduga tuberkulosis;
- (14) Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) untuk jenis pelayanan dasar orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota adalah:

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- (2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Standar umum dan kuantitas barang dan/atau jasa, dan
- (2) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten/Kota adalah.

- (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; dan
- (2) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara adalah:

- (1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Pelayanan informasi rawan bencana;
- (3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- (4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan.
- (5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6) Bidang Sosial

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Sosial di Kabupaten Maluku Tenggara adalah:

- (1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- (2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- (3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- (4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran pemenuhan SPM menurut Perangkat Daerah pelaksana diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.7
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Menurut Perangkat Daerah
Tahun 2024

Kode	OPD	Pagu OPD	Anggaran SPM	%
1.01.0.00.0.00.01	Dinas Pendidikan	182.006.262.534,00	40.906.636.163,00	22.48%
1.04.2.10.1.03.02	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	7.705.002.397,00	250.000.000,00	3.24%
1.05.0.00.0.00.03	Dinas Pemadam Kebakaran	1.091.440.000,00	173.702.500,00	15.91%
1.05.0.00.0.00.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.272.719.970,00	254.200.000,00	7.77%
1.03.3.29.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	73.701.460.571,00	1.692.175.000,00	2.30%
1.06.0.00.0.00.01	Dinas Sosial Daerah	5.465.281.760,00	473.799.500,00	8.66%
1.02.0.00.0.00.02	Dinas Kesehatan	126.635.789.937,00	232.277.000,00	0.18%

Uraian Sub Kegiatan pelaksanaan SPM Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.8
Pendanaan Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Menurut Perangkat Daerah
Tahun 2024

Kode	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD 2024	P-RKPD 2024	
DINAS PENDIDIKAN				39.289.517.644,00	40.906.636.163,00	1.617.118.519,00
1.01.02.2 .01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	350 Orang	26.459.919.000,00	27.816.157.284,00	1.356.238.284,00
1.01.02.2 .01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	388 Orang	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	0,00
1.01.02.2 .01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	96.295.500,00	96.295.500,00	0,00
1.01.02.2 .01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	284 Orang	464.740.250,00	464.740.250,00	0,00
1.01.02.2 .01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	142 Dokumen	504.299.250,00	504.299.250,00	0,00
1.01.02.2 .01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	2.155.256.206,00	2.232.242.441,00	76.986.235,00
1.01.02.2 .02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	1.628.875.438,00	1.628.875.438,00	0,00
1.01.02.2 .02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	15 Satuan Pendidik an	86.243.250,00	86.243.250,00	0,00
1.01.02.2 .02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	103.472.500,00	103.472.500,00	0,00
1.01.02.2 .02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	15 Konten Digital	50.841.250,00	50.841.250,00	0,00

Kode	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD 2024	P-RKPD 2024	
1.01.02.2 .02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	414.344.000,00	414.344.000,00	0,00
1.01.02.2 .02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen	276.865.000,00	360.140.000,00	83.275.000,00
1.01.02.2 .03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00
1.01.02.2 .03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	219 Satuan Pendidik an	87.096.500,00	87.096.500,00	0,00
1.01.02.2 .03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	354.229.500,00	454.848.500,00	100.619.000,00
1.01.02.2 .03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6 Dokumen	126.995.000,00	126.995.000,00	0,00
1.01.02.2 .03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	213.145.000,00	213.145.000,00	0,00
1.01.02.2 .04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
DINAS KESEHATAN				232.277.000,00	232.277.000,00	0,00
1.02.02.2 .02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	57.937.000,00	57.937.000,00	0,00
1.02.02.2 .02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	66.202.000,00	66.202.000,00	0,00
1.02.02.2 .02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	100 Orang	47.215.000,00	47.215.000,00	0,00

Kode	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD 2024	P-RKPD 2024	
		Kesehatan Sesuai Standar				
1.02.02.2 .02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	8.337.500,00	8.337.500,00	0,00
1.02.02.2 .02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00
1.02.02.2 .02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	28.098.000,00	28.098.000,00	0,00
1.02.02.2 .02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	11.087.500,00	11.087.500,00	0,00
DINAS PUTR				1.692.175.000,00	1.692.175.000,00	0,00
1.03.03.2 .01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
1.03.03.2 .01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2 Liter/Detik	852.475.000,00	852.475.000,00	0,00
1.03.03.2 .01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
1.03.05.2 .01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5 M ³ /Hari	381.700.000,00	381.700.000,00	0,00
1.03.05.2 .01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	12 Rumah Tangga	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
1.03.05.2 .01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

Kode	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD 2024	P-RKPD 2024	
	Limbah Domestik (SPALD)	Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				
DINAS PERUMAHAN				250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.04.02.2 .01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00
1.04.02.2 .01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.04.02.2 .03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	205.900.000,00	205.900.000,00	0,00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN				191.702.500,00	173.702.500,00	-18.000.000,00
1.05.04.2 .01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.05.04.2 .01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	68.473.750,00	50.473.750,00	-18.000.000,00
1.05.04.2 .01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	19.505.000,00	19.505.000,00	0,00
1.05.04.2 .01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00

Kode	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD 2024	P-RKPD 2024	
1.05.04.2 .04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	28.473.750,00	28.473.750,00	0,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				254.200.000,00	254.200.000,00	0,00
1.05.03.2 .02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.05.03.2 .03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	150 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.05.03.2 .03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00
DINAS SOSIAL				125.000.000,00	473.799.500,00	348.799.500,00
1.06.04.2 .01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	85.000.000,00	116.499.500,00	31.499.500,00
1.06.04.2 .01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10.000.000,00	230.000.000,00	220.000.000,00
1.06.04.2 .01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.06.04.2 .01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Orang Orang	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00

Kode	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD 2024	P-RKPD 2024	
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.06.2 .01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
TOTAL				42.034.872.144,00	43.982.790.163,00	1.947.918.019,00

5.1.3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak Tahun 2024 di Kabupaten Maluku Tenggara, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menganggarkan Hibah Daerah. Hibah diberikan kepada pihak penyelenggara Pemilukada, dan aparat keamanan TNI–Polri.

Tabel 5.9
Penganggaran Hibah Daerah untuk Pemilukada Serentak
Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran APBD 2023	Anggaran APBD 2024	Total Anggaran Hibah
1	KPUD Kab.Maluku Tenggara	10.126.917.957,00	29.671.831.936,00	39.798.749.893,00
2	Bawaslu Kab.Maluku Tenggara	2.732.646.600,00	6.767.353.400,00	9.500.000.000,00
3	Polres Maluku Tenggara	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
4	Kodim 1503 Maluku Tenggara	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5	Lanud D.Dumatubun Langgur	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
6	Lanal Tual	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah		12.859.564.557,00	42.439.185.336,00	55.298.749.893,00

5.2. Belanja Pemenuhan Target Pembangunan Daerah

5.2.1. Pencapaian Target Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tabel 5.10
Pendanaan Kegiatan untuk Pencapaian Target Pembangunan Daerah
Tahun 2024

Sasaran	Program Prioritas	Anggaran APBD 2024	Anggaran P-RKPD 2024	OPD Pelaksana (penyelenggara urusan)
TUJUAN 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang harmonis, toleran dan berbudaya				
1.1. Meningkatnya kualitas kerukunan hidup masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	17.782.928.500,00	18.107.134.500,00	Unsur pendukung sekretariat daerah
1.2. Meningkatnya kualitas budaya daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	850.000.000,00	850.000.000,00	Bidang Urusan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	175.200.000,00	175.200.000,00	Bidang Urusan Kebudayaan
	Program Pelestraian dan pengelolaan Cagar Budaya	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	Bidang Urusan Kebudayaan
	Program Pemberdayaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Masyarakat	94.438.250,00	94.438.250,00	Bidang Urusan Pemerintahan Desa
1.3. Terjaganya Stabilitas politik, Keamanan dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	43.322.432.156,00	53.449.350.113,00	Badan Kesbangpol
	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	680.000.000,00	680.000.000,00	Badan Kesbangpol
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	124.500.000,00	124.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
TUJUAN 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat				
2.1. Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	82.540.964.848,00	86.659.058.957,00	Bidang Urusan Pendidikan
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	141.225.000,00	141.225.000,00	Bidang Urusan Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	857.072.000,00	857.072.000,00	Bidang Urusan Perpustakaan
2.2. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	37.853.855.532,00	52.101.094.292,00	Bidang Urusan Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan - (UPTD)	28.604.145.800,00	28.604.145.800,00	Bidang Urusan Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1.508.143.750,00	1.508.143.750,00	Bidang Urusan Kesehatan

Sasaran	Program Prioritas	Anggaran APBD 2024	Anggaran P-RKPD 2024	OPD Pelaksana (penyelenggara urusan)
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	108.723.500,00	108.723.500,00	Bidang Urusan Kesehatan
2.3. Meningkatnya Pendapatan riil masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	450.909.500,00	450.909.500,00	Bidang Urusan Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.520.327.000,00	6.520.327.000,00	Bidang Urusan Pertanian
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	455.154.996,00	455.154.996,00	Bidang Urusan Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	140.000.000,00	140.000.000,00	Bidang Urusan Pertanian
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.198.979.750,00	6.249.979.750,00	Bidang Urusan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.627.037.500,00	4.627.037.500,00	Bidang Urusan Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	649.970.000,00	649.970.000,00	Bidang Urusan Perikanan
TUJUAN 3: Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah				
3.1. Meningkatnya Perekonomian daerah	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.724.901.356,00	2.698.850.356,00	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSU/USP Koperasi	65.000.000,00	30.475.000,00	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	294.401.500,00	294.401.500,00	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	16.791.000,00	16.791.000,00	Bidang Urusan Perdagangan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.790.295.000,00	2.790.295.000,00	Bidang Urusan Perindustrian
	Program Promosi Penanaman Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	Bidang Urusan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	607.779.000,00	607.779.000,00	Bidang Urusan Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal	90.000.000,00	90.000.000,00	Bidang Urusan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	5.032.493.100,00	4.998.772.600,00	Bidang Urusan Pariwisata
	Program Pemasaran pariwisata	102.260.000,00	0,00	Bidang Urusan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.015.043.750,00	1.151.024.250,00	Bidang Urusan Pariwisata
3.2. Meningkatnya Kesempatan Kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	259.500.000,00	259.500.000,00	Bidang Urusan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	45.000.000,00	45.000.000,00	Bidang Urusan Tenaga Kerja

Sasaran	Program Prioritas	Anggaran APBD 2024	Anggaran P-RKPD 2024	OPD Pelaksana (penyelenggara urusan)
3.3. Terstabilnya inflasi daerah	Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting	386.109.000,00	386.109.000,00	Bidang Urusan Perdagangan
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	65.000.250,00	65.000.250,00	
TUJUAN 4: Meningkatkan kualitas pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan				
4.1. Menurunnya penduduk miskin	Program Pengembangan Perumahan	250.000.000,00	250.000.000,00	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	900.000.000,00	900.000.000,00	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	174.999.900,00	457.484.400,00	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penatagunaan Tanah	800.000.000,00	800.000.000,00	Bidang Urusan Pertanahan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.217.475.000,00	1.217.475.000,00	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			Bidang Urusan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	232.728.000,00	232.728.000,00	Bidang Urusan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	33.168.000,00	33.168.000,00	Bidang Urusan Pangan
	Program Pengawasan keamanan pangan	82.000.000,00	82.000.000,00	Bidang Urusan Pangan
	Program Rehabilitasi Sosial	195.000.000,00	446.499.500,00	Bidang Urusan Sosial
	Program Perlindungan Jaminan Sosial	218.201.000,00	168.201.000,00	Bidang Urusan Sosial
	Program Penanganan Bencana	80.000.500,00	30.000.000,00	Bidang Urusan Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlwan	95.000.000,00	95.000.000,00	Bidang Urusan Sosial
	Program pengendalian penduduk	60.000.000,00	60.000.000,00	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran	Program Prioritas	Anggaran APBD 2024	Anggaran P-RKPD 2024	OPD Pelaksana (penyelenggara urusan)
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	3.553.602.872,00	3.553.602.872,00	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	468.100.000,00	468.100.000,00	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1.685.799.750,00	1.685.799.750,00	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan	90.000.000,00	90.000.000,00	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	152.154.250,00	152.154.250,00	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	500.000.000,00	842.000.000,00	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pemenuhan hak anak	30.000.000,00	30.000.000,00	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.3. Meningkatnya Kualitas Pembangunan kewilayahan	Program pengelolaan perbatasan	285.219.750,00	285.219.750,00	Pengelolaan Perbatasan
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.206.525.625,00	1.206.525.625,00	Unsur Kewilayahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	858.205.476,00	858.205.750,00	Unsur Kewilayahan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	269.793.000,00	269.793.000,00	Unsur Kewilayahan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	621.330.000,00	621.330.000,00	Unsur Kewilayahan
4.4. Meningkatnya Pembangunan berbasis mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	473.742.800,00	473.742.800,00	Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	336.869.500,00	318.869.500,00	Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sasaran	Program Prioritas	Anggaran APBD 2024	Anggaran P-RKPD 2024	OPD Pelaksana (penyelenggara urusan)
4.5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	223.748.350,00	223.748.350,00	Bidang Urusan Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			Bidang Urusan Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan			Bidang Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	5.592.222.500,00	5.592.222.500,00	Bidang Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			Bidang Urusan Lingkungan Hidup
4.6. Meningkatnya arus penumpang/ barang dalam daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	60.455.703.006,00	60.630.703.006,00	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	91.000.000,00	91.000.000,00	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumberdaya Air	1.374.428.650,00	1.374.428.650,00	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	474.700.000,00	474.700.000,00	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.693.853.974,00	2.693.853.974,00	Bidang Urusan Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	6.601.453.998,00	6.601.453.998,00	
TUJUAN 5: Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih demokratis dan berlandaskan hukum				
5.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan berlandaskan hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	17.782.928.500,00	18.107.134.500,00	Urusan Penunjang Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.849.996.000	1.849.996.000	Urusan Penunjang Sekretariat Daerah
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.725.000.000,00	10.392.189.000,00	Urusan Penunjang Sekretariat DPRD
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	809.525.000,00	809.525.000,00	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
	Program Aplikasi Informatika	133.050.000,00	133.050.000,00	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	19.784.000,00	19.784.000,00	Bidang Urusan Statistik

Sasaran	Program Prioritas	Anggaran APBD 2024	Anggaran P-RKPD 2024	OPD Pelaksana (penyelenggara urusan)
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	27.021.000,00	27.021.000,00	Bidang Urusan Persandian
	Program Pengelolaan Arsip	29.150.000,00	29.150.000,00	Bidang Urusan Kearsipan
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.752.779.076,00	8.529.401.076,00	Unsur Penunjang Bidang Keuangan
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	940.000.000,00	940.000.000,00	Unsur Penunjang Bidang Keuangan
	Program pengelolaan pendapatan daerah	1.676.905.250,00	1.676.905.250,00	Unsur Penunjang Bidang Keuangan
	Program Kepegawaian Daerah	1.892.100.750,00	1.892.100.750,00	Unsur Penunjang Bidang Kepegawaian
	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah	2.025.008.250,00	2.025.008.250,00	Program Penunjang Urusan Perencanaan
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	999.992.000,00	999.992.000,00	Program Penunjang Urusan Perencanaan
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	Program Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	146.368.750,00	146.368.750,00	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.393.998.250,00	1.393.998.250,00	Unsur Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan dan Pendampingan dan Asistensi	422.249.000,00	422.249.000,00	Unsur Pengawasan
	Program Pendaftaran Penduduk	665.925.000,00	665.925.000,00	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	178.725.000,00	178.725.000,00	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran	Program Prioritas	Anggaran APBD 2024	Anggaran P-RKPD 2024	OPD Pelaksana (penyelenggara urusan)
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.000.000,00	30.000.000,00	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	345.949.315.641	344.553.737.434	Semua PD

5.2.2. Pendanaan Tematik Pembangunan Daerah

5.2.2.01. Penurunan Stunting

Intervensi kegiatan untuk penurunan stunting dilaksanakan melalui koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Maluku Tenggara. TPPS dibentuk dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 364 Tahun 2024.

Intervensi dilaksanakan terbagi atas dua jenis, yaitu: Intervensi Spesifik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, serta Intervensi Gizi Sensitif oleh perangkat daerah lainnya. Uraian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka Penurunan Stunting di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.11
Pendanaan Program dan Kegiatan Penurunan Stunting
Tahun 2024

NO.		ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD 2024	P-RKPD 2024	
1	KESEHATAN			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64.437.250.009	78.684.488.769	14.247.238.760
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.508.143.750	1.508.143.750	0
	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.553.602.872	3.553.602.872	0
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.515.900.000	1.515.900.000	0
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
3	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Perlindungan Hak Anak (PHA)	30.000.000,00	30.000.000,00	0
	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	152.154.250,00	152.154.250,00	0
	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.217.475.000,00	1.217.475.000,00	0

NO.		ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD 2024	P-RKPD 2024	
	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	474.700.000,00	474.700.000,00	0
	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	91.000.000,00	91.000.000,00	0
	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
5	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Program Pengembangan Perumahan	250.000.000,00	250.000.000,00	0
	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	900.000.000,00	900.000.000,00	0
	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	174.999.900,00	457.484.400,00	282.484.500
	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
6	PANGAN			
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	232.728.000,00	232.728.000,00	0
	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
7	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.198.979.750,00	6.249.979.750,00	51.000.000
	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.627.037.500,00	4.627.037.500,00	0
	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
8	UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN			
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	59.476.000,00	59.476.000,00	0
	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			

5.2.2.02. Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Penghapusan Kemiskinan Ekstrim merupakan salah satu target pembangunan nasional sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersinergi untuk penghapusan kemiskinan ekstrim. Intervensi daerah untuk penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Strategi nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: 1) meningkatkan pendapatan; 2) mengurangi beban pengeluaran dan 3) menghapus kantong-kantong kemiskinan.

Ketiga strategi dimaksud dielaborasi ke dalam intervensi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 5.12
Pendanaan Program dan Kegiatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD 2024	P-RKPD 2024	
DINAS PENDIDIKAN		39.909.106.199	40.987.274.604	1.078.168.405
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.022.989.698	2.815.346.868	792.357.170
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.734.930.000	15.734.930.000	0,00
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	63.519.415	63.519.415	0,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.155.256.206	2.232.242.441	76.986.235
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.254.285.442	3.463.110.442	208.825.000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.628.875.438	1.628.875.438	0,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.181.950.000	9.181.950.000	0,00
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.339.000.000	3.339.000.000	0,00
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.528.300.000	2.528.300.000	0,00
DINAS KESEHATAN		6.105.249.850	6.105.249.850	0,00
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	43.125.000	43.125.000	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.937.000	57.937.000	0,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	66.202.000	66.202.000	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.215.000	47.215.000	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.337.500	8.337.500	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	0	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.400.000	13.400.000	0,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	28.098.000	28.098.000	0,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.087.500	11.087.500	0,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.307.500	50.307.500	0,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	35.700.000	35.700.000	0,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	11.190.000	11.190.000	0,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24.633.750	24.633.750	0,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.708.016.600	5.708.016.600	0,00
UPTD PUSKESMAS		4.403.829.352	4.403.829.352	0,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.403.829.352	4.403.829.352	0,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		1.131.002.000	1.131.002.000	0,00
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	185.527.000	185.527.000	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD 2024	P-RKPD 2024	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	852.475.000	852.475.000	0,00
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	43.000.000	43.000.000	0,00
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.000.000	50.000.000	0,00
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		1.270.538.400	1.553.022.900	282.484.500
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	205.900.000	205.900.000	0,00
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	900.000.000	900.000.000	0,00
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10.000.000	10.000.000	0,00
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	154.638.400	437.122.900	282.484.500
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		204.200.000	204.200.000	0,00
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	0,00
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	54.200.000	54.200.000	0,00
DINAS SOSIAL		100.000.000	100.000.000	0,00
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	0,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		149.375.000	149.375.000	0,00
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	50.000.000	50.000.000	0,00
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	34.368.750	34.368.750	0,00
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	45.000.000	45.000.000	0,00
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20.006.250	20.006.250	0,00
DINAS KETAHANAN PANGAN		83.168.000	83.168.000	0,00
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.000.000	50.000.000	0,00
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	33.168.000	33.168.000	0,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		208.725.000	208.725.000	0,00
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	178.725.000	178.725.000	0,00
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	30.000.000	30.000.000	0,00
DINAS PERHUBUNGAN		2.648.853.974	2.648.853.974	0,00
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.648.853.974	2.648.853.974	0,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		40.000.000	13.949.000	-26.051.000
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	40.000.000	13.949.000	-26.051.000
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH		175.200.000	175.200.000	0,00
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	175.200.000	175.200.000	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD 2024	P-RKPD 2024	
DINAS PERIKANAN		11.330.987.250	11.381.987.250	51.000.000
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	6.023.979.750	6.074.979.750	51.000.000
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	31.535.000	31.535.000	0,00
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	38.465.000	38.465.000	0,00
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000	50.000.000	0,00
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	19.723.000	19.723.000	0,00
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	55.277.000	55.277.000	0,00
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0,00
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.412.037.500	4.412.037.500	0,00
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0,00
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	599.970.000	599.970.000	0,00
DINAS PERTANIAN		7.185.914.996	7.185.914.996	0,00
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	149.925.000	149.925.000	0,00
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	60.508.000	60.508.000	0,00
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.520.327.000	6.520.327.000	0,00
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	455.154.996	455.154.996	0,00
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		285.100.000	285.100.000	0,00
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	259.500.000	259.500.000	0,00
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.600.000	25.600.000	0,00
JUMLAH ANGGARAN PENURUNAN KEMISKINAN EKSTRIM		75.231.250.021	76.616.851.926	

5.2.2.03. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi menjadi salah satu isu strategis secara nasional. Setelah pandemi Covid-19, perekonomian global bergerak menuju pemulihan dengan salah satu variable kunci pertumbuhan adalah pengendalian harga-harga. Aspek pasokan dan distribusi barang dipastikan terkendali dan lancar guna menjawab permintaan pasar yang semakin bertumbuh sejalan dengan perbaikan ekonomi global.

Pengendalian inflasi di Indonesia dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Strategi utama pengendalian inflasi mencakup 4 (empat) hal, yaitu: 1) Ketersediaan Stok; 2) Keterjangkauan harga; 3) kelancaran distribusi dan 4) komunikasi efektif.

Strategi pengendalian inflasi dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara dengan elaborasi ke dalam intervensi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 5.13
Pendanaan Program dan Kegiatan Pengendalian Inflasi Tahun 2024

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	APBD 2024	P-RKPD 2024	
PERDAGANGAN			
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	386.109.000,00	386.109.000,00	0,00
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	65.000.250,00	65.000.250,00	0,00
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
PANGAN			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	232.728.000,00	232.728.000,00	0,00
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	33.168.000,00	33.168.000,00	0,00
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			
SEKRETARIAT DAERAH			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
UNSUR PENUNJANG - PERENCANAAN			
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
PERIKANAN			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	649.970.000,00	649.970.000,00	0,00
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
PERTANIAN			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	450.909.500,00	450.909.500,00	0,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	APBD 2024	P-RKPD 2024	
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.520.327.000,00	6.520.327.000,00	0,00
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
PERHUBUNGAN			
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.693.853.974,00	2.693.853.974,00	0,00
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			

5.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

5.3.1. Jalan Trans Pulau Kei Besar

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, maka Jalan Trans Pulau Kei Besar di Kabupaten Maluku Tenggara ditetapkan sebagai Major Project RPJMN untuk penangnana tahun 2020 s.d 2024.

Perencanaan untuk Jalan Trans Pulau Kei Besar beserta realisasi sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut.

Gambar 5.1
Major Project Jalan Trans Pulau Kei Besar
RPJMN 2020-2024

JALAN TRANS PULAU KEI BESAR

Major Project RPJMN 2020 - 2024

JALAN TRANS PULAU KEI BESAR					
• Dasar Hukum	: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020				
• Nama Major Project	: Jalan Trans Pada Pulau Kecil Terluar				
• Lokasi	: Pulau Nuhu Yut, Kab.Maluku Tenggara				
• Panjang Intervensi	: 101,6 Km				
• Intervensi Tahunan	2020	2021	2022	2023	2024
	15,5Km	22,8Km	21,9Km	21,3Km	20,1Km
• Anggaran	: <u>Rp1.274.200.000.000,00</u>				

REALISASI PENANGANAN SAMPAI TAHUN 2023 SEBESAR 53,18 PERSEN SEPANJANG 54,04KM DARI TARGET 101,6KM

2020		2021		2022		2023	
• APBD I	2,40	• APBN	4,00	• APBN	13,00	• DAK	8,67
		• DAK	3,20	• DAK	7,57		
		• APBD I	0,80	• Pinjaman	14,40		
Jumlah	2,40	Jumlah	8,00	Jumlah	34,97	Jumlah	8,67

➢ Total Penanganan Selama 4 (empat) Tahun sepanjang **54,04 Km, atau 53,18 Persen** dari Target;

➢ Masih diperlukan penanganan sepanjang 47,56Km untuk mencapai target 101,6Km;

Dari target sepanjang 101,6Km, telah terealisasi sepanjang 54,04Km atau sebesar 53,18 persen. Sumber dana yang digunakan dalam penanganan Jalan Trans antara lain berasal dari DAK Fisik

Jalan, APBD Provinsi Maluku dan APBN, melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku. Masih dibutuhkan penanganan sepanjang 47,56Km pada tahun 2024.

Pengusulan untuk penanganan Jalan Trans Pulau Kei Besar melalui dana APBN dan DAK Bidang Jalan.

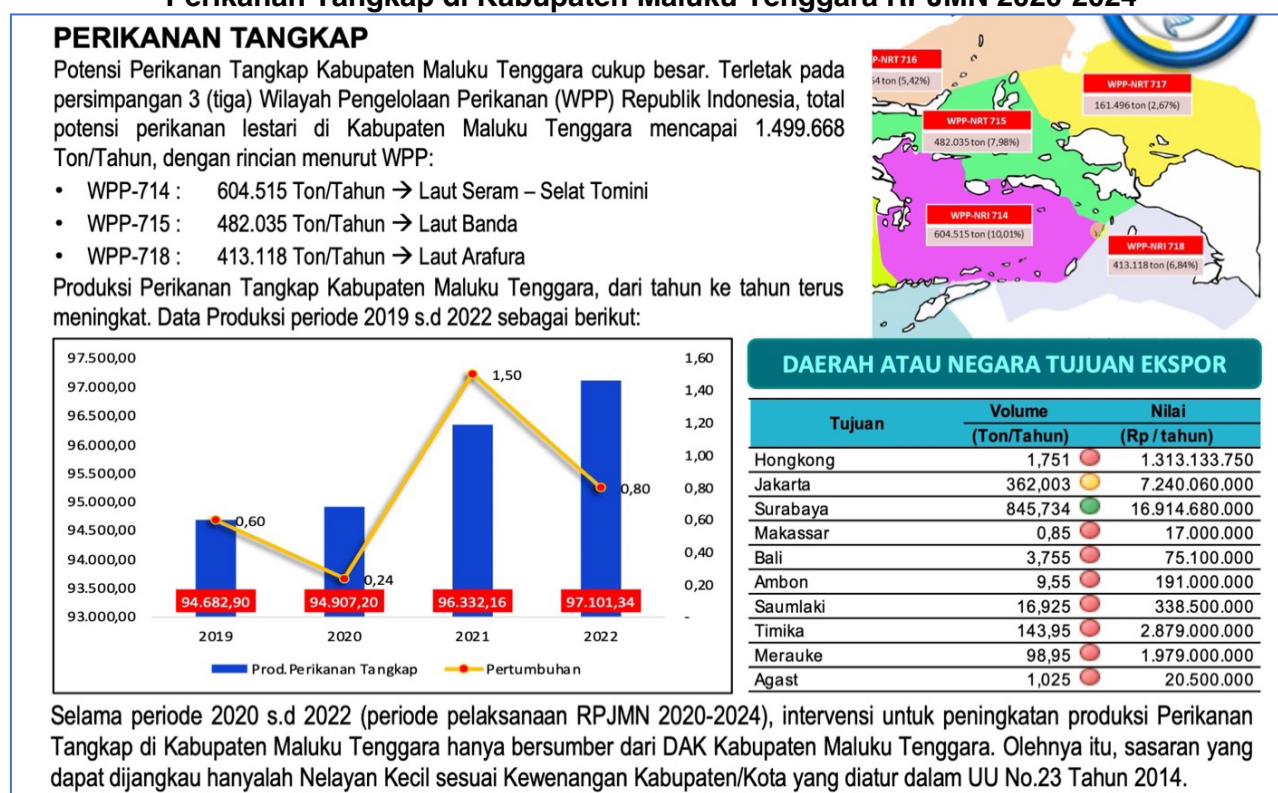
5.3.2. Pengelolaan Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap menjadi salah satu sektor potensial di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini didorong oleh posisi strategis Kabupaten Maluku Tenggara yang terletak di persimpangan 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

WPP Republik Indonesia yang beririsan secara langsung dengan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yaitu: 1) WPP 714 (Laut Banda); 2) WPP 715 (Laut Seram); dan WPP 718 (Laut Arafura).

Gambaran pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut.

Gambar 5.2
Proyek Prioritas RPJMN Peningkatan Produktivitas
Perikanan Tangkap di Kabupaten Maluku Tenggara RPJMN 2020-2024



5.3.3. Modeling Budidaya Rumput Laut

Kabupaten Maluku Tenggara ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya sesuai amanat Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2023. Jenis Komoditi Perikanan Budidaya yang difokuskan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah Rumput Laut. Lebih lanjut dalam Tahun 2023, Kabupaten Maluku Tenggara juga ditetapkan sebagai lokasi Modeling Pengembangan Rumput Laut. Intervensi pembangunan kawasan modelling Rumput Laut melalui Dana APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 5.14
Pendanaan Program dan Kegiatan Menunjang Prioritas Nasional
Tahun 2024

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	FOKUS DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN	OPD PELAKSANA
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	☐ Peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ☐ Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA ☐ Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
			☐ Peningkatan produktivitas pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ☐ Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ☐ Pengembangan Prasarana Pertanian PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN ☐ Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
			☐ Operasi Pasar dan pengawasan barang beredar	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN ☐ Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING ☐ Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perindagnaker
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur dan Konektivitas	☐ Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN ☐ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUTR
			☐ Penataan permukiman kawasan perkotaan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	FOKUS DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN	OPD PELAKSANA
				☐ Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			☐ Pengawasan angkutan dan layanan terminal, dermaga serta bandara	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ☐ Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN ☐ Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Dinas Perhubungan
			☐ Peningkatan jangkauan jaringan telepon seluler dan internet	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK ☐ Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	☐ Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ☐ Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
			☐ Peningkatan kapasitas sarana prasarana pendidikan SD dan SMP	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ☐ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar ☐ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
			☐ Peningkatan minat baca masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN ☐ Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			☐ Penguatan Sumber Daya Kesehatan (SDM, Alkes dan Obat)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ☐ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ☐ Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	FOKUS DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN	OPD PELAKSANA
				☐ Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			☐ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ☐ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			☐ Pemasyarakatan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN ☐ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ☐ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ☐ Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	☐ Peningkatan Bina Mental dan Spiritual	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ☐ Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			☐ Pembinaan karakter Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN ☐ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga
			☐ Pengembangan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ☐ Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan
			☐ Pengembangan Kesenian Tradisional	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL ☐ Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan
			☐ Pengelolaan Cagar Budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA ☐ Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan
5		Penurunan Angka Kemiskinan	☐ Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan KPP

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	FOKUS DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			☐ Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN ☐ Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			☐ Perluasan Akses Air Minum, Sanitasi dan Listrik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ☐ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH ☐ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUTR
			☐ Pembangunan Jalan Desa Strategis	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN ☐ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUTR
			☐ Penyediaan Moda Transportasi Perdesaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ☐ Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	☐ Mitigasi bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ☐ Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota ☐ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			☐ Penguatan SDM dan Kelembagaan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT ☐ Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			☐ Penanganan Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN ☐ Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	FOKUS DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN	OPD PELAKSANA
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan	☐ Deteksi dini dan pendegahan potensi gangguan Kamtibmas	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ☐ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
			☐ Penanganan Gangguan		
			☐ Dukungan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK ☐ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kesbangpol

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 ini disusun untuk mengakomodir segala perkembangan yang tidak sesuai pada tahun berjalan dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024.

Perubahan RKPD ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir keadaan yang diluar prediksi, meliputi keadaan bencana sosial dan alam, perubahan regulasi maupun kebutuhan penting dan mendesak yang perlu dan wajib untuk dianggarkan dalam tahun 2024. Selain itu, kebijakan dalam penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 harus digunakan untuk mendanai kebutuhan pembiayaan dalam tahun 2024, termasuk mengakomodir kewajiban penganggaran hibah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2024 ini.

Perubahan RKPD selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di akhir tahun anggaran. Sekiranya terdapat kekeliruan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Langgur, Agustus 2024
Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

Drs. JASMONO, M.Si

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan			
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	119.158.025,00	119.158.025,00
1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	55.040.130,00	125.636.392,00	70.596.262,00
1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.022.989.698,00	2.815.346.868,00	792.357.170,00
1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	779.225.600,00	1.190.788.325,00	411.562.725,00
1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	556.709.126,00	556.709.126,00	0,00
1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	330.701.063,00	330.701.063,00	0,00
1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	341.497.000,00	341.497.000,00	0,00
1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	26.459.919.000,00	27.816.157.284,00	1.356.238.284,00
1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	0,00
1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.734.930.000,00	15.734.930.000,00	0,00
1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	349.854.000,00	349.854.000,00	0,00
1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	96.295.500,00	96.295.500,00	0,00
1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	464.740.250,00	464.740.250,00	0,00
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	504.299.250,00	504.299.250,00	0,00
1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	63.519.415,00	63.519.415,00	0,00
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.155.256.206,00	2.232.242.441,00	76.986.235,00
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		78.221.482,00	78.221.482,00
1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	643.679.000,00	671.232.670,00	27.553.670,00
1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	0,00	538.798.296,00	538.798.296,00
1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.691.160.640,00	1.754.594.990,00	63.434.350,00
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.254.285.442,00	3.463.110.442,00	208.825.000,00
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.628.875.438,00	1.628.875.438,00	0,00
1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	344.485.000,00	667.574.620,00	323.089.620,00
1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	163.211.500,00	163.211.500,00	0,00
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	86.243.250,00	86.243.250,00	0,00
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.181.950.000,00	9.181.950.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	103.472.500,00	103.472.500,00	0,00
1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.841.250,00	50.841.250,00	0,00
1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	414.344.000,00	414.344.000,00	0,00
1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	276.865.000,00	360.140.000,00	83.275.000,00
1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	83.275.000,00	0,00	-83.275.000,00
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.093.681.840,00	1.117.054.830,00	23.372.990,00
1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		27.900.000,00	27.900.000,00
1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	87.096.500,00	87.096.500,00	0,00
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.339.000.000,00	3.339.000.000,00	0,00
1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00
1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	354.229.500,00	454.848.500,00	100.619.000,00
1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	126.995.000,00	126.995.000,00	0,00
1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100.619.000,00	0,00	-100.619.000,00
1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	213.145.000,00	213.145.000,00	0,00
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.528.300.000,00	2.528.300.000,00	0,00
1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	216.433.750,00	216.433.750,00	0,00
1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	117.800.000,00	117.800.000,00	0,00
1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			0,00
1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	141.225.000,00	141.225.000,00	0,00
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.571.500,00	42.571.500,00	0,00
1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.118.750,00	45.118.750,00	0,00
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	105.409.084.994,00	94.581.725.577,00	-10.827.359.417,00
1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.287.500,00	9.287.500,00	0,00
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.003.750,00	7.003.750,00	0,00
1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.187.500,00	7.187.500,00	0,00
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.225.000,00	29.225.000,00	0,00
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.875.000,00	34.875.000,00	0,00
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.779.000,00	55.779.000,00	0,00
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.612.500,00	42.612.500,00	0,00
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.405.000,00	37.405.000,00	0,00
1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00
1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.787.500,00	78.787.500,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	14.247.238.760,00	14.247.238.760,00
1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	77.137.250,00	660.259.750,00	583.122.500,00
1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.018.129.300,00	2.098.176.540,00	1.080.047.240,00
1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14.075.555.000,00	14.075.555.000,00	0,00
1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	107.247.750,00	107.247.750,00	0,00
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	33.896.000,00	33.896.000,00	0,00
1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	43.125.000,00	43.125.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	75.938.750,00	75.938.750,00	0,00
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.937.000,00	57.937.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	66.202.000,00	66.202.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.215.000,00	47.215.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.337.500,00	8.337.500,00	0,00
1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	28.098.000,00	28.098.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.087.500,00	11.087.500,00	0,00
1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	14.037.500,00	14.037.500,00	0,00
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	58.184.000,00	58.184.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.307.500,00	50.307.500,00	0,00
1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	44.634.500,00	145.097.440,00	100.462.940,00
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	59.910.500,00	59.910.500,00	0,00
1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	11.190.000,00	11.190.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24.633.750,00	24.633.750,00	0,00
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.708.016.600,00	5.708.016.600,00	0,00
1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	8.644.674.000,00	8.644.674.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	373.000.000,00	373.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	251.600.000,00	251.600.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	435.367.800,00	435.367.800,00	0,00
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	16.962.500,00	16.962.500,00	0,00
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	17.687.500,00	17.687.500,00	0,00
1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	379.832.000,00	454.832.000,00	75.000.000,00
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	5.730.215.082,00	3.891.582.402,00	-1.838.632.680,00
1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	134.446.250,00	134.446.250,00	0,00
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	247.843.750,00	247.843.750,00	0,00
1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.067.000.000,00	1.067.000.000,00	0,00
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	59.098.500,00	59.098.500,00	0,00
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	49.625.000,00	49.625.000,00	0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	38.026.250,00	38.026.250,00	0,00
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.950.856.050,00	1.950.856.050,00	0,00
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.070.500,00	39.070.500,00	0,00
1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.692.500,00	37.692.500,00	0,00
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.654.217.977,00	69.493.653.345,00	3.839.435.368,00
1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00
1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	151.325.000,00	151.325.000,00	0,00
1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36.550.000,00	36.550.000,00	0,00
1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	79.865.000,00	79.865.000,00	0,00
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94.971.250,00	94.971.250,00	0,00
1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.362.500,00	84.362.500,00	0,00
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.496.000,00	226.496.000,00	0,00
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00
1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.490.000,00	25.490.000,00	0,00
1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
1.02.0.00.0.00.02.0201 Puskesmas Ohoijang Watdek			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	925.200.000,00	925.200.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0202 Puskesmas Kolser			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	371.000.000,00	371.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	924.750.000,00	924.750.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0203 Puskesmas Ibra			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	776.033.000,00	776.033.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0204 Puskesmas Debut			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	323.000.000,00	323.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	838.400.000,00	838.400.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0205 Puskesmas Rumat			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.164.100.000,00	1.164.100.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0206 Puskesmas Dandar			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	978.600.000,00	978.600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0207 Puskesmas Ohoira			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.139.273.000,00	1.139.273.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0208 Puskesmas Elat			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.534.550.000,00	1.534.550.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0209 Puskesmas Watsin			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.313.099.375,00	1.313.099.375,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0210 Puskesmas Ohoiei			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	923.600.000,00	923.600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0211 Puskesmas Mataholat			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	884.735.000,00	884.735.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0212 Puskesmas Mun			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.335.242.000,00	1.335.242.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0213 Puskesmas Hoor			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.209.400.000,00	1.209.400.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
1.02.0.00.0.00.02.0214 Puskesmas Weduar			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.217.100.000,00	1.217.100.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0215 Puskesmas Larat Kei			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.019.050.000,00	1.019.050.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0216 Puskesmas Fer			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	74.829.352,00	74.829.352,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.317.150.000,00	1.317.150.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0217 Puskesmas Hollat			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.202.800.000,00	1.202.800.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0218 Puskesmas Banda Ely			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.390.542.750,00	1.390.542.750,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0219 RSUD Karel Sadsuitubun Langgur			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.060.507.823,00	1.060.507.823,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	80.312.500,00	80.312.500,00	0,00
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	879.931.000,00	879.931.000,00	0,00
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.395.960.000,00	1.395.960.000,00	0,00
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	945.740.000,00	945.740.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0221 Puskesmas Wab			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.140.200.000,00	1.140.200.000,00	0,00
1.03.3.29.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	162.900.000,00	162.900.000,00	0,00
1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.016.001.650,00	1.016.001.650,00	0,00
1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	185.527.000,00	185.527.000,00	0,00
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	852.475.000,00	852.475.000,00	0,00
1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	381.700.000,00	381.700.000,00	0,00
1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.206.433.750,00	2.153.950.000,00	-52.483.750,00
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	85.107.900,00	85.107.900,00	0,00
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	247.350.000,00	247.350.000,00	0,00
1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2.333.953.600,00	2.333.953.600,00	0,00
1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	131.092.768,00	131.092.768,00	0,00
1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	298.519.652,00	298.519.652,00	0,00
1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	704.925.600,00	704.925.600,00	0,00
1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	3.491.570.000,00	3.491.570.000,00	0,00
1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	53.914.194.224,00	54.074.530.824,00	160.336.600,00
1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.581.294.181,00	1.595.957.581,00	14.663.400,00
1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	179.200.000,00	179.200.000,00	0,00
1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	36.799.349,00	36.799.349,00	0,00
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	179.200.000,00	179.200.000,00	0,00
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.320.260,00	66.320.260,00	0,00
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.872.574.915,00	3.889.339.647,00	16.764.732,00
1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00
1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.150.430,00	46.150.430,00	0,00
1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.867.097,00	44.867.097,00	0,00
1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	27.367.097,00	27.367.097,00	0,00
1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.000.000,00	233.483.750,00	52.483.750,00
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.980.000,00	168.980.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.639.500,00	47.639.500,00	0,00
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.223.482,00	45.223.482,00	0,00
1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00
1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.878.384,00	24.878.384,00	0,00
1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.522.500,00	9.522.500,00	0,00
1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.163.500,00	8.163.500,00	0,00
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2.379.999.550,00	2.379.999.550,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00
1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	205.900.000,00	205.900.000,00	0,00
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	154.638.400,00	437.122.900,00	282.484.500,00
1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10.361.500,00	10.361.500,00	0,00
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.063.227.900,00	1.966.006.447,00	-97.221.453,00
1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.843.750,00	3.843.750,00	0,00
1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.029.250,00	57.029.250,00	0,00
1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.031.500,00	32.031.500,00	0,00
1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.436.000,00	158.436.000,00	0,00
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	39.875.000,00	39.875.000,00	0,00
1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00
1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.887.500,00	18.887.500,00	0,00
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.020.000,00	16.020.000,00	0,00
1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.403.000,00	20.403.000,00	0,00
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			
2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.10.07.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran			
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.473.750,00	50.473.750,00	-18.000.000,00
1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	19.505.000,00	19.505.000,00	0,00
1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	87.270.750,00	87.270.750,00	0,00
1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	36.799.750,00	36.799.750,00	0,00
1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran			
1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	21.096.500,00	21.096.500,00	0,00
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	28.473.750,00	28.473.750,00	0,00
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.400.000,00	45.000.000,00	-2.400.000,00
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.162.500,00	4.162.500,00	0,00
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.931.750,00	47.931.750,00	0,00
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.420.750,00	29.420.750,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.503.000,00	248.503.000,00	0,00
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00
1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.042.500,00	56.042.500,00	0,00
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.110.000,00	113.110.000,00	0,00
1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	40.400.000,00	20.400.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	219.542.800,00	219.542.800,00	0,00
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.206.128.431,00	2.278.227.170,00	72.098.739,00
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.483.250,00	50.483.250,00	0,00
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.210.500,00	41.210.500,00	0,00
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.725.000,00	154.725.000,00	0,00
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.102.500,00	30.102.500,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.718.750,00	150.718.750,00	0,00
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.025.000,00	39.025.000,00	0,00
1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.600.000,00	18.412.500,00	-6.187.500,00
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	72.219.750,00	32.219.750,00
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.600.000,00	9.450.000,00	-36.150.000,00
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.400.000,00	37.400.000,00	-28.000.000,00
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.253.500,00	20.253.500,00	-14.000.000,00
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.692.388.735,00	3.708.632.479,00	16.243.744,00
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	172.244.000,00	22.244.000,00
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.178.000,00	95.053.000,00	44.875.000,00
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5.05.02.2.01.0006 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	175.400.000,00	175.400.000,00	0,00
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Daerah			
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	31.499.500,00	0,00	-31.499.500,00
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00
1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	85.000.000,00	116.499.500,00	31.499.500,00
1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.000,00	230.000.000,00	220.000.000,00
1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		90.000.000,00	90.000.000,00
1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		7.300.000,00	7.300.000,00
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000,00	2.700.000,00	-7.300.000,00
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	75.201.000,00	75.201.000,00	0,00
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50.000.500,00	0,00	-50.000.500,00
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	90.500.000,00	90.500.000,00	0,00
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.548.526.635,00	2.709.483.260,00	160.956.625,00
1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.582.000,00	0,00	-43.582.000,00
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.799.000,00	151.799.000,00	0,00
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.250.000,00	37.500.000,00	-48.750.000,00
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.667.500,00	0,00	-27.667.500,00
1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00
1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.390.500,00	34.390.500,00	0,00
1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.760.000,00	22.760.000,00	0,00
1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
1.06.01.2.13 Penataan Organisasi			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1.06.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	17.154.250,00	17.154.250,00	0,00
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.467.100.178,00	1.990.649.141,00	-476.451.037,00
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa			
2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	34.368.750,00	34.368.750,00	0,00
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	29.432.000,00	29.432.000,00	0,00
2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20.006.250,00	20.006.250,00	0,00
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.508.000,00	12.508.000,00	0,00
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.437.500,00	30.437.500,00	0,00
2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.058.750,00	77.058.750,00	0,00
2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.160.000,00	153.160.000,00	0,00
2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00
2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.911.250,00	57.911.250,00	0,00
2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00
2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.392.000,00	16.392.000,00	0,00
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	342.000.000,00	0,00	-342.000.000,00
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	842.000.000,00	342.000.000,00
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
2.13.04.2.01.0012 Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	201.130.202.500,00	201.130.202.500,00	0,00
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.001.500,00	37.001.500,00	0,00
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5.05.02.2.01.0010 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.05.02.2.01.0011 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan			
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	50.438.000,00	50.438.000,00	0,00
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	33.168.000,00	33.168.000,00	0,00
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.103.500,00	1.103.500,00	0,00
2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.296.500,00	1.296.500,00	0,00
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.562.000,00	149.562.000,00	0,00
2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.110.000,00	40.110.000,00	0,00
2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.392.000,00	16.392.000,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup			
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	73.606.750,00	73.606.750,00	0,00
2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	104.548.000,00	104.548.000,00	0,00
2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	45.593.600,00	45.593.600,00	0,00
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			
2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	890.971.000,00	890.971.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00
2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	4.543.751.500,00	4.543.751.500,00	0,00
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.952.250,00	4.952.250,00	0,00
2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.960.750,00	13.960.750,00	0,00
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.038.560.567,00	2.009.956.094,00	-28.604.473,00
2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.138.750,00	4.138.750,00	0,00
2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.981.000,00	37.981.000,00	0,00
2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.105.500,00	33.105.500,00	0,00
2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	46.875.000,00	46.875.000,00	0,00
2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.125.000,00	56.125.000,00	0,00
2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00
2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.993.750,00	49.993.750,00	0,00
2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.207.500,00	48.207.500,00	0,00
2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00
2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.530.000,00	14.530.000,00	0,00
2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.356.000,00	13.356.000,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	141.825.000,00	141.825.000,00	0,00
2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	488.050.000,00	488.050.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	36.050.000,00	36.050.000,00	0,00
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			
2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	178.725.000,00	178.725.000,00	0,00
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.229.528.548,00	1.920.370.534,00	-309.158.014,00
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.118.750,00	10.118.750,00	0,00
2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.591.250,00	73.591.250,00	0,00
2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.721.000,00	14.721.000,00	0,00
2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.716.000,00	211.716.000,00	0,00
2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00
2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.005.000,00	140.005.000,00	0,00
2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00
2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159.905.050,00	159.905.050,00	0,00
2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.705.000,00	33.705.000,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.634.086.328,00	1.726.238.274,00	92.151.946,00
2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00
2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.058.000,00	26.058.000,00	0,00
2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.024.000,00	15.024.000,00	0,00
2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.538.000,00	172.538.000,00	0,00
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00
2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.747.500,00	73.747.500,00	0,00
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.612.500,00	94.612.500,00	0,00
2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00
2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.145.000,00	29.145.000,00	0,00
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	467.500.000,00	467.500.000,00	0,00
2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00
2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	694.800.000,00	694.800.000,00	0,00
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	311.953.000,00	311.953.000,00	0,00
2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	197.899.561,00	197.899.561,00	0,00
2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	105.200.311,00	105.200.311,00	0,00
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.153.250.000,00	1.153.250.000,00	0,00
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.215.900.000,00	1.215.900.000,00	0,00
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5.05.02.2.02.0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.648.853.974,00	2.648.853.974,00	0,00
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6.601.453.998,00	6.601.453.998,00	0,00
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.244.064.466,00	2.154.533.574,00	-89.530.892,00
2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.499.750,00	7.499.750,00	0,00
2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.773.000,00	82.773.000,00	0,00
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.800.000,00	107.800.000,00	0,00
2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.999.750,00	14.999.750,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	97.025.000,00	97.025.000,00	0,00
2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	92.500.000,00	92.500.000,00	0,00
2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	91.550.000,00	91.550.000,00	0,00
2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.037.475.132,00	1.967.578.882,00	-69.896.250,00
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.987.500,00	3.987.500,00	0,00
2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.095.750,00	53.095.750,00	0,00
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.977.500,00	31.977.500,00	0,00
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.482.000,00	192.482.000,00	0,00
2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.217.500,00	17.217.500,00	0,00
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.417.000,00	44.417.000,00	0,00
2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.784.000,00	19.784.000,00	0,00
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	27.021.000,00	27.021.000,00	0,00
2.17.0.00.0.00.11.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000,00	30.475.000,00	-34.525.000,00
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	294.401.500,00	294.401.500,00	0,00
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	40.000.000,00	13.949.000,00	-26.051.000,00
2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.644.901.356,00	2.644.901.356,00	0,00
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.785.000,00	44.785.000,00	0,00
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.772.852.431,00	1.633.035.464,00	-139.816.967,00
2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.998.750,00	39.998.750,00	0,00
2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.003.500,00	35.003.500,00	0,00
2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	210.576.000,00	60.576.000,00
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.090.000,00	28.090.000,00	0,00
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.305.000,00	45.305.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.617.500,00	33.617.500,00	0,00
2.18.0.00.0.00.12.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	88.530.000,00	88.530.000,00	0,00
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	324.612.000,00	324.612.000,00	0,00
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	194.637.000,00	194.637.000,00	0,00
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.965.044.934,00	2.772.628.936,00	-192.415.998,00
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.873.000,00	60.873.000,00	0,00
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00
2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.815.000,00	141.815.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.960.200,00	150.960.200,00	0,00
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00
2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.814.750,00	27.814.750,00	0,00
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00
2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00
2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.18.01.2.13 Penataan Organisasi			
2.18.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	36.630.000,00	36.630.000,00	0,00
2.19.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah			
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
2.19.02.2.01.0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	275.200.000,00	275.200.000,00	0,00
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.19.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	65.800.000,00	65.800.000,00	0,00
2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	199.999.750,00	199.999.750,00	0,00
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00	0,00
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.702.624.396,00	1.531.681.230,00	-170.943.166,00
2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.328.750,00	31.328.750,00	0,00
2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.002.000,00	30.002.000,00	0,00
2.19.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.791.000,00	166.791.000,00	0,00
2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	52.350.000,00	52.350.000,00	0,00
2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.575.000,00	70.575.000,00	0,00
2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00
2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.842.700,00	27.842.700,00	0,00
2.22.0.00.0.00.16.0000 Dinas Kebudayaan Daerah			
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	173.890.000,00	173.890.000,00	0,00
2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	260.200.000,00	260.200.000,00	0,00
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.965.504.149,00	1.675.020.304,00	-290.483.845,00
2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00
2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2.22.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82.268.750,00	82.268.750,00	0,00
2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.006.250,00	40.006.250,00	0,00
2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.22.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	34.397.000,00	34.397.000,00	0,00
2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.987.750,00	149.987.750,00	0,00
2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	49.750.000,00	49.750.000,00	0,00
2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.603.125,00	9.603.125,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.991.000,00	19.991.000,00	0,00
2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.925.000,00	9.925.000,00	0,00
2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah			
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	273.972.000,00	273.972.000,00	0,00
2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00
2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	78.200.000,00	78.200.000,00	0,00
2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.400.000,00	85.400.000,00	0,00
2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.23.02.2.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.178.500,00	9.178.500,00	0,00
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.598.615.816,00	1.482.522.147,00	-116.093.669,00
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.209.000,00	22.209.000,00	0,00
2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.235.000,00	30.235.000,00	0,00
2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.23.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.984.000,00	9.984.000,00	0,00
2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.325.000,00	143.325.000,00	0,00
2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.962.500,00	60.962.500,00	0,00
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.187.500,00	68.187.500,00	0,00
2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00
2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.118.500,00	42.118.500,00	0,00
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	6.023.979.750,00	6.074.979.750,00	51.000.000,00
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	31.535.000,00	31.535.000,00	0,00
3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	38.465.000,00	38.465.000,00	0,00
3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	19.723.000,00	19.723.000,00	0,00
3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	55.277.000,00	55.277.000,00	0,00
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.412.037.500,00	4.412.037.500,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	599.970.000,00	599.970.000,00	0,00
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.509.447.256,00	3.365.468.738,00	-143.978.518,00
3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.083.500,00	23.083.500,00	0,00
3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.562.500,00	17.562.500,00	0,00
3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.275.000,00	101.275.000,00	0,00
3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.557.500,00	33.557.500,00	0,00
3.25.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00
3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.362.000,00	343.362.000,00	0,00
3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	35.625.000,00	35.625.000,00	0,00
3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.875.000,00	68.875.000,00	0,00
3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000,00	57.000.000,00	-51.000.000,00
3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.962.500,00	43.962.500,00	0,00
3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.800.000,00	80.800.000,00	0,00
3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00
3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.242.800,00	35.242.800,00	0,00
3.26.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata			
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	109.170.500,00	75.450.000,00	-33.720.500,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.385.781.500,00	4.385.781.500,00	0,00
3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	164.856.100,00	164.856.100,00	0,00
3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	372.685.000,00	372.685.000,00	0,00
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	102.260.000,00	0,00	-102.260.000,00
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
3.26.05.2.01.0006 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	589.068.000,00	589.068.000,00	0,00
3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	278.475.750,00	380.735.750,00	102.260.000,00
3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		33.720.500,00	33.720.500,00
3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	107.500.000,00	107.500.000,00	0,00
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.347.488,00	1.962.805.526,00	-166.541.962,00
3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.295.250,00	30.295.250,00	0,00
3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.26.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.971.000,00	9.971.000,00	0,00
3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.740.000,00	147.740.000,00	0,00
3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00
3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.293.750,00	67.293.750,00	0,00
3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00
3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	60.001.500,00	60.001.500,00	0,00
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	149.925.000,00	149.925.000,00	0,00
3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	60.508.000,00	60.508.000,00	0,00
3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	180.475.000,00	180.475.000,00	0,00
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			
3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.520.327.000,00	6.520.327.000,00	0,00
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	455.154.996,00	455.154.996,00	0,00
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.664.569.796,00	5.666.286.794,00	1.716.998,00
3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	103.650.000,00	103.650.000,00	0,00
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.343.750,00	3.343.750,00	0,00
3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.692.500,00	65.066.250,00	14.373.750,00
3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	30.625.000,00	5.625.000,00
3.27.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.031.000,00	239.031.000,00	0,00
3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.812.500,00	80.812.500,00	0,00
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00
3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00
3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.120.300,00	30.120.300,00	0,00
3.30.3.31.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perdagangan dan Ketenagakerjaan			
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	259.500.000,00	259.500.000,00	0,00
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.505.647.564,00	2.531.112.660,00	25.465.096,00
2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			
3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	16.791.000,00	16.791.000,00	0,00
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48.209.000,00	48.209.000,00	0,00
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	87.900.000,00	87.900.000,00	0,00
3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	15.000.250,00	15.000.250,00	0,00
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.435.000,00	7.435.000,00	0,00
3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.414.750,00	63.414.750,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.761.000,00	196.761.000,00	0,00
3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.400.000,00	73.400.000,00	0,00
3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00
3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00
3.30.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	990.295.000,00	990.295.000,00	0,00
3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00
3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.505.742.495,00	8.374.916.998,00	-130.825.497,00
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.750.000,00	34.750.000,00	0,00
4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.091.250,00	35.091.250,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.425.000,00	57.425.000,00	0,00
4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	308.044.250,00	308.044.250,00	0,00
4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	76.151.250,00	76.151.250,00	0,00
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.572.013.000,00	2.359.710.000,00	-212.303.000,00
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	0,00
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	699.140.000,00	699.140.000,00	0,00
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.392.500,00	252.392.500,00	0,00
4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.963.500,00	44.963.500,00	0,00
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	191.170.146,00	0,00	-191.170.146,00
4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	152.284.500,00	152.284.500,00	0,00
4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	323.600.000,00	323.600.000,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Kesejahteraan Rakyat			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.587.500,00	42.587.500,00	0,00
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	48.286.500,00	48.286.500,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Administrasi Pembangunan			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	179.999.250,00	179.999.250,00	0,00
4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	169.996.750,00	169.996.750,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	304.439.500,00	304.439.500,00	0,00
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	359.874.500,00	359.874.500,00	0,00
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	85.686.000,00	85.686.000,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Hukum			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum			
4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	108.100.000,00	192.011.000,00	83.911.000,00
4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	757.500.000,00	673.589.000,00	-83.911.000,00
4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Organisasi			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			
4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Umum			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.650.000,00	64.650.000,00	0,00
4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.316.000,00	149.316.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.979.900,00	110.979.900,00	0,00
4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah			
4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.278.932.930,00	1.278.932.930,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pemerintahan			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			
4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00
4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Kesejahteraan Rakyat			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15.907.928.500,00	16.232.134.500,00	324.206.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	496.674.000,00	496.674.000,00	0,00
4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	244.878.500,00	244.878.500,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Umum			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253.331.200,00	253.331.200,00	0,00
4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	715.822.203,00	715.822.203,00	0,00
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.500.000,00	392.500.000,00	0,00
4.01.1.03.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	998.979.000,00	1.211.282.000,00	212.303.000,00
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
4.02 SEKRETARIAT DPRD			
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.500.000.000,00	1.950.187.000,00	450.187.000,00
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			
4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD	3.000.000.000,00	3.217.002.000,00	217.002.000,00
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	649.999.500,00	649.999.500,00	0,00
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	4.575.000.500,00	4.575.000.500,00	0,00
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.901.096.032,00	2.766.634.296,00	-134.461.736,00
4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	275.063.500,00	275.063.500,00	0,00
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	348.770.000,00	348.770.000,00	0,00
4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.445.000,00	26.445.000,00	0,00
4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	49.992.000,00	49.992.000,00	0,00
4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.315.000,00	293.315.000,00	0,00
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	338.250.000,00	188.625.000,00	-149.625.000,00
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	536.000.000,00	536.000.000,00	0,00
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.000.000,00	293.000.000,00	0,00
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.589.500,00	119.589.500,00	0,00
4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00
4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	303.600.000,00	253.038.000,00	-50.562.000,00
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.965.623.456,00	14.965.623.456,00	0,00
4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.892.800.000,00	1.575.798.000,00	-317.002.000,00
4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.519.336.000,00	2.519.336.000,00	0,00
5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5.01 PERENCANAAN			
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	259.229.000,00	259.229.000,00	0,00
5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	228.907.250,00	260.017.250,00	31.110.000,00
5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	85.000.000,00	69.500.000,00	-15.500.000,00
5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	242.703.000,00	227.093.000,00	-15.610.000,00
5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	56.772.500,00	56.772.500,00	0,00
5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	723.249.000,00	723.249.000,00	0,00
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	33.097.500,00	33.097.500,00	0,00
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	229.530.000,00	229.530.000,00	0,00
5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	81.520.000,00	81.520.000,00	0,00
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.850.500,00	35.850.500,00	0,00
5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	59.476.000,00	59.476.000,00	0,00
5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	279.673.500,00	279.673.500,00	0,00
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	94.538.000,00	94.538.000,00	0,00
5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	156.853.000,00	156.853.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	98.609.000,00	98.609.000,00	0,00
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.199.000,00	80.199.000,00	0,00
5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	133.479.000,00	133.479.000,00	0,00
5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.314.000,00	61.314.000,00	0,00
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.714.000,00	23.714.000,00	0,00
5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.078.000,00	11.078.000,00	0,00
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.134.995.629,00	2.993.670.925,00	-141.324.704,00
5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	114.980.000,00	114.980.000,00	0,00
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00
5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00
5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.640.000,00	56.640.000,00	0,00
5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.111.500,00	61.111.500,00	0,00
5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	30.636.000,00	30.636.000,00	0,00
5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.983.000,00	379.983.000,00	0,00
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274.750.000,00	274.750.000,00	0,00
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00
5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.370.000,00	93.370.000,00	0,00
5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.820.000,00	16.820.000,00	0,00
5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.024.500,00	12.024.500,00	0,00
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	33.833.750,00	33.833.750,00	0,00
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	20.387.500,00	20.387.500,00	0,00
5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00
5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	145.341.250,00	145.341.250,00	0,00
5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	39.487.500,00	39.487.500,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
5.02 KEUANGAN			
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	164.440.000,00	164.440.000,00	0,00
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74.886.250,00	74.886.250,00	0,00
5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	297.075.750,00	297.075.750,00	0,00
5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	235.752.500,00	235.752.500,00	0,00
5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	99.872.750,00	99.872.750,00	0,00
5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	44.166.250,00	44.166.250,00	0,00
5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	124.863.500,00	124.863.500,00	0,00
5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	543.723.250,00	543.723.250,00	0,00
5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	92.125.000,00	92.125.000,00	0,00
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.024.609.647,00	3.072.747.948,00	48.138.301,00
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.333.000,00	78.333.000,00	0,00
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.668.750,00	16.668.750,00	0,00
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.620.000,00	116.620.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.693.500,00	79.693.500,00	0,00
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.033.000,00	214.033.000,00	0,00
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.750.000,00	93.750.000,00	0,00
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.468.750,00	44.468.750,00	0,00
5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00
5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.443.750,00	24.443.750,00	0,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah			
5.02 KEUANGAN			
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	815.090.000,00	730.369.000,00	-84.721.000,00
5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	750.000.500,00	611.343.500,00	-138.657.000,00
5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	146.644.000,00	146.644.000,00	0,00
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	146.600.000,00	171.600.000,00	25.000.000,00
5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	622.000.000,00	622.000.000,00	0,00
5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.187.444.576,00	2.187.444.576,00	0,00
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.785.250,00	134.785.250,00	0,00
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	399.382.000,00	199.382.000,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	160.000.000,00	80.000.000,00
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478.737.500,00	478.737.500,00	0,00
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00	69.996.000,00	9.996.000,00
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.010.047,00	2.788.810.304,00	332.800.257,00
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	121.710.000,00	121.710.000,00	0,00
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000,00	24.200.000,00	14.000.000,00
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5.05.02.2.01.0005 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	322.550.000,00	322.550.000,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			
5.03 KEPEGAWAIAN			
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	184.547.000,00	184.547.000,00	0,00
5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	43.586.750,00	43.586.750,00	0,00
5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	146.223.750,00	146.223.750,00	0,00
5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	37.777.000,00	37.777.000,00	0,00
5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	41.991.000,00	41.991.000,00	0,00
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			
5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	81.332.500,00	81.332.500,00	0,00
5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	103.272.000,00	103.272.000,00	0,00
5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	377.326.500,00	377.326.500,00	0,00
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	482.943.250,00	482.943.250,00	0,00
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	145.309.750,00	145.309.750,00	0,00
5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	43.579.000,00	43.579.000,00	0,00
5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	64.152.500,00	64.152.500,00	0,00
5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	140.059.750,00	140.059.750,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.493.008.595,00	14.962.372.944,00	8.469.364.349,00
5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56.280.000,00	56.280.000,00	0,00
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	41.781.500,00	41.781.500,00	0,00
5.03.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	23.062.500,00	23.062.500,00	0,00
5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.468.000,00	91.468.000,00	0,00
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.821.250,00	53.821.250,00	0,00
5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.640.500,00	41.640.500,00	0,00
5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.178.000,00	239.178.000,00	0,00
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00
5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.125.000,00	212.125.000,00	0,00
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.250.000,00	61.250.000,00	0,00
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00
5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.917.500,00	10.917.500,00	0,00
5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah			
5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN			
5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama			
5.06.02.2.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			
5.06.02.2.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.06.02.2.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5.06.02.2.02.0005 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00
5.06.02.2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan			
5.06.02.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.06.02.2.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	4.919.750,00	4.919.750,00	0,00
5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.696.206.077,00	1.708.064.953,00	11.858.876,00
5.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.572.500,00	29.572.500,00	0,00
5.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.500,00	30.000.500,00	0,00
5.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.543.000,00	197.543.000,00	0,00
5.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00
5.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.009.000,00	30.009.000,00	0,00
5.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat			
6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	215.506.250,00	215.506.250,00	0,00
6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00
6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	74.181.250,00	74.181.250,00	0,00
6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	140.553.000,00	140.553.000,00	0,00
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			0,00
6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	74.382.750,00	74.382.750,00	0,00
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	217.775.000,00	217.775.000,00	0,00
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	83.693.750,00	83.693.750,00	0,00
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			
6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	95.936.250,00	95.936.250,00	0,00
6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	190.419.000,00	190.419.000,00	0,00
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.902.500,00	27.902.500,00	0,00
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.815.488.856,00	2.779.471.093,00	-36.017.763,00
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	466.377.250,00	466.377.250,00	0,00
6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	244.862.750,00	244.862.750,00	0,00
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	179.690.250,00	179.690.250,00	0,00
6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.292.500,00	69.292.500,00	0,00
6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	811.043.000,00	811.043.000,00	0,00
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.232.500,00	156.232.500,00	0,00
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.418.750,00	61.418.750,00	0,00
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.670.000,00	155.670.000,00	0,00
6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00
6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.293.750,00	19.293.750,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kei Kecil			
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.999.750,00	19.999.750,00	0,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	143.700.000,00	20.700.000,00	-123.000.000,00
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100.443.476,00	23.443.750,00	-76.999.726,00
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	45.224.750,00	45.224.750,00	0,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.475.213.190,00	1.669.055.583,00	193.842.393,00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.997.000,00	32.997.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.671.000,00	14.671.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.527.000,00	97.527.000,00	0,00
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.820.000,00	58.820.000,00	0,00
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.005.750,00	42.005.750,00	0,00
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.501.250,00	32.501.250,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kei Kecil Barat			
6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00
6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.447.500,00	10.447.500,00	0,00
6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.433.000,00	15.433.000,00	0,00
6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.897.000,00	59.897.000,00	0,00
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.950.000,00	56.950.000,00	0,00
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.987.500,00	23.987.500,00	0,00
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00
6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.972.500,00	9.972.500,00	0,00
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48.052.750,00	48.052.750,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.943.750,00	17.943.750,00	0,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	920.614.213,00	935.257.039,00	14.642.826,00
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.996.000,00	4.996.000,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kei Kecil Timur			
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36.899.250,00	36.899.250,00	0,00
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.036.000,00	17.036.000,00	0,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.260.000,00	50.260.000,00	0,00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39.730.000,00	39.730.000,00	0,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11.870.000,00	11.870.000,00	0,00
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.825.000,00	22.825.000,00	0,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	939.888.122,00	981.602.981,00	41.714.859,00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.995.000,00	27.995.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.488.500,00	21.488.500,00	0,00
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.956.000,00	4.956.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.994.000,00	87.994.000,00	0,00
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.273.750,00	19.273.750,00	0,00
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.687.500,00	14.687.500,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kei Besar Utara Timur			
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	988.529.750,00	956.820.981,00	-31.708.769,00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.152.500,00	25.152.500,00	0,00
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.209.000,00	89.209.000,00	0,00
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.791.000,00	16.791.000,00	0,00
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.847.500,00	52.847.500,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kei Besar Selatan			
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.138.277.876,00	1.064.917.048,00	-73.360.828,00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.460.500,00	19.460.500,00	0,00
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.109.000,00	119.109.000,00	0,00
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.955.500,00	39.955.500,00	0,00
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.475.000,00	14.475.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Manyeuw			
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	36.529.000,00	36.529.000,00	0,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	799.908.419,00	929.775.789,00	129.867.370,00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.020.500,00	14.020.500,00	0,00
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.471.000,00	61.471.000,00	0,00
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.803.750,00	19.803.750,00	0,00
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.600.750,00	17.600.750,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Hoat Sorbay			
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.645.000,00	35.645.000,00	0,00
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9.810.000,00	9.810.000,00	0,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	871.713.939,00	859.268.854,00	-12.445.085,00
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.803.000,00	17.803.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.059.000,00	8.059.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.992.000,00	9.992.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.181.000,00	61.181.000,00	0,00
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.910.000,00	24.910.000,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan			
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.743.500,00	38.743.500,00	0,00
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.526.500,00	16.526.500,00	0,00
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17.906.500,00	17.906.500,00	0,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	37.837.500,00	37.837.500,00	0,00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	655.697.330,00	558.857.581,00	-96.839.749,00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.162.500,00	8.162.500,00	0,00
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.407.500,00	30.407.500,00	0,00
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.468.500,00	22.468.500,00	0,00
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.296.000,00	86.296.000,00	0,00
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.021.500,00	57.021.500,00	0,00
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Kei Besar Selatan Barat			
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	78.757.500,00	78.757.500,00	0,00
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	21.975.000,00	21.975.000,00	0,00
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	90.500.000,00	90.500.000,00	0,00
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.363.000,00	34.363.000,00	0,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	616.234.914,00	606.635.470,00	-9.599.444,00
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.375.000,00	24.375.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.577.000,00	77.577.000,00	0,00
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.518.750,00	29.518.750,00	0,00
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.793.750,00	28.793.750,00	0,00
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
7.01.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kei Besar Utara Barat			
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	51.928.125,00	51.928.125,00	0,00
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.855.000,00	35.855.000,00	0,00
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	28.266.250,00	28.266.250,00	0,00
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.797.500,00	20.797.500,00	0,00
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.797.500,00	20.797.500,00	0,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55.325.000,00	55.325.000,00	0,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	160.354.000,00	160.354.000,00	0,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	24.206.250,00	24.206.250,00	0,00
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	94.675.000,00	94.675.000,00	0,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	927.773.432,00	932.626.084,00	4.852.652,00
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.975.000,00	23.975.000,00	0,00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.086.250,00	46.086.250,00	0,00
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.592.500,00	18.592.500,00	0,00
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.309.000,00	39.309.000,00	0,00
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.607.500,00	34.607.500,00	0,00
7.01.2.11.0.00.04.0000 Kecamatan Kei Besar			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
7.01 KECAMATAN			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36.485.000,00	36.485.000,00	0,00
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	79.962.500,00	79.962.500,00	0,00
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.931.250,00	79.931.250,00	0,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	90.454.000,00	90.454.000,00	0,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	904.320.175,00	936.544.572,00	32.224.397,00
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.975.000,00	84.975.000,00	0,00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.993.750,00	18.993.750,00	0,00
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.937.500,00	20.937.500,00	0,00
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.576.000,00	60.576.000,00	0,00
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.925.000,00	14.925.000,00	0,00
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.958.500,00	3.958.500,00	0,00
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.330.000,00	15.330.000,00	0,00
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.990.000,00	39.990.000,00	0,00
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.981.250,00	39.981.250,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	42.872.402.156,00	52.999.320.113,00	10.126.917.957,00
8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450.030.000,00	450.030.000,00	0,00
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00

Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkrurang)
8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.266.925.579,00	2.223.659.013,00	-43.266.566,00
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
JUMLAH	934.644.374.096,00	963.482.939.276,00	28.838.565.180,00